



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
KKP KELAS I SOEKARNO HATTA  
TAHUN 2019**

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO-HATTA**  
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta  
[www.kkpsoetta.com](http://www.kkpsoetta.com) email:[kkp.soekarnohatta@yahoo.co.id](mailto:kkp.soekarnohatta@yahoo.co.id)

## KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Tugas dan fungsi tersebut telah dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang pembiayaannya dialokasikan dalam dokumen DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019. Laporan ini menyajikan pencapaian dari indikator keluaran berbagai kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki selama tahun 2019.

Kami harapkan laporan ini dapat memberikan informasi kepada unit utama kami Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, dan pihak-pihak terkait tentang capaian kinerja pada tahun 2019.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam pelaksanaan kegiatannya selama tahun 2019. Saran membangun kami harapkan, untuk mengatasi tantangan yang ditemukan demi peningkatan pencapaian kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada tahun mendatang.

Tangerang, Januari 2020  
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan  
Kelas I Soekarno-Hatta



**dr. Anas Ma'ruf, MKM**  
NIP 197005202002121003



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban kinerja KKP Kelas I Soekarno Hatta dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi. Sebagai salah satu UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), maka orientasi kerjanya adalah mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Program P2P sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2019-2019.

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki sasaran strategis yaitu meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta meningkatnya kesehatan jiwa pada akhir tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut maka KKP Kelas I Soekarno-Hatta menetapkan sasaran meningkatnya kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk Negara. Untuk mencapai sasaran tersebut kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pengendalian Kekejarantinaan, Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Pengendalian Risiko Lingkungan, dan Ketatausahaan.

Untuk menilai keberhasilan KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2019, telah ditetapkan 12 indikator. Realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar 98,07%, dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 134,0%. Dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan dapat dipaparkan bahwa :

- a. Terdapat 6 indikator yang berhasil mencapai target dengan capaian lebih dari 100%, yaitu:
  - 1) Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekejarantinaan kesehatan dengan realisasi 611 sertifikat dari target 600 sertifikat dengan capaian kinerja 101,8%;
  - 2) Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dengan realisasi 46.011 sertifikat dari target 39.024 sertifikat dengan capaian kinerja 117,9%;
  - 3) Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus dengan realisasi 29 layanan dari target 20 layanan dengan capaian kinerja 145%;



- 4) Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan dengan realisasi 180.367 sertifikat dari target 60.000 sertifikat dengan capaian kinerja 300,6%;
  - 5) Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung dengan realisasi 1.802 orang dari target 1.100 orang dengan capaian kinerja 163,8%; dan
  - 6) Jumlah pengadaan sarana prasarana dengan realisasi 269 unit dari target 150 unit dengan capaian kinerja 179,3%.
- b. Terdapat 6 indikator yang yang berhasil mencapai target dengan capaian 100%, yaitu:
- 1) Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP dengan realisasi 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%;
  - 2) Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah dengan realisasi 1 bandara dari target 1 bandara dengan capaian kinerja 100%;
  - 3) Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi dengan realisasi 2 bandara dari target 2 bandara dengan capaian kinerja 100%;
  - 4) Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area dengan realisasi 2 bandara dari target 2 bandara dengan capaian kinerja 100%;
  - 5) Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan realisasi 40 dokumen dari target 40 dokumen dengan dan capaian kinerja 100%; dan
  - 6) Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P dengan realisasi 9 kali pelatihan dari target 9 kali pelatihan dengan capaian kinerja 100%.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja di tahun 2019 yaitu tersedianya pagu anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana lainnya, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan



Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD), serta peningkatan kerjasama tim dan koordinasi dengan lintas sektor.

Kendala yang ditemukan dalam pencapaian kinerja selama tahun 2019 yaitu jumlah SDM yang belum sebanding dengan beban kerja jumlah orang, alat angkut, barang, dan tempat yang harus dilakukan pengawasan, kontribusi lintas sektor/ lintas program yang berhubungan dengan kegiatan KKP Kelas I Soekarno-Hatta masih ada yang belum baik.

Rencana tindak lanjut perbaikan pada tahun yang akan datang diantaranya usulan penambahan SDM terampil di bidangnya, monitoring dan evaluasi rutin pencapaian kegiatan, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait lainnya baik melalui advokasi, sosialisasi kegiatan dan membangun komitmen secara bersama-sama untuk mencegah keluar masuknya penyakit melalui pintu gerbang Negara.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Isu Strategis .....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
D. Struktur Organisasi .....	6
E. Sumber Daya Manusia .....	6
F. Maksud dan Tujuan .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	13
A. Perencanaan Kinerja .....	13
B. Perjanjian Kinerja .....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	20
A. Pengukuran Kinerja .....	20
B. Analisis Pencapaian Kinerja .....	22
1. Indikator jumlah Alat Angkut Sesuai Dengan Standar Kekeparantinaan Kesehatan .....	22
2. Indikator persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP .....	31
3. Indikator jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit .....	39
4. Indikator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus .....	46
5. Indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah .....	51



6. Indikator jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan ..	56
7. Indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi ..	62
8. Indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area ..	70
9. Indikator jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung ..	81
10. Indikator jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya ..	85
11. Indikator jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P ..	89
12. Indikator jumlah pengadaan sarana prasarana ..	93
C. Sumber Daya ..	99
<b>BAB IV PENUTUP</b> ..	108
A. Kesimpulan ..	108
B. Rencana Tindak Lanjut ..	110
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Awal dan Revisi	
- Monitoring Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 Per Bulan	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja RAK KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2015-2019 Awal .....	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja RAK KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019-2019 Perubahan .....	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019 .....	18
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2019 KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019 .....	21
Tabel 3.2	Realisasi Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus Tahun 2019	46
Tabel 3.3	Hasil Inspeksi Sanitasi TTU, TPM, dan Tempat Penyediaan Air Bersih Tahun 2019 .....	63
Tabel 3.4	Perbandingan Jumlah Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), dan Sarana Penyediaan Air Bersih yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 – 2019 .....	65
Tabel 3.5	Hasil Pemantauan Vektor Tahun 2019 .....	71
Tabel 3.6	Hasil Skrining Penyakit Menular Langsung Tahun 2019 .....	82
Tabel 3.7	Efisiensi Pengadaan Tahun 2019 .....	97
Tabel 3.8	Alokasi dan Realisasi Anggaran Pengeluaran Menurut Jenis Belanja KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2019 .....	100
Tabel 3.9	Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Sumber Pembiayaan KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019 .....	100
Tabel 3.10	Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Output KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019 .....	100
Tabel 3.11	Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Indikator KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019 .....	102
Tabel 3.12	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019 .....	104
Tabel 3.13	Posisi Barang Milik Negara di KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2019 .....	106
Tabel 3.14	Posisi Barang Persediaan di KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2019 .....	107
Tabel 3.15	Rincian Aset Sarana dan Prasarana KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2019 .....	107





## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019 .....	6
Grafik 1.2	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Golongan Tahun 2019 .....	7
Grafik 1.3	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Jabatan Tahun 2019 .....	7
Grafik 1.4	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019 .....	8
Grafik 1.5	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2019 .....	8
Grafik 1.6	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum Tahun 2019 .....	9
Grafik 1.7	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2019 .....	9
Grafik 1.8	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Penempatan Dinas Tahun 2019 .....	10
Grafik 1.9	Distribusi Pegawai Pensiun KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019 .....	10
Grafik 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekeparantaraan .....	23
Grafik 3.2	Perbandingan Jumlah Penerbitan Sertifikat Knock Down (KD) Tahun 2015 – 2019 .....	24
Grafik 3.3	Perbandingan Jumlah Inspeksi Sanitasi dan Penerbitan Sertifikat Sanitasi Pesawat Tahun 2015 – 2019 .....	25
Grafik 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Ke-1 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan RAP Ditjen P2P Tahun 2019 .....	26
Grafik 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Respon Sinyal SKD KLB dan Bencana di Wilayah KKP .....	35
Grafik 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Ke-2 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan RAP Ditjen P2P Tahun 2019 .....	35
Grafik 3.7	Perbandingan Capaian Indikator Ke-2 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan KKP Kelas I Surabaya Tahun 2019 .....	36



Grafik 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Deteksi Dini Dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit.....	40
Grafik 3.9	Perbandingan Jumlah COP yang diterbitkan Tahun 2015 – 2019 ..	40
Grafik 3.10	Perbandingan Jumlah Pengawasan Dokumen Gendec Tahun 2015 – 2019 .....	41
Grafik 3.11	Perbandingan Jumlah Surveilans Rutin Tahun 2015 – 2019 .....	42
Grafik 3.12	Perbandingan Capaian Indikator Ke-3 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan KKP Kelas I Surabaya Tahun 2019 .....	43
Grafik 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus .....	47
Grafik 3.14	Perbandingan Jumlah Kunjungan Pos Kesehatan Pada Situs Tahun 2015 – 2019 .....	48
Grafik 3.15	Perbandingan Capaian Indikator Ke-4 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan KKP Kelas I Surabaya Tahun 2019 .....	49
Grafik 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandar Udara/PLBD yang Memiliki Kebijakan Kesiapsiagaan Berupa Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi Wabah .....	52
Grafik 3.17	Perbandingan Capaian Indikator Ke-5 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan RAP Ditjen P2P Tahun 2019 .....	53
Grafik 3.18	Perbandingan Capaian Indikator Ke-5 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan KKP Kelas I Surabaya Tahun 2019 .....	53
Grafik 3.19	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Sertifikat / Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah yang Diterbitkan Tahun 2015 – 2019 .....	57
Grafik 3.20	Perbandingan Jumlah Penerbitan ICV dan Legalisasi ICV Tahun 2015 – 2019 .....	58
Grafik 3.21	Perbandingan Jumlah Surat Ijin Layanan Kesehatan Tahun 2015 – 2019 .....	59
Grafik 3.22	Perbandingan Capaian Indikator Ke-6 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan KKP Kelas I Surabaya Tahun 2019 .....	59



Grafik 3.23	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi .....	64
Grafik 3.24	Perbandingan Capaian Indikator Ke-7 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan RAP Ditjen P2P Tahun 2019 .....	66
Grafik 3.25	Perbandingan Capaian Indikator Ke-7 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan KKP Kelas I Surabaya Tahun 2019 .....	66
Grafik 3.26	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area .....	71
Grafik 3.27	Data Indeks Pinjal di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2015 – 2019 .....	72
Grafik 3.28	Data HI Perimeter di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2015 – 2019 .....	73
Grafik 3.29	Data HI Buffer di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2015 – 2019 .....	73
Grafik 3.30	Data survei Anopheles di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2015 – 2019 .....	74
Grafik 3.31	Kepadaatan Lalat di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2015 – 2019 .....	74
Grafik 3.32	Kepadatan Kecoa di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2015 – 2019 .....	75
Grafik 3.33	Perbandingan Capaian Indikator Ke-8 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan RAP Ditjen P2P Tahun 2019 .....	76
Grafik 3.34	Perbandingan Capaian Indikator Ke-8 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan KKP Kelas I Surabaya Tahun 2019 .....	76
Grafik 3.35	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Orang yang Melakukan Skrining Penyakit Menular Langsung .....	82
Grafik 3.36	Perbandingan Capaian Indikator Ke-9 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan RAP Ditjen P2P Tahun 2019 .....	82
Grafik 3.37	Perbandingan Capaian Indikator Ke-9 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan KKP Kelas I Surabaya Tahun 2019 .....	83
Grafik 3.38	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya .....	86



Grafik 3.39	Perbandingan Capaian Indikator Ke-10 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan RAP Ditjen P2P Tahun 2019 .....	86
Grafik 3.40	Perbandingan Capaian Indikator Ke-10 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan KKP Kelas I Surabaya Tahun 2019 .....	87
Grafik 3.41	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P .....	90
Grafik 3.42	Perbandingan Capaian Indikator Ke-11 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan RAP Ditjen P2P Tahun 2019 .....	90
Grafik 3.43	Perbandingan Capaian Indikator Ke-11 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan KKP Kelas I Surabaya Tahun 2019 .....	91
Grafik 3.44	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana .....	94
Grafik 3.45	Perbandingan Capaian Indikator Ke-12 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan RAP Ditjen P2P Tahun 2019 .....	94
Grafik 3.46	Perbandingan Capaian Indikator Ke-12 KKP Kelas I Soekarno Hatta dan KKP Kelas I Surabaya Tahun 2019 .....	95
Grafik 3.47	Realisasi Anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	99
Grafik 3.48	Persentase Realisasi Anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2015 - 2019 .....	99



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019 .....	6
Gambar 3.1 Penghargaan KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019 .....	98



# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi pengukuran kinerja dan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2015-2019, khususnya target kinerja tahun 2019.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno-Hatta adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Tugas KKP Kelas I Soekarno-Hatta adalah mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma. Bandara Soekarno Hatta merupakan bandara internasional terbesar dan terpadat penerbangannya di Indonesia sedangkan Bandara Halim Perdanakusuma merupakan bandara khusus untuk kegiatan protokoler kenegaraan dan berbagai *charter flight* dan pada tahun 2017 mulai digunakan untuk penerbangan komersial. Sehingga keberhasilan KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam melaksanakan tugasnya menjadi sangat penting dalam menjaga kewibawaan Bangsa dan Negara Indonesia.



## B. ISU STRATEGIS

Perkembangan teknologi alat angkut yang semakin cepat membuat jarak antar negara seolah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global.

*International Health Regulation (IHR) 2005* mengamanatkan kepada negara-negara anggota untuk mengembangkan, memperkuat dan mempertahankan kapasitas kesehatan masyarakat nasional, agar dapat mendeteksi, menilai, melaporkan berbagai peristiwa dan melakukan respon dengan cepat dan efektif terhadap berbagai risiko dan emergensi kesehatan masyarakat. Selain itu setiap negara mempunyai kemampuan untuk mencegah dan menangkal transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan serta meresahkan dunia (PHEIC). Negara-negara anggota juga harus melakukan penyesuaian legal dan administrasi untuk memfasilitasi kepatutan terhadap IHR 2005.

Bandara merupakan titik simpul pertemuan atau aktivitas keluar masuk pesawat, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (*new emerging diseases*), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (*re-emerging diseases*). Ancaman penyakit tersebut merupakan dampak negatif dari diberlakukannya pasar bebas atau era globalisasi, dan dapat menimbulkan kerugian besar baik pada sektor ekonomi, perdagangan, sosial budaya, maupun politik yang berdampak besar kepada suatu negara atau daerah.

Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma merupakan bandara yang memiliki aktivitas tinggi akan pergerakan alat angkut, muatan maupun orang. Tingginya mobilitas ini, dapat menyebabkan kemungkinan penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah yang lain juga semakin meningkat.



Jumlah penerbangan kedatangan dan keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta dari internasional dan domestik tahun 2019 rata-rata sebanyak 1.008 pesawat per hari dengan jumlah penumpang rata-rata 135.843 orang per hari. Sedangkan jumlah penerbangan kedatangan dan keberangkatan di Bandara Halim Perdanakusuma dari internasional dan domestik rata-rata sebanyak 168 pesawat per hari dengan jumlah penumpang rata-rata 16.296 orang per hari.

Pada tahun 2019 beragam kasus penyakit diwaspadai oleh KKP Kelas I Soekarno Hatta yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri yaitu KLB Polio cVDVP Tipe 1 di Filipina dan Thailand, kewaspadaan Monkey Pox dari Nigeria, kewaspadaan terhadap penyakit Virus Ebola dari Kongo, dan kewaspadaan Polio VDVP Tipe 2 dari Filipina, KLB Rabies di Nusa Tenggara Barat.





### C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas KKP Kelas I Soekarno-Hatta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/IV/2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, KKP Kelas I Soekarno-Hatta melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan terbatas;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional;
7. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja dilingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikasi kesehatan obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;



11. Pelaksanaan pemberian layanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaaan, pengendalian risiko lingkungan dan surveilans kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas negara; dan
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga KKP.

Enam belas fungsi diatas terdapat dalam indikator kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta yang telah ditetapkan dalam rangka pengendalian berbagai risiko kesehatan yang berada di Pintu Masuk Negara untuk upaya cegah tangkal penyakit agar jumlah penyakit menular, penyakit tidak menular menurun dan kesehatan jiwa meningkat sesuai sasaran Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan, sehingga diharapkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat meningkat.



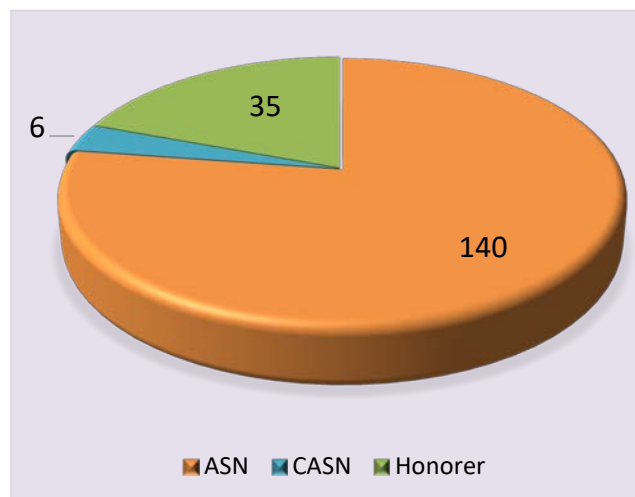
## D. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi KKP Kelas I Soekarno-Hatta



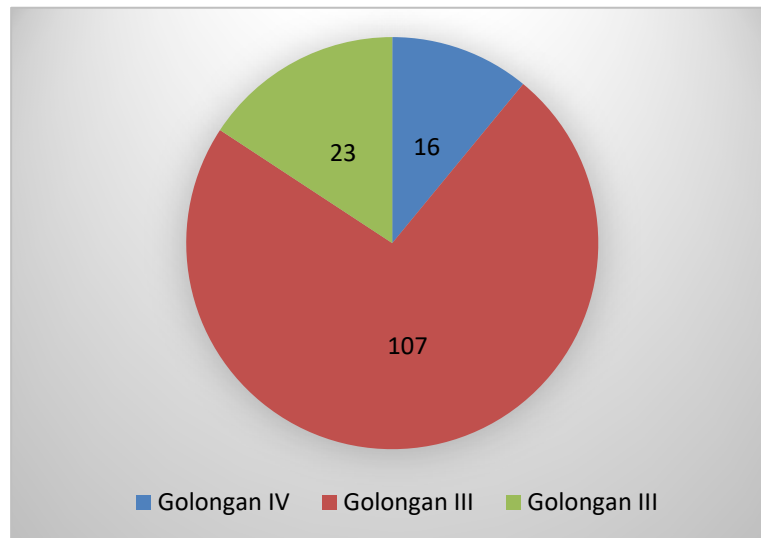
## E. SUMBER DAYA MANUSIA

Grafik 1.1  
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019



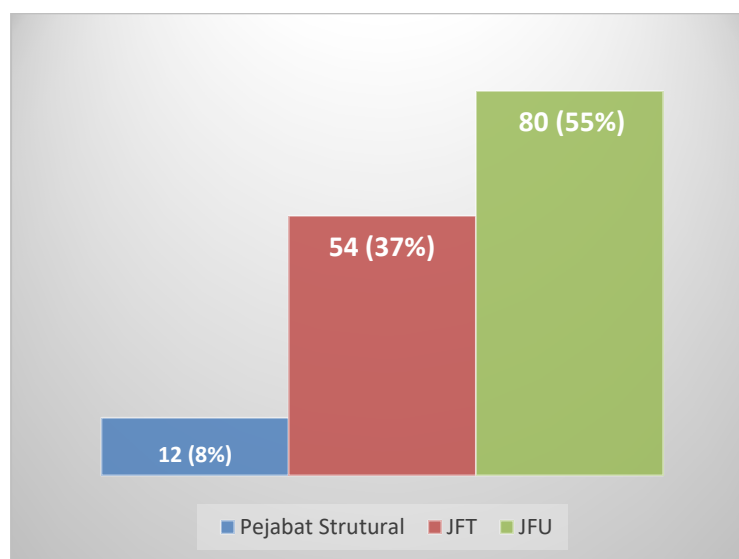
Dari grafik 1.1 diketahui bahwa jumlah pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2019 sebanyak 181 orang. 140 orang 80,2% atau diantaranya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), 6 orang atau 3,3% berstatus Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), dan 35 orang atau 19,3% berstatus honorer.

Grafik 1.2  
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Golongan Tahun 2019



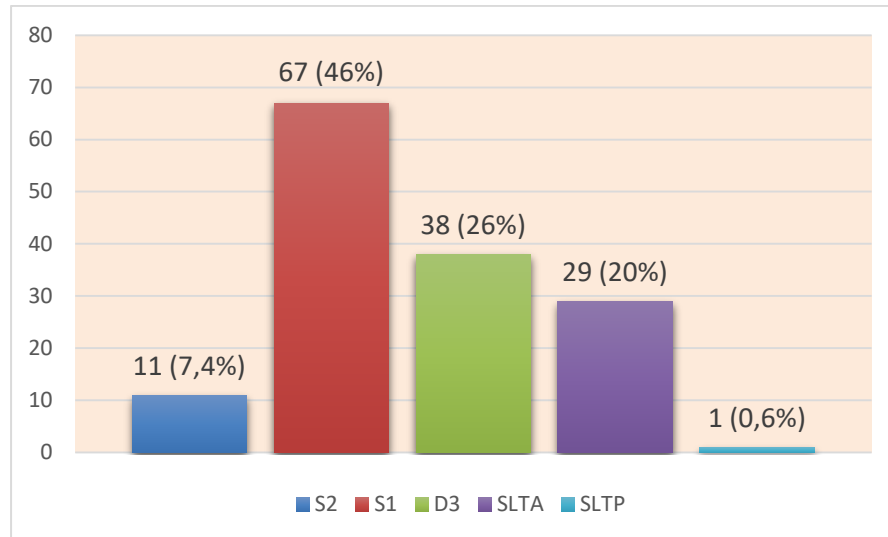
Berdasarkan grafik 1.2 diketahui bahwa dari 146 orang Aparatur Sipil Negara, sebagian besar pegawai sebanyak 107 orang (73%) memiliki golongan pangkat III, 23 orang (16 %) memiliki golongan pangkat II, dan 16 orang (11%) memiliki golongan pangkat IV.

Grafik 1.3  
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Jabatan Tahun 2019



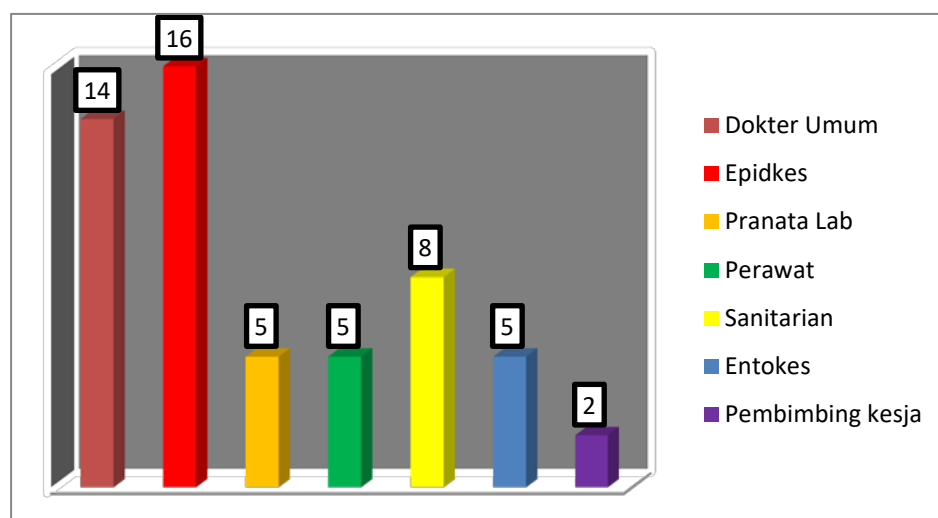
Dari grafik 1.3 terlihat bahwa 80 orang (55%) memiliki jabatan fungsional umum, 54 orang (37%) memiliki jabatan fungsional tertentu dan 12 orang (8%) adalah pejabat struktural.

Grafik 1.4  
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019



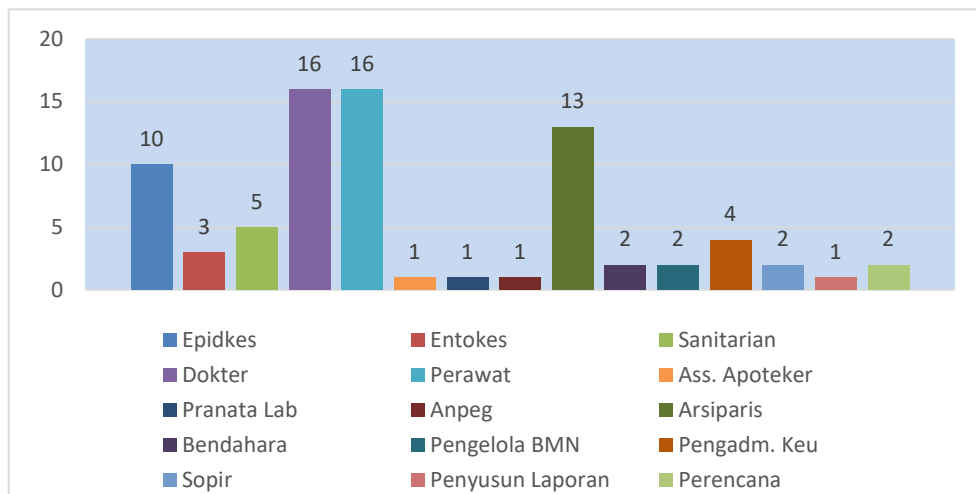
Berdasarkan grafik 1.4 terlihat bahwa 67 orang (46%) berpendidikan S1, 38 orang (26%) berpendidikan Diploma III, 29 orang (20%) berpendidikan SMA, 11 orang (7,4%) orang berpendidikan S2, dan 1 orang (0,6%) berpendidikan orang SLTP.

Grafik 1.5  
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2019



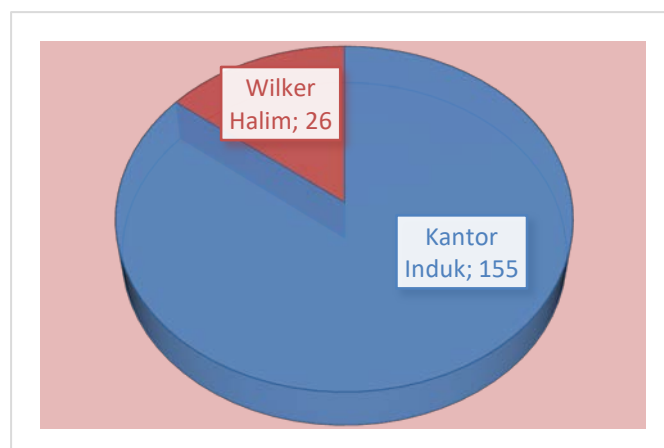
Dari grafik 1.5 terlihat bahwa dari 54 pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu, persentase terbanyak adalah epidemiolog kesehatan sebanyak 16 orang (29,6%), selanjutnya dokter umum sebanyak 14 orang (25%), dan yang paling sedikit yaitu pembimbing kesehatan kerja sebanyak 2 orang (3,7%). Sedangkan gambaran pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.6  
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta  
Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum Tahun 2019



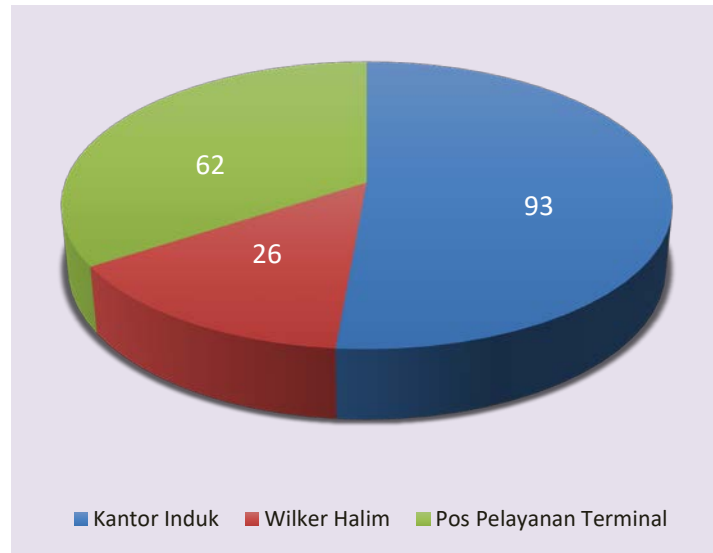
Berdasarkan grafik 1.6 terlihat bahwa dari 80 pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Umum, persentase terbanyak adalah persentase terbanyak adalah dokter dan perawat masing-masing 16 orang (20%), arsiparis 13 orang (16%) dan epidemiolog kesehatan 10 orang (12%).

Grafik 1.7  
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta  
Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2019



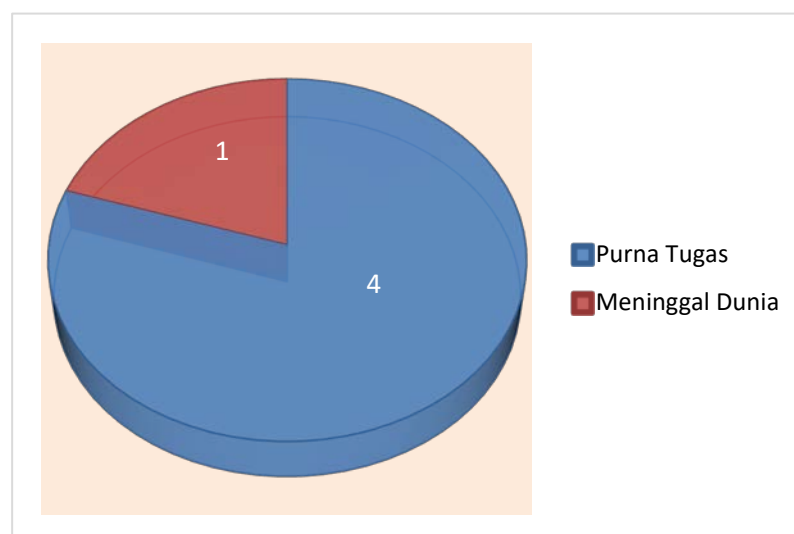
Dari grafik 1.7 dapat dilihat bahwa 155 pegawai (85,6%) di tempatkan di Kantor Induk KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan 26 pegawai (14,4%) di tempatkan di Wilayah Kerja Halim Perdanakusuma.

Grafik 1.8  
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta  
Berdasarkan Penempatan Dinas Tahun 2019



Dari grafik 1.8 terlihat bahwa 93 orang (52%) berdinasi di kantor induk KKP Kelas I Soekarno-Hatta, 62 orang (34%) berdinasi di pos pelayanan kesehatan Bandara Soekarno-Hatta dan 26 orang (14%) di Wilayah Kerja Halim Perdanakusuma.

Grafik 1.9  
Distribusi Pegawai Pensiun KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019



Dari grafik 1.9 diketahui bahwa pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta yang pensiun di tahun 2019 sebanyak 5 orang, dengan rincian 4 orang (80%) purna tugas dan 1 orang (20%) karena meninggal dunia.

Berdasarkan data distribusi pegawai diatas menunjukkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki KKP Kelas I Soekarno-Hatta untuk dapat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi. Saat ini Bandara Soekarno-Hatta semakin berkembang dengan adanya pembangunan landasan pacu (*runway*) ketiga dan jalur penghubung *runway* di sisi timur (*east cross taxiway*) yang akan meningkatkan pelayanan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dengan estimasi peningkatan menjadi 100 juta penumpang per tahun. Maka ke depannya perlu peningkatan kemampuan kinerja Sumber Daya Manusia dari aspek kuantitas, kualitas, dan komposisi, dengan penambahan tenaga medis, pelatihan-pelatihan teknis, dalam rangka melaksanakan tugas rutin cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

## **F. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2019 adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada unit utama Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KKP Kelas I Soekarno Hatta untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.





## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 disusun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2461 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan yang terdiri dari:

- Bab I (Pendahuluan)  
Menjelaskan latar belakang, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, SDM, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja)  
Menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan, serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan tahun 2019.
- Bab III (Akuntabilitas Kinerja)  
Menjelaskan pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2019, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumber daya lain yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja
- Bab IV (Penutup)  
Berisi kesimpulan dan rencana tindak lanjut tahun mendatang.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. KKP Kelas I Soekarno-Hatta menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun.

##### **1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015-2019**

RAK KKP Kelas I Soekarno Hatta 2015–2019 diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran program dalam Rencana Aksi Program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan. Dalam RAK KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2015 - 2019 tidak ada visi dan misi unit kerja, namun mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu:

##### **a. Visi**

*“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “*

##### **b. Misi**

- 1) Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- 5) Bangsa berdaya saing.
- 6) Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.



7) Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mencapai visi misi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan sembilan agenda prioritas atau Nawa Cita. KKP Kelas I Soekarno-Hatta sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, berkontribusi dalam Pembangunan Kesehatan Nasional demi terwujudnya agenda Nawa Cita ke-5 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.”

**c. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta dalam periode tahun 2015 – 2019, yaitu menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular, serta meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan.

**d. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta dalam periode tahun 2015 – 2019 adalah “Meningkatnya kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara”.

Indikator pencapaian sasaran pada tahun 2018 dan 2019 berbeda dari tahun 2015-2017 dikarenakan adanya kebijakan Ditjen P2P untuk menyeragamkan indikator kinerja untuk seluruh KKP di Indonesia. Indikator pencapaian sasaran awal dan perubahan tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja RAK KKP Kelas I Soekarno-Hatta  
Tahun 2015-2019 Awal

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase pengawasan lalu lintas alat angkut (pesawat) di pintu masuk negara	75%	90%	95%	100%	100%
2	Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang Direspon	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pemeriksaan dokumen kesehatan penumpang di pintu masuk negara	87%	88%	90%	91,5%	93%
4	Persentase pemeriksaan/pengawasan lalu lintas orang sakit dan jenazah	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase penerbitan dokumen OMKABA Ekspor	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase pemeriksaan P3K pesawat	50%	55%	50%	50%	50%
7	Persentase penerbitan sertifikat sanitasi pesawat	-	-	100%	100%	100%
8	Persentase sarana air minum di lingkungan bandara yang dilakukan pengawasan	75%	75%	80%	80%	85%
9	Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	83,3%	84%	92,5%	95%	97,5%
11	Persentase wilayah yang dilakukan pengendalian vektor terpadu	13,8%	28%	28%	28%	28%
12	Persentase pelayanan kesehatan yang diberikan di bandara	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase pelayanan kesehatan yang diberikan pada situasi matra	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase pelayanan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di bandara	90%	90%	91 %	92 %	93%
16	Persentase penilaian SAKIP dengan hasil AA	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja RAK KKP Kelas I Soekarno-Hatta  
Tahun 2018-2019 Perubahan

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target	
			2018	2019
Meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1	Jumlah Alat Angkut Sesuai Dengan Standar Kekejarantinaan Kesehatan	600 Sertifikat	600 Sertifikat
	2	Persentase Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB Dan Bencana Di Wilayah Layanan KKP	100%	100%
	3	Jumlah Deteksi Dini Dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk Dan Keluarnya Penyakit	38.692 sertifikat	39.024 sertifikat
	4	Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	8 layanan	20 layanan
	5	Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBD Yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Berpotensi Wabah	1 bandara	1 bandara
	6	Jumlah Sertifikat/Surat Izin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah Yang Diterbitkan	100.000 sertifikat	60.000 sertifikat
	7	Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBD Yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi	2 bandara	2 bandara
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	8	Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBD Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter Dan Buffer Area	2 bandara	2 bandara
Menurunnya penyakit menular langsung	9	Jumlah Orang Yang Melakukan Skrining Penyakit Menular Langsung	1.000 orang	1.100 orang
Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	10	Jumlah Wilayah Kerja Yang Melaksanakan Posbindu	1 lokasi	-
	11	Jumlah Tempat Kerja Yang Melaksanakan Implementasi KTR Di Wilayah Kerja KKP	5 lokasi	-
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	12	Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya	40 dokumen	40 dokumen
	13	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P	12 jenis	9 jenis
	14	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana	2 unit	150 unit

**e. Kebijakan Teknis**

- 1) Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit;
- 2) Peningkatan perlindungan kelompok berisiko;
- 3) Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko lingkungan;
- 4) Pengendalian penyakit dan pemutusan rantai penularan;
- 5) Pencegahan dan penanggulangan KLB/Wabah yang berdimensi lokal, nasional maupun internasional; dan
- 6) Mengutamakan upaya promotif & preventif dalam pencegahan dan pengendalian penyakit.

**f. Strategi Teknis**

- 1) Memperkuat aspek legal;
- 2) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi;
- 3) Melaksanakan intensifikasi, akselerasi dan inovasi program;
- 4) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- 5) Memperkuat jejaring kerja dan kemitraan;
- 6) Memperkuat manajemen logistik;
- 7) Meningkatkan aplikasi teknologi pendukung;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pendampingan teknis;
- 9) Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan program; dan
- 10) Meningkatkan pengembangan teknologi preventif.

**g. Kegiatan**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KKP Kelas I Soekarno Hatta melaksanakan lima kegiatan pada tahun 2019 yang terdiri dari:

- 1) Surveilans dan karantina kesehatan;
- 2) Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik;
- 3) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung;
- 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; dan
- 5) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit.



## 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

RKT merupakan penjabaran atau turunan dari RAK Tahun 2015-2019 yang berisi indikator kinerja dan target tahunan, serta gambaran kegiatan dan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2019.

### B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta disusun mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan dan Rencana Kerja Tahunan KKP Kelas I Soekarno-Hatta.

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	600 Sertifikat
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP		100%	
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit		39.024 sertifikat	
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus		20 layanan	

		5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	1 bandara
		6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	60.000 sertifikat
		7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	2 bandara
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	2 bandara
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	1.100 orang
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 dokumen
		11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	9 jenis
		12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	150 unit

Jumlah pagu anggaran untuk mencapai target diatas pada dokumen Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019 sebesar Rp.39.193.142.000,-.



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam kurun waktu Januari – Desember 2019.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan dari RAK KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2015–2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan dan Penetapan Kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator KKP Kelas I Soekarno-Hatta yang telah ditetapkan. Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019, terdapat 12 indikator kinerja dengan target dan capaian sebagai berikut:



Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja Tahun 2019  
KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	600 sertifikat	611 sertifikat	101,8%
2	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%	100%	100,0%
3	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	39.024 sertifikat	46.011 sertifikat	117,9%
4	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	20 layanan	29 layanan	145,0%
5	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	1 bandara	1 bandara	100,0%
6	Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	60.000 sertifikat	180.367 sertifikat	300,6%
7	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	2 bandara	2 bandara	100,0%
8	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	2 bandara	2 bandara	100,0%
9	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	1.100 orang	1.802 orang	163,8%
10	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 dokumen	40 dokumen	100,0%
11	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	9 jenis	9 jenis	100,0%
12	Jumlah pengadaan sarana prasarana	150 unit	269 unit	179,3%
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>				<b>134,0 %</b>



## B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana telah disajikan pada tabel 3.1, KKP Kelas I Soekarno-Hatta telah berhasil mencapai target 12 indikator tahun 2019 dengan rata-rata capaian sebesar 134,0% dimana terdapat 6 indikator dengan capaian kinerja lebih dari 100% dan 6 indikator dengan capaian kinerja 100%. Berikut pencapaian dari masing-masing indikator.

### INDIKATOR 1

#### Jumlah Alat Angkut Sesuai Dengan Standar Kekearifinaan Kesehatan

##### 1. Definisi Operasional

Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekearifinaan kesehatan dalam periode satu tahun. Target tahun 2019 yaitu 600 sertifikat yang terdiri dari 2 sub indikator, yaitu:

*a. Penerbitan Sertifikat Knock Down(Hapus Serangga)*

Penerbitan sertifikat Knock Down merupakan akhir rangkaian kegiatan pengawasan kegiatan hapus serangga agar memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jika disinfeksi telah dilaksanakan sesuai persyaratan dan jumlah bahan disinfektan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, maka diterbitkan Sertifikat Hapus Serangga. Hal ini diberlakukan bagi pesawat yang berangkat menuju negara tertentu yang mempersyaratkan. Target tahun 2019 yaitu 120 sertifikat.

*b. Inspeksi Sanitasi Pesawat dan Penerbitan Sertifikat Sanitasi Pesawat*

Inspeksi sanitasi pesawat dilakukan dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi pesawat. Penerbitan sertifikat sanitasi pesawat dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara dan dalam rangka persiapan implementasi UU Karantina. Sertifikat diterbitkan apabila pesawat memenuhi kriteria tidak ditemukan faktor risiko penyakit dari segi lingkungan dan tidak ditemukan vektor dan binatang tular penyakit lainnya. Target tahun 2019 yaitu 480 pemeriksaan dan sertifikat.

Outcome dari indikator ini yaitu menurunnya faktor resiko penularan penyakit potensial wabah melalui alat angkut (pesawat) yang tidak memenuhi standar kekarantinaan kesehatan. Dimana pada tahun 2018 terdapat 27.571 pesawat dari negara terjangkit yang diawasi dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 28.038 pesawat dengan hasil tidak terdapat faktor resiko terjadinya penyebaran penyakit melalui alat angkut (pesawat).

## 2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Akumulasi jumlah sertifikat Knock Down, inspeksi dan penerbitan sertifikat sanitasi pesawat dalam satu tahun.

- Sertifikat Knock Down = 116 sertifikat
- Inspeksi dan sertifikat sanitasi pesawat = 495 sertifikat
- Jumlah = 611 sertifikat**

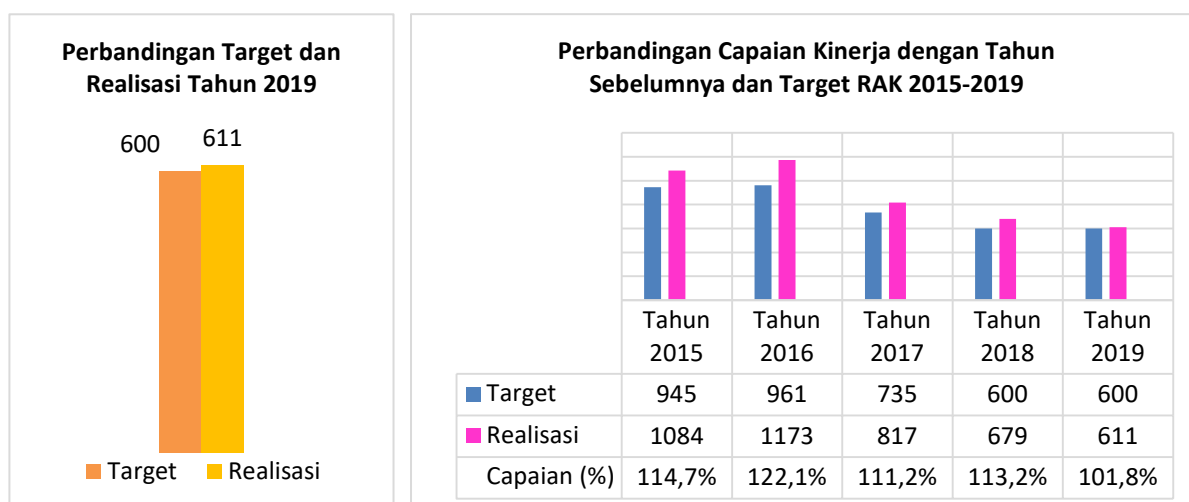
- **Capaian**

$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$	$\frac{611}{600} \times 100\% = \mathbf{101,8\%}$
---	---

## 3. Capaian Kinerja

Pada tahun 2019 sertifikat yang diterbitkan terdiri dari sertifikat Knock Down sebanyak 116 sertifikat, sertifikat sanitasi pesawat sebanyak 45 sertifikat, dan pemeriksaan sanitasi pesawat yang memenuhi syarat sebanyak 450 pesawat.

Grafik 3.1  
Perbandingan Capaian Kinerja  
Indikator Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Keekarantinaan

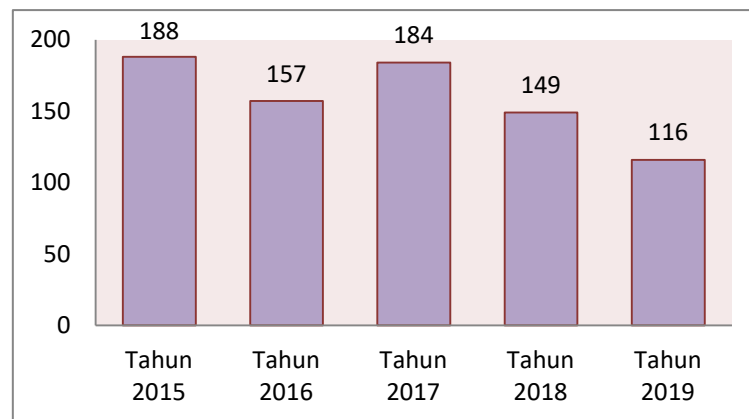


Dari grafik 3.1 diketahui bahwa jumlah alat angkut yang sesuai dengan standar kekarantinaan pada tahun 2019 sebanyak 611 sertifikat dan sudah melebihi target dengan capaian sebesar 101,8%. Realisasi tahun 2019 sudah memenuhi target akhir RAK 2015-2019.

Jumlah realisasi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 menurun. Capaian tertinggi pada tahun 2016 yaitu 122,1% dan terendah pada tahun 2019 yaitu 101,8%. Indikator pertama ini terdiri dari sub indikator sebagai berikut:

a. *Penerbitan Sertifikat Knock Down (KD)*

Grafik 3.2  
Perbandingan Jumlah Penerbitan Sertifikat *Knock Down* (KD)  
Tahun 2015 - 2019



Dari grafik 3.2 dapat diketahui jumlah penerbitan sertifikat KD dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Jumlah penerbitan sertifikat KD fluktuatif setiap tahunnya. Dalam lima tahun penerbitan sertifikat KD paling banyak pada tahun 2015 yaitu sebanyak 188 sertifikat karena masih belum dibukanya penerbangan langsung dari Surabaya, kemudian menurun di tahun 2016 dan kembali meningkat di tahun 2017, serta kembali menurun di tahun 2018 hingga tahun 2019.

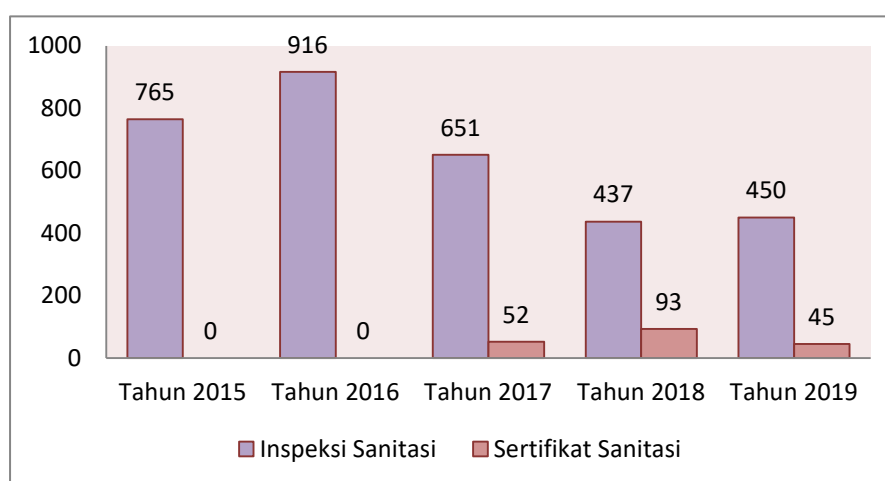
Jumlah sertifikat KD yang diterbitkan selama tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kegiatan penerbitan sertifikat KD selama ini dilaksanakan berdasarkan atas permintaan dari maskapai yang melayani penerbangan internasional dengan tujuan China (Peking dan Beijing) untuk maskapai Garuda Indonesia dan

Citilink. Akan tetapi di pertengahan tahun 2019 Citilink menghentikan penerbangan ke negara tersebut, dan Garuda Indonesia mengurangi penerbangan di Soekarno Hatta karena mulai membuka penerbangan langsung tujuan Peking / Beijing dari Denpasar.

Untuk tahun 2019 penerbitan sertifikat KD belum mencapai target yang ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu sebanyak 120 sertifikat, dikarenakan pada bulan November dan Desember tidak ada sama sekali permintaan KD dari airlines sehingga tidak ada kegiatan penerbitan sertifikat.

*b. Inspeksi Sanitasi dan Penerbitan Sertifikat Sanitasi Pesawat*

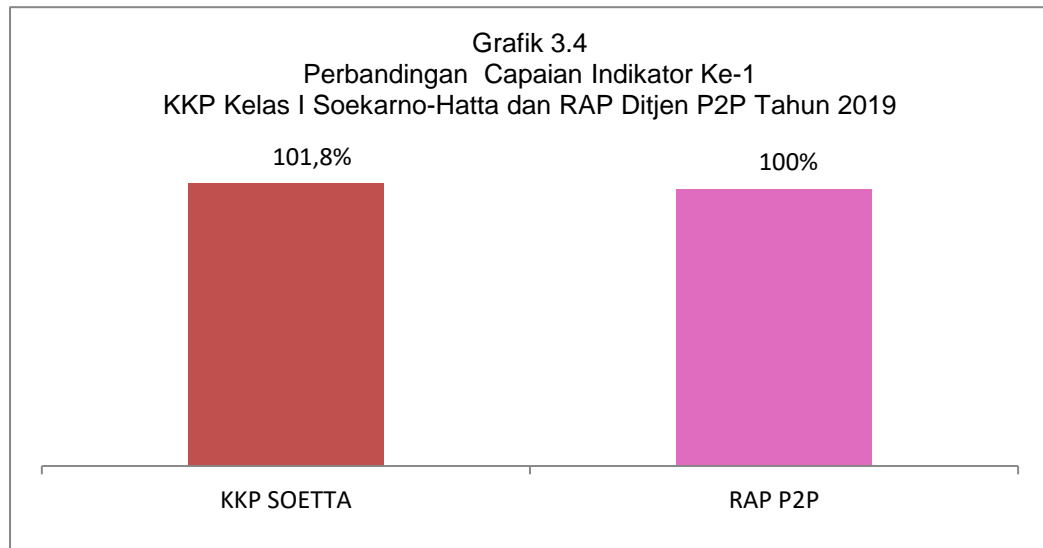
Grafik 3.3  
Perbandingan Jumlah Inspeksi Sanitasi dan  
Penerbitan Sertifikat Sanitasi Pesawat Tahun 2015 - 2019



Dari grafik 3.3 dapat diketahui bahwa :

- Pada tahun 2015 terdapat 765 pesawat memenuhi syarat sanitasi.
- Pada tahun 2016 terdapat 916 pesawat memenuhi syarat sanitasi.
- Pada tahun 2017 terdapat 651 pesawat memenuhi syarat sanitasi dan 52 pesawat memiliki sertifikat sanitasi pesawat.
- Pada tahun 2018 terdapat 437 pesawat memenuhi syarat sanitasi dan 93 pesawat memiliki sertifikat sanitasi pesawat.
- Pada tahun 2019 terdapat 450 pesawat memenuhi syarat sanitasi dan 45 pesawat memiliki sertifikat sanitasi pesawat.

Pada tahun 2019 diberikan sertifikat sanitasi pesawat kepada 1 pesawat Citilink dan 44 pesawat Garuda Indonesia. Pada tahun 2015 sampai tahun 2016 Bidang PRL belum melakukan sertifikasi pesawat dan baru terlaksana pada tahun 2017 hingga 2019. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan tertulis yang menjadi dasar untuk digunakan oleh petugas.



Target indikator persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan tahun 2019 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 100%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2019 yaitu 609 sertifikat atau 101,8% dimana sudah melebihi target RAP Ditjen P2P.

Untuk kegiatan penerbitan sertifikat KD dan sertifikat sanitasi pesawat, tidak dapat dibandingkan dengan KKP Kelas I Surabaya karena tidak ada item kegiatan tersebut di KKP Kelas I Surabaya, yang ada melainkan dokumen PHQC, SSCEC, dan SSCC.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Selain hal tersebut terdapat faktor keberhasilan dalam pemeriksaan sanitasi dan penerbitan sertifikat sanitasi pesawat yang telah mencapai target yaitu adanya deklarasi bersama yang ditanda tangani oleh Otoritas Bandara, PT. Angkasa Pura II, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta dalam mewujudkan pengendalian vektor dan sanitasi di area bandar udara Soekarno Hatta.

Selanjutnya hal tersebut dapat terus terlaksana karena koordinasi yang baik antara KKP Kelas I Soekarno Hatta dengan maskapai penerbangan khususnya Garuda Indonesia dan Citilink. Dalam pelaksanaan teknisnya juga didukung oleh PT. GMF Aeroasia selaku perusahaan pemilik hanggar tempat pesawat-pesawat tersebut dilakukan perawatan serta perbaikan. Selain itu juga karena KKP tetap melakukan pengawasan insidental atau secara acak di luar penerbitan sertifikat.

## 5. Upaya yang Telah Dilakukan

### a. Penerbitan sertifikat Knock Down (KD)

KKP Kelas I Soekarno-Hatta telah memfasilitasi penerbitan sertifikat KD sesuai dengan permintaan airlines, dengan jadwal permintaan penerbitan sertifikat menyesuaikan dari airlines. Pihak airlines melakukan koordinasi setiap bulan dengan bersurat yang ditujukan kepada kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta perihal jadwal penerbitan sertifikat KD selama satu bulan dan akan segera ditindak lanjuti oleh petugas KKP.

Alokasi anggaran telah disediakan kepada petugas KKP yang akan menerbitkan sertifikat KD karena kegiatan ini dilaksanakan diluar jam kerja menyesuaikan dengan permintaan airlines. Pembagian jadwal petugas KKP untuk KD juga telah dilakukan oleh KKP Soekarno Hatta sehingga setiap harinya dapat dilakukan penerbitan sertifikat KD sesuai dengan permintaan airlines.

Untuk tahun 2019 KKP Soekarno Hatta telah bersurat dan berkoordinasi dengan maskapai untuk mengklarifikasi tidak adanya pengajuan penerbitan sertifikat KD di bulan November dan Desember, dan pihak maskapai menyampaikan bahwa pesawat Garuda rute penerbangan Peking/Beijing telah ditutup sampai dengan Bulan Maret 2020 (tentatif).



b. *Pemeriksaan Sanitasi Pesawat dan Penerbitan Sertifikat Sanitasi Pesawat*

Pada tahun 2019 dilakukan dengan penyediaan alokasi anggaran, koordinasi kepada PT. Garuda Indonesia dan PT. GMF Aeroasia untuk teknis pelaksanaan kegiatan sertifikasi di lapangan, penambahan SDM sebanyak dua orang CPNS di bidang PRL, peningkatan SDM petugas KKP dalam rangka pengawasan sanitasi pesawat baik mengikuti diklat surveilans vektor di pesawat dan BPP yang diselenggarakan oleh KKP Kelas I Soekarno Hatta maupun pelatihan sanitasi pesawat yang dilakukan oleh Direktorat Surveilans Karantina Kesehatan Ditjen P2P, dan penguatan tim dalam rangka pemeriksaan sanitasi pesawat insidental atau acak.

**6. Kendala / Masalah yang Dihadapi**

- a. Kendala yang dihadapi di lapangan yaitu berupa ketidakpastian jumlah dan jadwal pengajuan penerbitan sertifikat KD yang tetap setiap bulan karena menyesuaikan permintaan airlines dan maskapai yang baru menyampaikan pengajuan sertifikat KD pada awal bulan berjalan.
- b. Adakalanya pihak airlines melakukan pembatalan jadwal penerbangan sehingga penerbitan sertifikat tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan.
- c. Kendala yang dihadapi untuk inspeksi kesehatan lingkungan pesawat adalah banyaknya jumlah armada pesawat yang harus diperiksa sekitar 459 pesawat dibandingkan dengan jumlah petugas bidang PRL di kantor induk Soekarno Hatta sebanyak 14 orang.
- d. Waktu pelaksanaan pemeriksaan pesawat dalam rangka sertifikasi sangat terbatas yaitu dalam waktu (pesawat yang RON/Remind Over Night) di hanggar.
- e. Koordinasi yang belum maksimal dengan lintas sektor dalam rangka pemeriksaan dan penerbitan sertifikat sanitasi pesawat.

**7. Pemecahan Masalah**

- a. Kegiatan penerbitan sertifikat KD ini telah dilaksanakan komunikasi dan kerja sama yang baik antara KKP Soetta dengan airlines untuk menyampaikan usulan pengajuan penerbitan sertifikat KD lebih awal agar informasi tentang jadwal disinspeksi pesawat lebih cepat.



- b. Pihak airlines segera menginformasikan kepada pihak KKP melalui bersurat sebelumnya jika ada pembatalan penerbitan sertifikat KD.
- c. Advokasi ke Ditjen P2P terkait kewajiban untuk melakukan tindakan Knock Down disinseksi terhadap pesawat lain yang datang dari negara endemis atau terjangkit penyakit potensial KKM.
- d. Memaksimalkan peran KKP lain di daerah untuk melakukan pemeriksaan sanitasi pesawat di bandara masing-masing.
- e. Pengaturan shift kerja petugas bidang PRL.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh maskapai domestik dan internasional di wilayah kerja bandara Soekarno Hatta.

## **8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut dengan pagu anggaran Rp. 36.400.0000,-
- b. Penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan (sertifikat sanitasi pesawat) dengan pagu anggaran Rp. 12.000.000,-

## **9. Analisis Efisiensi Sumber Daya**

- a. Jumlah petugas yang terlatih Knock Down ada 3 orang, dan dibagi menjadi 3 grup sebagaimana jadwal dinas di lapangan, sehingga setiap hari hanya ada 1 petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan penerbitan sertifikat Knock Down.
- b. Kegiatan Knock Down telah ditetapkan output SBK pada Petunjuk Perencanaan dan Anggaran Ditjen P2P Tahun 2019 sebanyak 200 sertifikat. Penetapan target output SBK ini lebih tinggi jika dibandingkan target kinerja KKP Soetta pada tahun 2019 sebanyak 120 sertifikat, mengingat permintaan penerbitan sertifikat KD dari maskapai menurun setiap tahunnya. Sehingga alokasi anggaran yang terserap sebanyak Rp 21.112.000 atau sebesar 58% dari alokasi anggaran sebesar Rp 36.400.000. Sisa alokasi anggaran dialihkan sebesar Rp. 8.012.000,- untuk kegiatan yang sama dalam pengawasan lalu lintas alat angkut dan muatannya berupa pesawat charter dan



medical evakuasi melalui Bandara Halim Perdanakusuma. Sehingga realisasi anggaran untuk kegiatan Knock Down sebesar 80%.

- c. Dengan jumlah petugas bidang PRL sebanyak 14 orang dapat melakukan pemeriksaan sanitasi untuk penerbitan sertifikat sanitasi pesawat sebanyak 45 sertifikat dari 459 armada pesawat di Bandara Soekarno Hatta.
- d. Realisasi anggaran penerbitan sertifikat sanitasi pesawat sebesar Rp. 12.000.000 atau sebesar 100% dari pagu anggaran.
- e. Total realisasi anggaran untuk mencapai target indikator ini yaitu Rp.41.124.000,- atau 85% dari pagu anggaran Rp. 48.400.000,- dengan capaian kinerja 101,8%.



## INDIKATOR 2

### Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

#### 1. Definisi Operasional

Jumlah sinyal SKD KLB (Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa) di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun. Target tahun 2019 yaitu 100%.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya Sinyal Kewaspadaan Dini yang direspon kurang dari 24 jam, dimana pada tahun 2018 sebanyak 9 sinyal dan pada tahun 2019 sebanyak 29 sinyal. Sehingga kejadian KLB dapat dicegah dan faktor risiko penyakit KLB wabah dapat dikendalikan, ditandai dengan tidak adanya kejadian KLB di wilayah Bandara Soekarno Hatta.

#### 2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam

- Jumlah sinyal SKD KLB = 29 sinyal
- Jumlah sinyal SKD KLB yang direspon < 24 jam = 29 sinyal
- Realisasi =  $\frac{29}{29} \times 100\% = 100\%$

- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

#### 3. Capaian Kinerja

Pada tahun 2019 terdapat 29 sinyal SKD KLB yang muncul yaitu sebagai berikut:

a. Kasus Malaria sebanyak 3 kasus

- Bulan Januari 2019 riwayat Malaria yang direspon yaitu melalui kegiatan Screening TNI Kongo. Pasien merupakan pasukan satuan tugas TNI dengan riwayat malaria dengan gejala 2 hari yang lalu mengalami mual, meriang dan demam. Pasien dibawa ke PMPP TNI



Sentul untuk dilakukan perawatan medis oleh TNI dan KKP memberikan notifikasi.

- Bulan Desember 2019 pada saat screening TNI Kongo ditemukan satu orang terdeteksi demam menggigil dengan suhu 39,9°C, dilakukan pemeriksaan malaria oleh petugas KKP dengan menggunakan RDT dan hasilnya positif malaria. Pasien langsung dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto dengan ambulans KKP untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
- Bulan Oktober 2019 dilakukan respon terhadap 1 orang anggota TNI ex Kongo yang dipulangkan dengan pesawat ET 268 ex Addis Ababa transit Bangkok dengan Malaria Tropicana Falciparum. Pasien dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

b. Screening / Pengawasan Kedatangan TNI sebanyak 9 kali

- Pengawasan TNI merupakan salah satu respon sinyal kewaspadaan dini terhadap penumpang yang datang langsung dari negara endemis Yellow Fever dan Ebola. Pada tahun 2019 terdapat 8 kali penerbangan langsung dari negara endemis Yellow Fever yang datang di bandara Soekarno Hatta pada bulan Januari, Februari, April, September, November dan Desember dan telah dilakukan respon berupa kegiatan screening pemeriksaan suhu tubuh dengan hasil pemeriksaan sebanyak 1.504 penumpang dan 82 crew dengan suhu  $\leq 38^{\circ} C$ .
- Terdapat 1 kali penerbangan transit dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines di bulan Februari 2019 dengan jumlah pasukan TNI sebanyak 17 orang dan dilakukan kegiatan screening di terminal 3 Internasional.

c. Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan Penyakit sebanyak 5 kali

Telah dilakukan telah dilakukan respon sinyal kewaspadaan KLB dengan membuat surat edaran Kewaspadaan kepada lintas program dan lintas sektor terkait di Bandara Soekarno Hatta terdiri dari :

- Tanggal 1 April 2019 membuat Nota Dinas Kewaspadaan dan Respon terhadap KLB Polio cVDVP Tipe 1 dari Kepala KKP Kelas I



Soekarno Hatta untuk meningkatkan pengawasan di lapangan dengan nomor surat PR.05.01/1/838/2019

- Tanggal 14 Mei 2019 membuat surat edaran Kewaspadaan Monkey Pox dengan nomor surat SR.03.04/1/2114/2019
  - Tanggal 18 Juni 2019 membuat surat edaran Kewaspadaan KLB Rabies dengan nomor surat SR.01.06/1/2702/2019
  - Tanggal 30 Juli 2019 membuat surat edaran Pemberitahuan Kewaspadaan terhadap penyakit Virus Ebola dengan nomor surat SR.04.01/1/3375/2019
  - Tanggal 24 September 2019 membuat surat edaran Pemberitahuan Kewaspadaan Polio VDVP Tipe 2 dari Filipina dengan nomor surat SR.01.01/1/4233/2019
- f. Rapat Koordinasi Kewaspadaan Penyakit dengan lintas sektor dan lintas program di Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma sebanyak 2 kali
- Tanggal 8 Agustus 2018 Rapat Koordinasi Kewaspadaan Penyakit Virus Ebola di Aula KKP Kelas I Soekarno Hatta
  - Tanggal 25 September 2019 Rapat Koordinasi Kewaspadaan Penyakit Polio VDVP Tipe 2 dari Filipina di Aula KKP Kelas I Soekarno Hatta
- d. Penyelidikan epidemiologi kasus Under Investigation MERS-CoV sebanyak 8 kasus
- Dengan rincian :
- Tanggal 5 Mei 2019 a/n Sapin Dawi Karta dengan pesawat SV 814 ex Jeddah, dan dirujuk ke Rumah Sakit Sulianti Saroso.
  - Tanggal 13 Mei 2019 a/n Suparni dengan pesawat SV 826 ex Riyadh dan berobat sendiri ke RS EKA Hospital BSD.
  - Tanggal 20 Agustus 2019 a/n Wadjito Djojo dengan pesawat SV 818 ex Jeddah, dan berobat sendiri ke RS EKA Hospital BSD dan ditempatkan di ruang isolasi.
  - Tanggal 27 Agustus 2019 a/n Batari Indria dengan pesawat SV 820 ex Jeddah, berobat sendiri ke RS EKA Hospital BSD.



- Tanggal 28 Agustus 2019 a/n Suryadi Abdullah Yusuf dengan pesawat SV 826 ex Jeddah, diberikan notifikasi ke KKP Semarang.
- Tanggal 5 Oktober 2019 a/n Rupini jamaah haji regular asal Kloter 56 JKG, pasien berobat sendiri ke RS EKA Hospital BSD dengan diagnosis Pneumonia, TB Paru.
- Tanggal 25 Oktober a/n Gadis Naindra dengan pesawat GA 983 ex Jeddah, berobat sendiri ke RS EKA Hospital BSD.
- Tanggal 28 Oktober 2019 a/n Sujarwi dengan pesawat EY 314 ex Jeddah (Abu Dhabi) dan berobat sendiri ke RS EKA BSD dengan hasil diagnosis influenza positif musiman.

g. Koordinasi dan Investigasi ke Puskesmas Salemban Jaya sebanyak 1 kali

Koordinasi ini terkait kegiatan jejaring surveilans dengan lintas sektor yaitu Puskesmas yang berada di wilayah perimeter Bandara Soekarno Hatta, mengenai hasil survey nyamuk dewasa yang dilakukan oleh petugas KKP Soekarno Hatta di daerah Rawa Burung yang merupakan wilayah kerja Puskesmas, bahwa ditemukan keberadaan vektor Malaria yaitu nyamuk Anopheles. Mengingat Kabupaten Tangerang sudah eliminasi malaria, dan ternyata ditemukan keberadaan vektor maka perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan oleh Puskesmas, Dinas Kabupaten Tangerang dan KKP. Mengingat tempat perindukan nyamuk belum ditemukan sampai sekarang, KKP akan bekerja sama dengan Puskesmas terkait upaya pengendalian yang paling efektif.

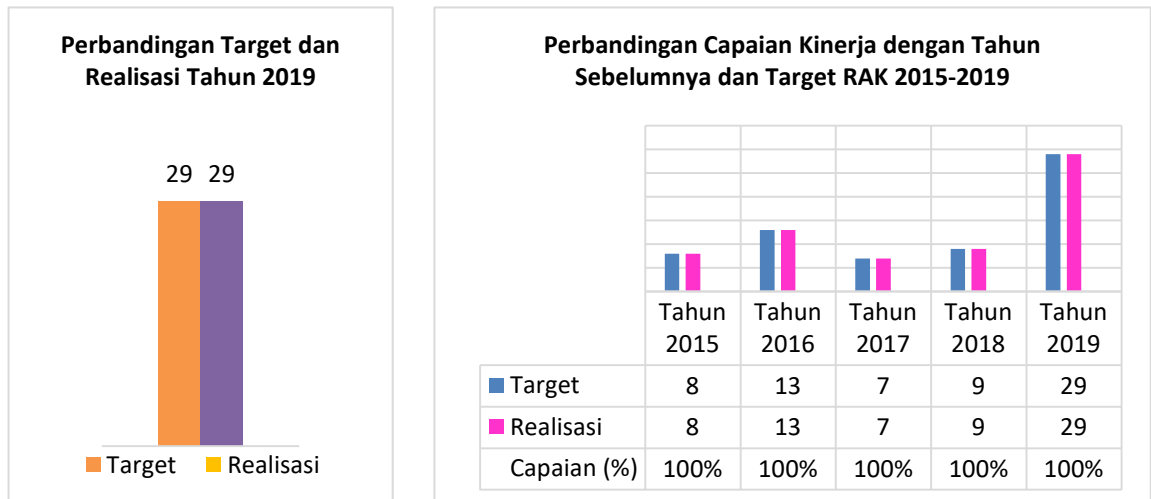
h. Pengambilan dan pemeriksaan sampel POLIO tipe 2 VDVP dari pesawat yang datang dari Filipina sebanyak 2 kali

Kegiatan surveilans polio lingkungan ini terkait peningkatan Kasus Polio Tipe 2 VDVP di Filipina, dimana virus tersebut ditemukan pada pembuangan limbah lingkungan di Filipina. KKP Soekarno Hatta melakukan respon dengan mengambil sampel limbah cair dari tangki limbah kotoran pada pesawat dengan penerbangan langsung dari Filipina yaitu pesawat Philippine Air dan Cebu Pacific. Sebanyak 3 sampel telah diambil, yang pertama pada tanggal 5 Desember 2019 sebanyak 2 sampel dan tanggal 6 Desember 2019 sebanyak 1 sampel. Sampel tersebut dikirim dan diperiksa di Laboratorium Polio Nasional



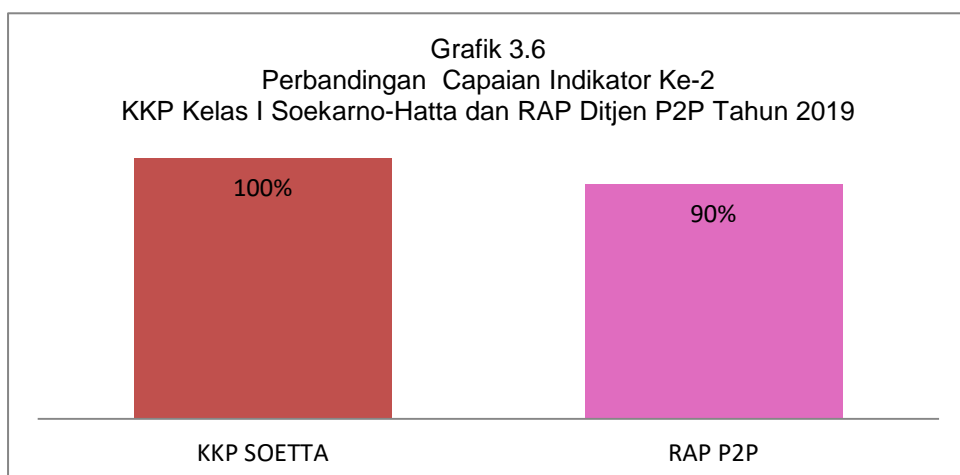
Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Litbangkes. Hasil pemeriksaan sampel keluar pada tanggal 2 Januari 2020 dengan hasil negatif (-).

Grafik 3.5  
Perbandingan Capaian Kinerja  
Indikator Persentase Respon Sinyal SKD KLB dan Bencana di Wilayah KKP



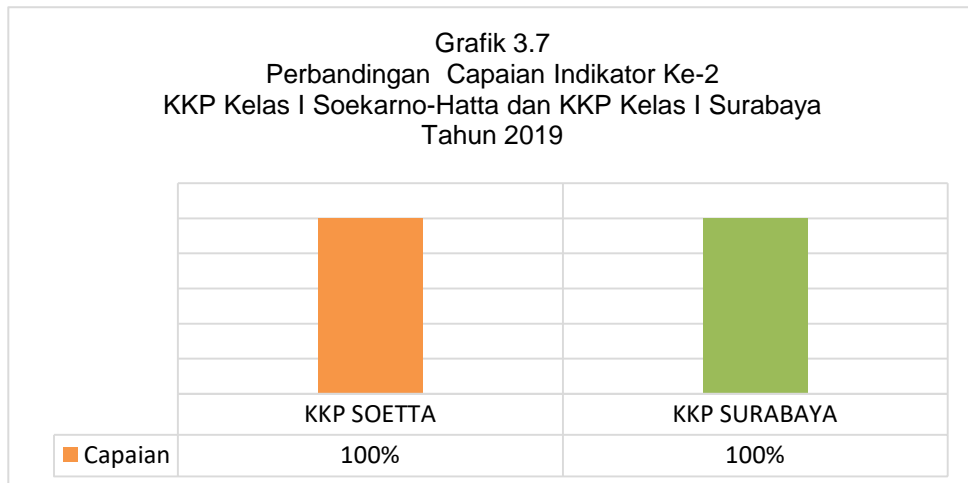
Dari grafik 3.5 diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 29 sinyal SKD KLB yang muncul dan dapat segera direspon kurang dari 24 jam, sehingga capaian pada tahun 2019 sebesar 100%. Realisasi tahun 2019 sudah mencapai target akhir RAK Tahun 2015 -2019.

Dari tahun 2015 hingga tahun 2019 semua respon sinyal SKD, KLB, dan bencana telah direspon kurang dari 24 jam, sehingga capaian setiap tahun sebesar 100%. Dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah sinyal SKD mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016, menurun di 2017 dan kembali naik di tahun 2018 sampai dengan yang tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebanyak 29 kasus yang direspon.





Target indikator persentase sinyal kewaspadaan dini yang tahun 2019 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 90%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2019 yaitu 100% sinyal SKD telah direspon, dimana sudah melebihi target RAP Ditjen P2P.



Capaian indikator persentase sinyal kewaspadaan dini KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2019 sama dengan KKP Kelas I Surabaya yaitu 100% sinyal SKD, KLB, dan bencana telah direspon kurang dari 24 jam. KKP Kelas I Soekarno Hatta sebanyak 29 kasus dan KKP Kelas I Surabaya sebanyak 4 kasus, hal ini dikarenakan jumlah kedatangan pesawat dari Negara Terjangkit lebih banyak melalui Bandara Soekarno Hatta.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2019 dapat dicapai dengan terdeteksinya setiap sinyal KLB oleh petugas di pintu masuk karena sudah adanya sistem informasi dan koordinasi yang baik antara *airlines*, *ground handling*, dan petugas KKP Kelas I Soekarno Hatta baik secara elektronik maupun melalui Gendec dan manifest. Begitu pula dengan koordinasi dan informasi yang telah dilakukan dengan baik di wilayah (Dinas, Puskesmas, Rumah Sakit) dan Pusat (P2P, dan posko KLB) sehingga dapat dilakukan respon dengan cepat dan tepat.

#### 5. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Melakukan pembaharuan data baik internal maupun eksternal, dan melakukan jejaring surveilans dengan lintas sektor dan lintas program baik di internal bandara maupun di wilayah.

- b. Melakukan penyegaran, pelatihan, kepada petugas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dituangkan dalam Tim Gerak Cepat (TGC) Bandara Soekarno Hatta.
- c. Melakukan simulasi kewaspadaan penyakit potensial wabah di pintu masuk negara.
- d. Menyampaikan informasi terbaharui baik di dunia maupun antar wilayah di Indonesia tentang penyakit yang sedang outbreak dan perlu mendapatkan pengawasan khusus, melalui laporan *Weekly Epidemiology Report (WER)*.
- e. KKP Kelas I Soekarno Hatta juga sedang mengembangkan sistem pelaporan elektronik dengan aplikasi di Google yang bisa diakses oleh semua petugas.

## 6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Dalam pengawasan lalu lintas orang ada beberapa kendala yaitu kemungkinan orang yang datang dalam kondisi belum menunjukkan gejala atau telah meminum obat penurun panas sehingga ketika melewati alat pemindai suhu orang tersebut tidak terdeteksi demam, sehingga tidak dilakukan pengamatan lebih lanjut di pintu masuk. Dengan demikian petugas KKP tidak memberikan notifikasi ke wilayah dimana orang tersebut tinggal untuk bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Selain itu adanya perubahan alur kedatangan penumpang di gate terminal, sehingga petugas harus selalu memperbaharui posisi dan jadwal pengawasan di pintu masuk.

## 7. Pemecahan Masalah

Memberikan KIE / promosi kesehatan secara efektif salah satunya dengan memberikan pengumuman di pesawat tentang kewajiban bagi penumpang yang mengalami gejala untuk segera melapor ke KKP. Perlu meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor terutama dengan pihak imigrasi untuk melihat asal penumpang yang datang dari negara endemis atau bukan dan kerja sama dengan pihak AOC, *ground handling*, klinik non KKP, dinas kesehatan wilayah, dalam hal pendeteksian dan pelaporan, serta memasang dan mengaktifkan e-banner di setiap gate kedatangan internasional dan di *chek in counter*. Selain itu akan dilakukan sosialisasi



mengenai sistem pelaporan elektronik di setiap pos kesehatan di terminal baik untuk klinik KKP maupun klinik non KKP.

## 8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya dengan pagu anggaran Rp. 29.500.000,-.
- b. Pengadaan bahan kekarantinaan dengan pagu anggaran Rp. 121.202.000,- .

## 9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat luar negeri dalam sehari sebanyak  $\pm$  250 pesawat dengan 45.000 penumpang dan 2.300 crew. Sedangkan petugas KKP yang berjaga di terminal internasional sebanyak 7 orang dengan tugas yang harus dilakukan yaitu pengawasan keberangkatan penumpang (jamaah umroh), pengawasan kedatangan melalui thermoscan, pengawasan lalu lintas orang sakit, dan siaga penumpang sakit di klinik. Dengan beban kerja tersebut dan jumlah personil di lapangan yang tidak seimbang, dalam pelaksanaannya KKP Kelas I Soekarno-Hatta bekerja sama dengan seluruh airlines melalui AOC, *ground handling*, dan petugas klinik non KKP di terminal (MSA) dan 7 klinik non KKP di area lingkungan bandara baik dari sisi pendeteksian dan penanganan kasus.
- b. Dalam hal pengawasan melalui *Health Declaration/Health Alert Card*, KKP bekerja sama dengan maskapai dan *ground handling* untuk memberikan *Health Declaration* sebelum tiba di Bandara Soetta, sehingga petugas KKP Soetta di kedatangan hanya mengumpulkan *Health Declaration/Health Alert Card* yang dibawa penumpang dan *crew*.
- c. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 150.273.900,- atau 99,7% dari pagu anggaran sebesar Rp. 150.702.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100%.



### INDIKATOR 3

## Jumlah Deteksi Dini Dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit

### 1. Definisi Operasional

Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan dan di klinik layanan lainnya dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode satu tahun.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya deteksi faktor risiko masuk dan keluarnya, dimana baik pada tahun 2018 maupun tahun 2019 tidak ditemukan penyakit menular potensial wabah, baik di klinik KKP maupun di klinik non KKP.

Target pada tahun 2019 yaitu 39.024 dokumen, yang merupakan gabungan dari 3 sub indikator yaitu:

a. *Penerbitan Certificate of Pratique (COP)*

Sertifikat COP yaitu dokumen kesehatan yang diberikan kepada pesawat yang datang dari luar negeri.

b. *Pengawasan Dokumen Kesehatan (Health Part of General Declaration /Gendec) Pesawat Internasional*

Pemeriksaan Gendec merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen kesehatan pesawat yang diisi oleh pursher/pilot, berupa catatan adanya orang sakit selama penerbangan.

c. *Surveilans rutin*

Pengumpulan, pengolahan, analisa dan interpretasi data penyakit di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma dilakukan.

### 2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec, dan hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya dalam satu tahun Jumlah sinyal SKD KLB

- Dokumen COP	= 1.635 dokumen
- Dokumen Gendec	= 44.364 dokumen
- Surveilans rutin	= 12 dokumen
<b>JUMLAH</b>	<b>= 46.011 dokumen</b>



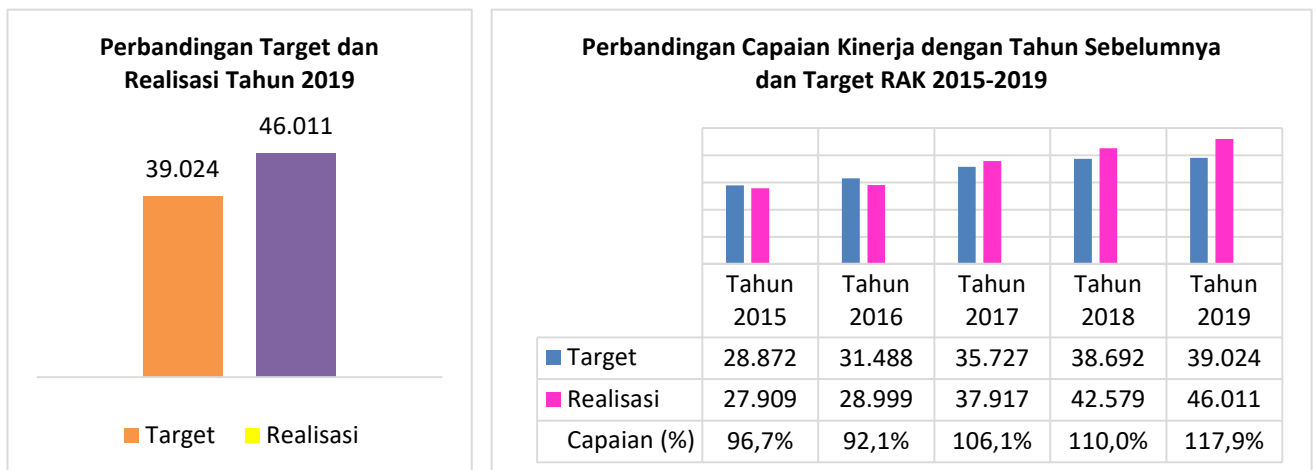
- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{46.011 \text{ dokumen}}{39.024 \text{ dokumen}} \times 100 \% = \mathbf{117,9\%}$$

### 3. Capaian Kinerja

Grafik 3.8  
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Deteksi Dini Dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit



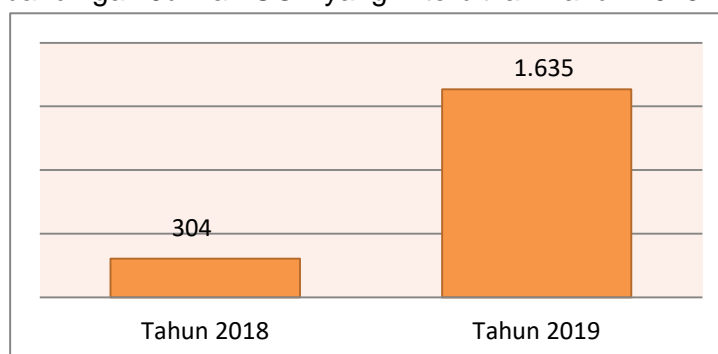
Dari grafik 3.8 diketahui bahwa jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal penyakit pada tahun 2019 sebanyak 46.011 dokumen dan sudah mencapai target dengan capaian sebesar 117,9%. Realisasi tahun 2019 sudah memenuhi target akhir RAK 2015-2019.

Realisasi dari tahun 2015 hingga tahun 2019 meningkat setiap tahun. Walaupun pada tahun 2015 dan tahun 2016 sempat tidak mencapai target. Capaian kinerja tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 117,9% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 92,1%.

Penjelasan dari capaian masing-masing sub indikator sebagai berikut:

a. *Dokumen COP*

Grafik 3.9  
Perbandingan Jumlah COP yang Diterbitkan Tahun 2015 - 2019

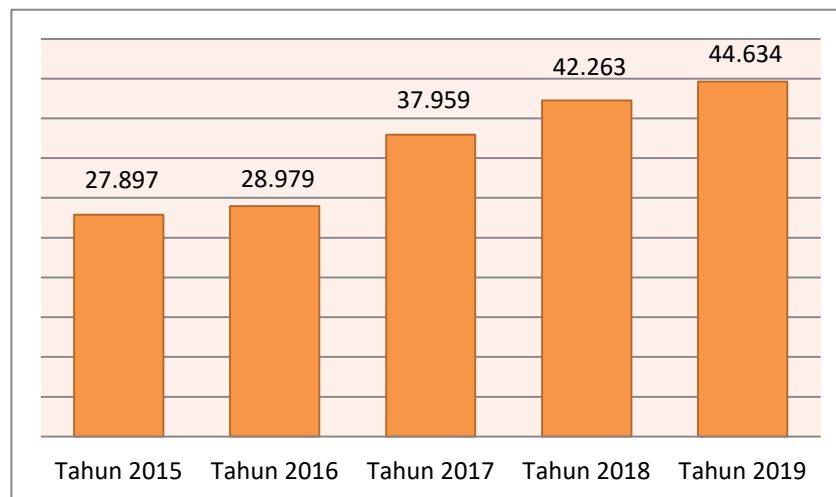


COP merupakan dokumen kekarantinaan dalam bentuk sertifikat, dibagi menjadi dua kriteria yaitu bebas karantina dan karantina terbatas. Sebagai syarat penerbitan COP adalah maskapai menyerahkan Gendec, menyatakan bahwa P3K pesawat lengkap dan sertifikat sanitasi pesawat masih berlaku. Setelah pesawat mendapatkan COP maka pesawat diperbolehkan untuk menurunkan penumpang dan muatannya. Penerbitan COP pada tahun 2019 adalah terdiri dari COP pesawat komersil dan COP pesawat haji.

Penerbitan dokumen COP pada tahun 2019 terdiri dari dokumen COP saat kedatangan pesawat haji sebanyak 161 dokumen, kedatangan pesawat internasional di terminal 2 internasional sebanyak 542 dokumen, dan kedatangan pesawat internasional di terminal 3 internasional sebanyak 932 dokumen, sehingga jumlah total yaitu 1.635 dokumen.

*b. Dokumen Gendec*

Grafik 3.10  
Perbandingan Jumlah Pengawasan Dokumen Gendec Tahun 2015-2019

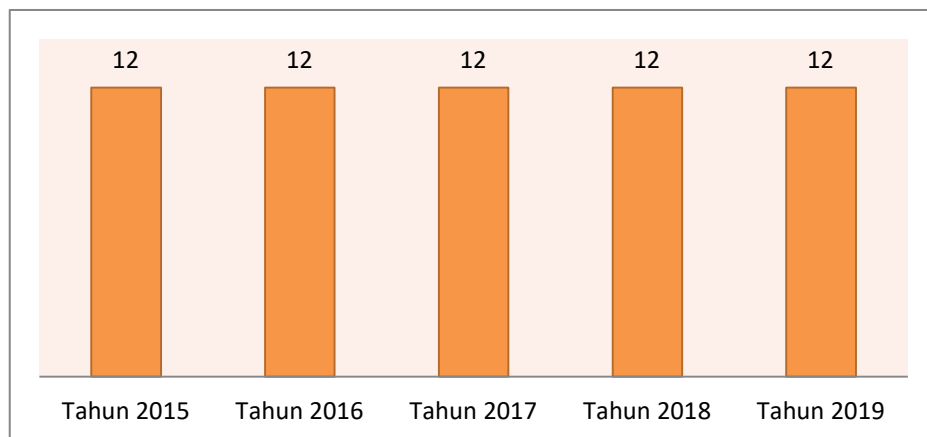


Dari grafik 3.10 diketahui jumlah pengawasan Gendec dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Jumlah pengawasan Gendec mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 yaitu 27.897 dokumen, tahun 2016 sebanyak 28.979 dokumen, tahun 2017 sebanyak 37.959 dokumen, tahun 2018 sebanyak 42.263 dokumen dan pada tahun 2019 sebanyak 44.364 dokumen.

Gendec adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap penerbangan baik yang akan berangkat maupun yang akan mendarat. Gendec merupakan pernyataan dari pilot penerbang terkait hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya terhadap penerbangan, baik terhadap pesawat, orang dan muatannya. Salah satu bagian dari Gendec disebut sebagai HPAGD (*Health Part of Aircraft General Declaration*) yang artinya bahwa pilot menyatakan status kesehatan baik di pesawat maupun terhadap penumpang yang dibawa. Hasil pemeriksaan Gendec pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tidak ada penumpang/crew yang berpenyakit menular potensial wabah.

c. *Surveilans Rutin*

Grafik 3.11  
Perbandingan Jumlah Surveilans Rutin Tahun 2015 - 2019

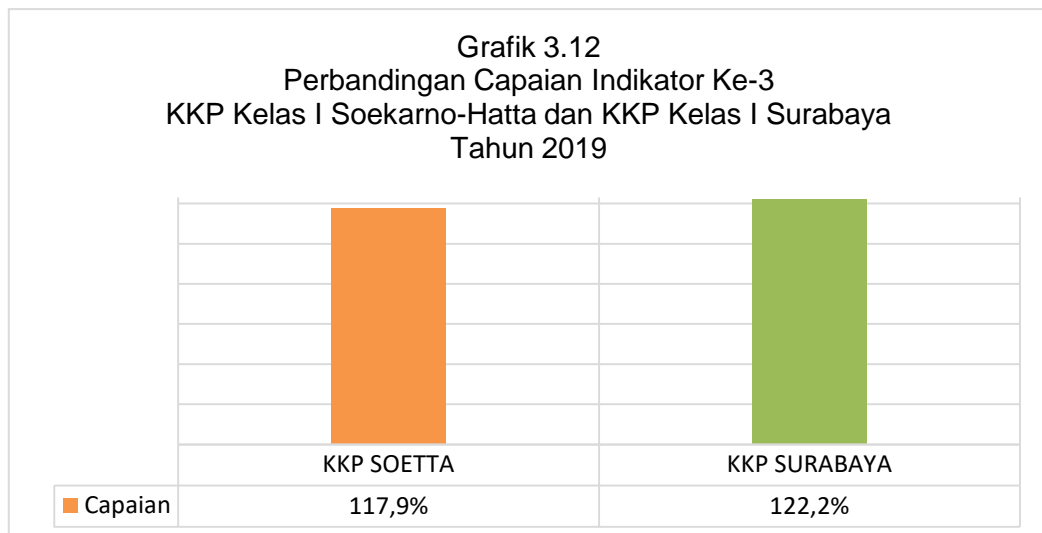


Berdasarkan grafik 3.7 dapat diketahui bahwa jumlah kegiatan surveilans rutin pada setiap tahun, dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu sebanyak 12 kali. Kegiatan surveilans rutin dilaksanakan rutin setiap bulan.

Pengawasan terhadap faktor risiko PHEIC yang dilaksanakan di KKP Kelas I Soekarno-Hatta berupa kegiatan peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) terhadap faktor risiko terjadinya PHEIC, yang dilakukan oleh empat bidang, yaitu Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, Bidang Upaya Kesehatan Lintas Wilayah dan Bidang Tata usaha. Dari data hasil kegiatan dan pengawasan tersebut dikumpulkan untuk diolah

kemudian dilakukan analisis bersama untuk mengetahui ada/tidaknya atau besar/kecilnya faktor risiko yang berpotensi dapat menimbulkan PHEIC di Bandara Soekarno Hatta.

Pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 tidak terdapat indikator tersebut, namun indikator jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dapat mendukung pencapaian target indikator persentase sinyal kewaspadaan dini sebesar 90% pada tahun 2019.



Dari grafik 3.12 dapat diketahui bahwa capaian KKP Kelas I Soekarno Hatta pada indikator jumlah dokumen deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit lebih rendah dibandingkan dengan KKP Kelas I Surabaya.

Realisasi KKP Kelas I Soekarno Hatta sebanyak 46.011 dokumen dari target 39.024 dokumen sedangkan KKP Kelas I Surabaya sebanyak 8.628 doumen dari target 7.060 dokumen.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan**

Target tahun 2019 dapat dicapai karena jejaring kinerja petugas KKP Soetta dengan lintas sektor di Bandara semakin baik. Sistem informasi dalam pelaporan Gendec semakin baik, laporan rutin melalui media elektronik semakin cepat dan petugas KKP Soetta di lapangan semakin terlatih karena telah dilakukan pelatihan kekarantinaan bagi petugas.



## 5. Upaya yang Telah Dilakukan

Sosialisasi tugas pokok dan fungsi KKP kepada lintas sektor dan lintas program terkait dalam upaya meningkatkan kerja sama dan memperkuat jejaring, dan simulasi kecil / Table Top yang rutin dilaksanakan satu tahun sekali untuk memberikan pemahaman kepada lintas sektor terkait peran serta lintas sektor dan sistem pengawasan (SOP) yang dilaksanakan di kedatangan maupun di keberangkatan pada saat terjadi kasus KKMMMD baik di Bandara Soekarno Hatta maupun di Bandara Halim Perdanakusuma.

## 6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Ketepatan dan kelengkapan dokumen yang diberikan oleh maskapai dan klinik non KKP kurang cepat/masih lambat, terkait birokrasi di instansi tersebut yang harus dilalui sebelum memberikan laporan secara resmi ke KKP Soetta.

## 7. Pemecahan Masalah

Sosialisasi terhadap tugas pokok dan fungsi serta jejaring yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, pembentukan forum diskusi melalui telepon / elektronik dengan seluruh petugas lapangan yang ada baik KKP, *ground handling*, maskapai, dan klinik non KKP sehingga informasi sudah didapatkan sebelum informasi resmi dikeluarkan, dan koordinasi di lapangan dapat dilakukan lebih cepat.

## 5. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Koordinasi program karantina kesehatan dengan pagu anggaran Rp. 116.520.000,-
- b. Bimtek kekarantinaan ke wilker dengan pagu anggaran Rp. 7.020.000,-
- c. Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA ekspor dan impor dengan pagu anggaran Rp. 1.350.000,-
- d. Layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan COP dengan pagu anggaran Rp. 132.000.000,-



- e. Layanan kekarantinaan kesehatan di Bandar Udara dengan pagu anggaran Rp.1.842.885.000,-

## **6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

- a. Memaksimalkan sistem pelaporan dan permohonan dokumen secara online melalui Whatsapp, email, aplikasi, dan lain-lain.
- b. Penggunaan anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.907.349.304,- atau 99,6% dari pagu dengan capaian 110%, sedangkan pada tahun 2019 realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 2.140.981.200 atau 99,7% dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.146.800.000,- dengan capaian kinerja sebesar 117,9%.



## INDIKATOR 4

### Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus

#### 1. Definisi Operasional

Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusus tertentu seperti lebaran, natal, tahun baru dan lain - lain dalam periode satu tahun. Target pada tahun 2019 yaitu 20 layanan.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah layanan KKP pada situasi khusus seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru dan lain-lain, dimana pada tahun 2018 layanan kesehatan situasi khusus sebanyak 13 layanan dengan jumlah kunjungan 3.300 orang dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 29 layanan dengan jumlah kunjungan 3.627 orang, sehingga pelaku perjalanan selalu dalam kondisi sehat.

#### 2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Akumulasi jumlah layanan di pokso kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru, dan lainnya dalam satu tahun yaitu:

Tabel 3.2  
Realisasi Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus Tahun 2019

No	Event	Waktu	Lokasi	Jumlah Layanan	Jumlah Kunjungan (orang)
1.	Posko Mudik Lebaran	Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Posko Term A</li><li>• Posko Term B</li><li>• Posko Term C</li><li>• Posko Terpadu</li><li>• Posko Term D</li><li>• Posko Term E</li><li>• Pokso Term F</li><li>• Posko Bersama MSA Term 2</li><li>• Posko Term 3 Internasional</li><li>• Posko Term 3 Domestik</li><li>• Posko Bersama MSA Term 3</li><li>• Kantor Induk</li><li>• Wilker Halim Perdanakusuma Jakarta</li></ul>	13	991

2.	Embarkasi Haji	Juli 2019	Bandara Soetta & Asrama Haji Jakarta	2	633
3.	Debarkasi Haji	Agustus 2019	Bandara Soetta & Asrama Haji Jakarta	2	376
4.	Nataru	Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posko Term A</li> <li>• Posko Term B</li> <li>• Posko Terpadu</li> <li>• Posko Term D</li> <li>• Posko Term E</li> <li>• Pokso Term F</li> <li>• Posko Bersama MSA Term 2</li> <li>• Posko Term 3 Internasional</li> <li>• Posko Term 3 Domestik</li> <li>• Posko Bersama MSA Term 3</li> <li>• Kantor Induk</li> <li>• Wilker Halim Perdanakusuma Jakarta</li> </ul>	12	1.627
<b>Total</b>				<b>29</b>	<b>3.627</b>

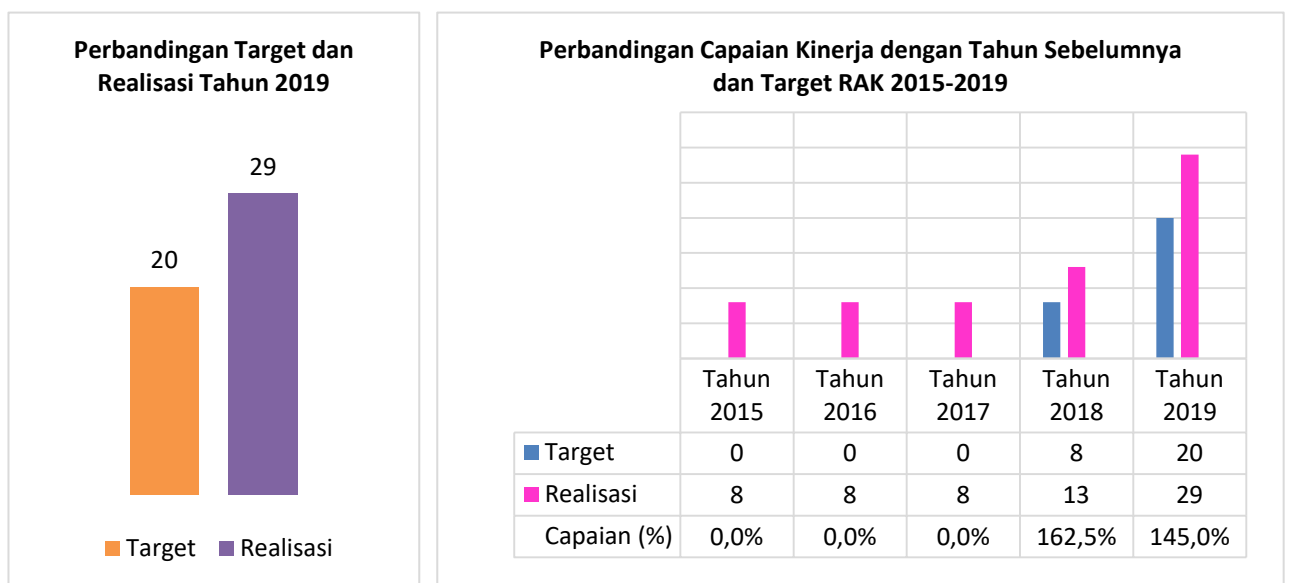
• **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{29 \text{ layanan}}{20 \text{ layanan}} \times 100\% = \mathbf{145\%}$$

**3. Capaian Kinerja**

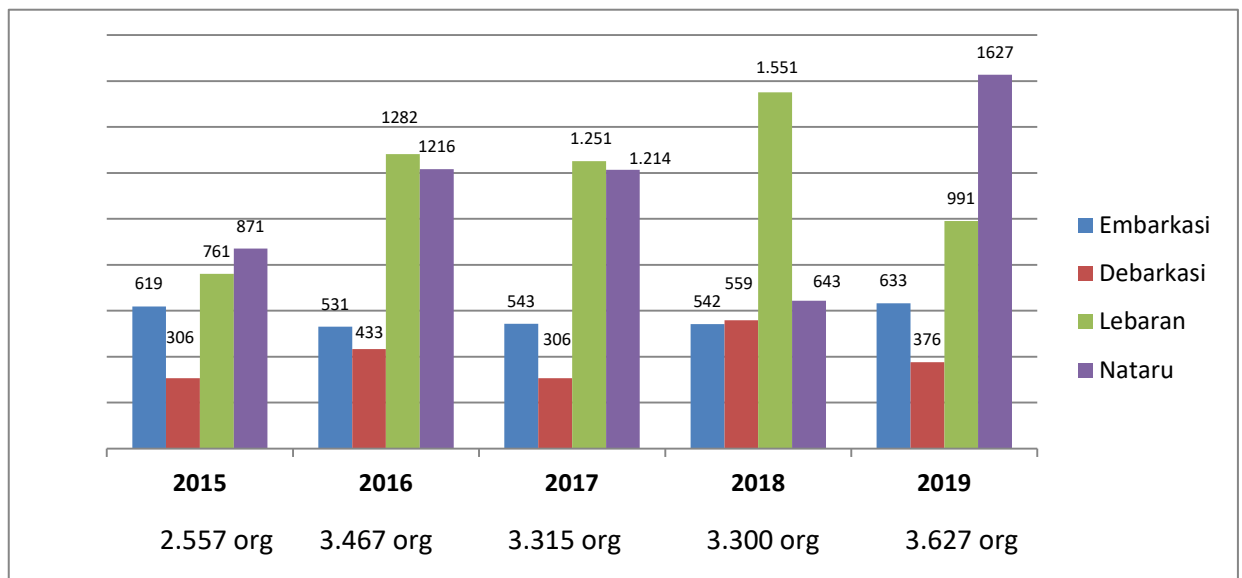
Grafik 3.13  
Perbandingan Capaian Kinerja  
Indikator Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus



Dari grafik 3.13 diketahui bahwa realisasi jumlah layanan kesehatan pada situasi khusus tahun 2019 sebanyak 29 layanan dan sudah mencapai target dengan capaian 145%. Realisasi tahun 2019 lebih besar dari tahun 2015 hingga tahun 2018 dan telah melebihi target akhir RAK 2015-2019, namun capaian tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018.

Pada tahun 2015 sampai tahun 2017 tidak ditetapkan target karena pada tahun tersebut definisi operasional dari target yang ditetapkan yaitu jumlah orang yang terlayani bukan jumlah layanan.

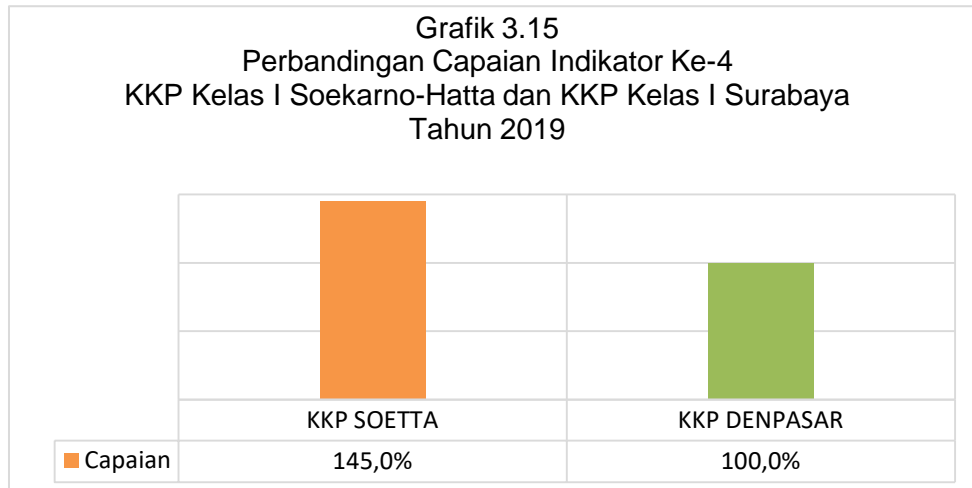
Grafik 3.14  
Perbandingan Jumlah Kunjungan Pos Kesehatan Pada Situasi Khusus Tahun 2015 - 2019



Dari grafik 3.14 diketahui bahwa jumlah kunjungan pos kesehatan pada situasi khusus terbanyak yaitu pada tahun 2019 yaitu 3.627 orang dan paling sedikit pada tahun 2015 yaitu 2.557 orang.

Pada tahun 2016 terdapat peningkatan dari tahun 2015, namun menurun kembali pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2016 sampai tahun 2018 kunjungan tertinggi yaitu pada saat lebaran, sedangkan pada tahun 2019 kunjungan tertinggi pada saat Nataru. Adapun jenis pelayanan yang diberikan pada saat situasi khusus yaitu pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, pengobatan, penerbitan dokumen kesehatan laik terbang dan tidak laik terbang, penanganan gawat darurat medis dan layanan rujukan.

Pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 tidak terdapat indikator tersebut, namun indikator jumlah pelayanan pada situasi khusus dapat mendukung pencapaian target indikator persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon sebesar 90% pada tahun 2019.



Dari grafik 3.15 diketahui bahwa capaian jumlah layanan situasi khusus KKP Kelas I Soekarno Hatta lebih tinggi dibandingkan dengan KKP Kelas I Surabaya. Realisasi KKP Kelas I Soekarno Hatta sebanyak 29 dari target 20 layanan, sedangkan KKP Kelas I Surabaya realisasinya sebanyak 17 dari target 17 layanan.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2019 dapat dicapai dikarenakan terdapat alokasi anggaran untuk pelayanan situasi khusus. Pelayanan situasi khusus arus mudik bisa terlaksana dengan memberdayakan SDM yang ada dengan sistem lembur/overtime selain itu juga untuk posko terpadu Arus Mudik KKP Kelas I Soekarno Hatta melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

#### 5. Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan pada pelayanan kesehatan dalam situasi khusus adalah melakukan edukasi dan promosi kesehatan kepada calon penumpang yang akan melakukan perjalanan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri, melakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan dan pengobatan dan mengeluarkan dokumen kesehatan bagi pelaku perjalanan yang membutuhkan.

## **6. Kendala / Masalah yang Dihadapi**

Kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan pada situasi khusus di tahun 2019 yaitu lokasi pos pelayanan kesehatan khususnya pada saat situasi Lebaran, Natal dan Tahun Baru yang kurang strategis, sehingga agak sulit dijangkau oleh pengguna jasa bandara.

## **7. Pemecahan Masalah**

Untuk mengatasi masalah tersebut diatas, dilakukan koordinasi dengan lintas sektoral dalam hal penempatan lokasi pos pelayanan kesehatan pada situasi khusus sehingga pos pelayanan kesehatan bisa ditempatkan dilokasi yang mudah dijangkau atau pengguna jasa bandara, serta melibatkan pos pelayanan kesehatan rutin untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan pada situasi khusus.

## **8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Pengawasan arus mudik pada situasi khusus dengan pagu anggaran Rp. 227.920.000,-
- b. Pelayanan kesehatan dengan pagu anggaran Rp. 1.911.980.000,-
- c. Layanan kesehatan rujukan dengan pagu anggaran Rp. 31.500.000,-
- d. Koordinasi pelayanan kesehatan arus mudik dengan pagu anggaran Rp. 15.900.000,-
- e. Koordinasi dan konsultasi teknis pelayanan kesehatan dengan pagu anggaran Rp. 32.748.000,-
- f. Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan embarkasi dan debarkasi haji dengan pagu anggaran Rp. 78.800.000,-
- g. Bimtek pelayanan kesehatan dengan pagu anggaran Rp. 7.020.000,-

## **9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

- a. Optimalisasi tenaga dokter, perawat dan driver guna menunjang kegiatan pelayanan kesehatan pada periode situasi khusus. Tenaga dokter, perawat dan driver yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah petugas yang libur, sehingga tidak mengganggu pos pelayanan kesehatan rutin
- b. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 2.283.430.980,- atau 99% dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.305.868.000,- dengan capaian kinerja sebesar 145%.



## INDIKATOR 5

### Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Berpotensi Wabah

#### 1. Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontingensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah. Target pada tahun 2019 yaitu 1 dokumen.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya kesiapsiagaan bandara di wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno Hatta dalam menanggulangi kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah melalui komitmen lintas sektor yang tertuang dalam surat kesepakatan dan dokumen rencana kontingensi (renkon) dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC). Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rewiu dokumen renkon di Bandara Soekarno Hatta dan pada tahun 2019 dilaksanakan rewiu dokumen renkon di Bandara Halim Perdanakusuma.

#### 2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{1 \text{ bandara}}{1 \text{ bandara}} \times 100 \% = \mathbf{100 \%}$$

#### 3. Capaian Kinerja

Pada tahun 2019 telah terlaksana Review dokumen rencana kontijensi di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 27 Juni 2019 di Ruang Rapat Aula KKP Kelas I Soekarno Hatta dengan 55 orang peserta dari lintas sektor terkait di bandara dan lintas sektor lainnya di lingkungan sekitar bandara

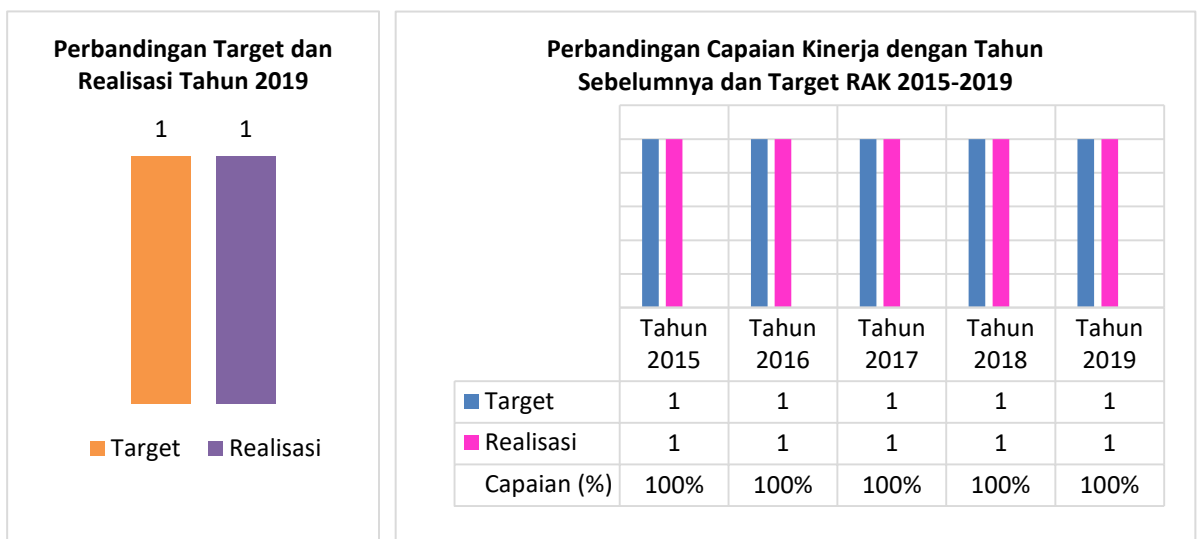




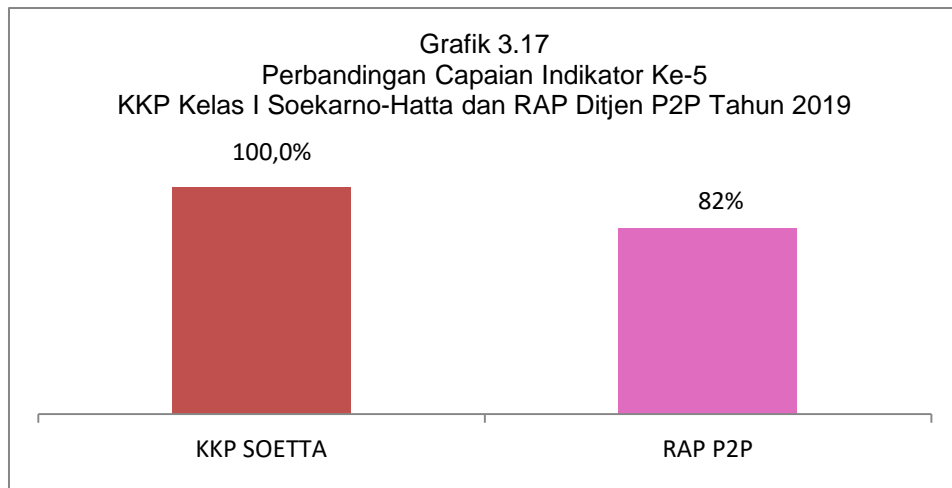
yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas . Hasil kegiatan review dokumen rencana kontingensi di Bandara Soekarno Hatta yaitu :

- Memasukkan paradigma baru tentang ancaman kesehatan masyarakat secara global telah berubah, yaitu bukan hanya penyakit karantina seperti Pes, Kolera dan Yellow Fever tetapi ancaman yang lebih luas yaitu yang terkait dengan nuklir, biologi dan kimia.
- Penyesuaian terhadap sumber daya terutama sumber daya alat yang disesuaikan dengan ancaman yang ada.
- Memasukkan beberapa lintas sektor yang berada di luar bandara terkait dengan agen-agen ancaman.
- Pemahaman mengenai pentingnya Rencana Kontingensi yang kemudian dapat dilaksanakan jika sewaktu waktu terjadi kegawatdaruratan kesehatan masyarakat.
- Diperlukan simulasi / uji coba pelatihan teknis dengan seluruh instansi sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing
- Jika perlu dibuat sosialisasi SOP terhadap penanganan penyakit yang lebih spesifik tertentu

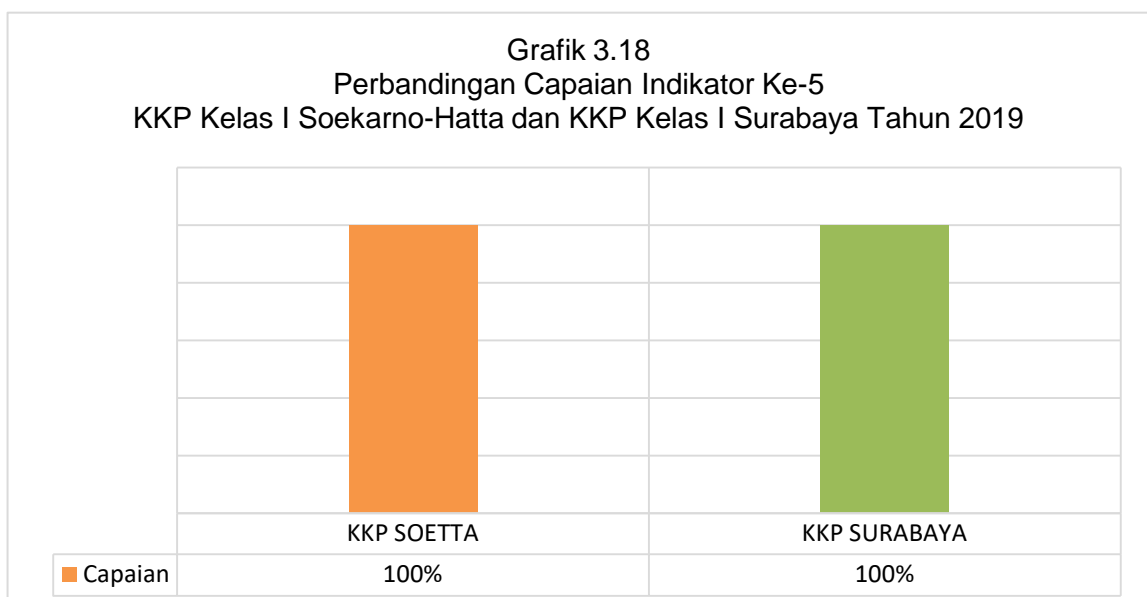
**Grafik 3.16**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**  
**Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandar Udara/PLBD yang Memiliki Kebijakan Kesiapsiagaan Berupa Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi Wabah**



Dari grafik 3.16 diketahui bahwa pada tahun 2019 jumlah bandara yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan sudah mencapai target dengan capaian 100% dan sudah mencapai target akhir RAK Tahun 2015 – 2019. Realisasi dan capaian tahun 2019 sama dengan tahun 2015, 2016, dan 2017. Dimana setiap tahunnya dilakukan review dokumen rencana kontijensi secara bergilir antara Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.



Target indikator persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah tahun 2019 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 82%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2019 yaitu 1 bandara atau 100%, sehingga telah menyumbang pencapaian target RAP Ditjen P2P.



Pada tahun 2019 capaian jumlah Pelabuhan/Bandar Udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi KKP Kelas I Soekarno Hatta sama dengan KKP Kelas I Surabaya yaitu 100%, dengan realisasi KKP Kelas I Soekarno Hatta sebanyak 1 bandara dan KKP Kelas I Surabaya sebanyak 3 pelabuhan.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan**

Target tahun 2019 dapat dicapai karena salah satu persyaratan minimal untuk kemampuan utama bagi *point of entry* sebagaimana dimuat dalam IHR 2005 adalah harus memiliki rencana kontingensi respon menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan adanya kebutuhan terhadap penyesuaian isu-isu terbaru terkait dengan ancaman yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

#### **5. Upaya yang Telah Dilakukan**

Beberapa upaya telah dilakukan antara lain :

- a. Dalam pelaksanaan tugas cegah tangkal di pintu masuk negara senantiasa mengacu kepada SOP yang tertuang dalam dokumen rencana kontingensi terdahulu.
- b. Memetakan beberapa masalah dan perubahan situasi dan kondisi di lapangan sehingga rewi rencana kontingensi dilaksanakan dalam rangka penyesuaian.
- c. Menerima saran dari berbagai pihak yang terkait saat terjadi kasus sebagai bahan untuk melakukan rewi rencana kontingensi.
- d. Membuat surat pernyataan kesediaan mendukung dan melaksanakan dokumen Rencana Kontingensi yang disepakati dan ditanda tangani oleh masing-masing kepala instansi terkait.

#### **6. Kendala / Masalah yang Dihadapi**

- a. Masih ada anggapan bahwa masalah kesehatan hanya dilaksanakan oleh KKP.
- b. Informasi yang diterima di tingkat pimpinan di masing-masing lintas sektor masih belum tersosialisasi sampai ke tingkat bawah.



- c. Perkembangan penyakit yang selalu berubah ubah setiap waktu, memerlukan update dokumen Rencana Kontingensi menyesuaikan dengan situasi terkini

## **7. Pemecahan Masalah**

- a. Memperbanyak pertemuan dengan lintas sektor dalam rangka sosialisasi rencana kontingensi
- b. Peningkatan kapasitas petugas di lapangan dan kerja sama lintas sektor dalam bentuk simulasi dalam hal pelaksanaan kekarantinaan yang ada di bandara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018
- c. Meminta dukungan penuh dari lintas sektor untuk dapat menyampaikan segala hal yang terkait dengan rencana kontingensi terutama jika terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat agar sampai ke petugas di lapangan
- d. Upgrade peralatan-peralatan penunjang penanganan penyakit potensial KKM di bandara

## **8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Review dokumen rencana kontingensi di bandara Halim Perdanakusuma dengan pagu anggaran Rp. 18.115.000,-
- b. Table top KKM dengan pagu anggaran Rp. 8.650.000,-

## **9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

- a. Optimalisasi petugas yang ada di lapangan dan bekerja sama dengan bidang lainnya serta memanfaatkan jejaring kerja dengan lintas sektor dalam rangka deteksi dan respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi inti utama dari rencana kontijensi.
- b. Optimalisasi peralatan baik yang dimiliki oleh KKP maupun sumber daya lain yang dimiliki oleh lintas sektor dapat mendukung rencana kontingensi yang ada.
- c. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 26.765.000,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 26.765.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100%.



## INDIKATOR 6

### Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

#### 1. Definisi Operasional

Jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan permintaan/permohonan yang diterima dalam periode satu tahun. Pelayanan penerbitan dokumen kesehatan di KKP Kelas I Soekarno-Hatta terdiri dari penerbitan surat keterangan sakit, surat keterangan sehat, surat laik terbang, surat tidak laik terbang, surat izin angkut jenazah, surat keterangan kematian, surat visum. Target pada tahun 2019 yaitu 60.000 sertifikat.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap penerbitan sertifikat/surat izin layanan kesehatan sehingga pelaku perjalanan terhindar dari gangguan kesehatan selama penerbangan dan di tempat tujuan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 156.351 sertifikat/surat izin diterbitkan, dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 180.367 sertifikat/surat izin.

#### 2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun

Penerbitan ICV oleh KKP	=	79.536 sertifikat
Penerbitan ICV oleh Klinik/RS	=	85.490 sertifikat
Surat kelaikan terbang	=	10.335 surat
Surat Izin Angkut Orang Sakit	=	29 surat
Surat sehat	=	76 surat
Surat sakit	=	47 surat
Surat Keterangan Kematian	=	13 surat
Surat Keterangan Sakit	=	13 surat
Surat Izin Angkut Jenazah	=	4.221 surat
Sertifikat Sehat	=	620 sertifikat
<b>JUMLAH</b>	<b>=</b>	<b>180.367 sertifikat/surat</b>

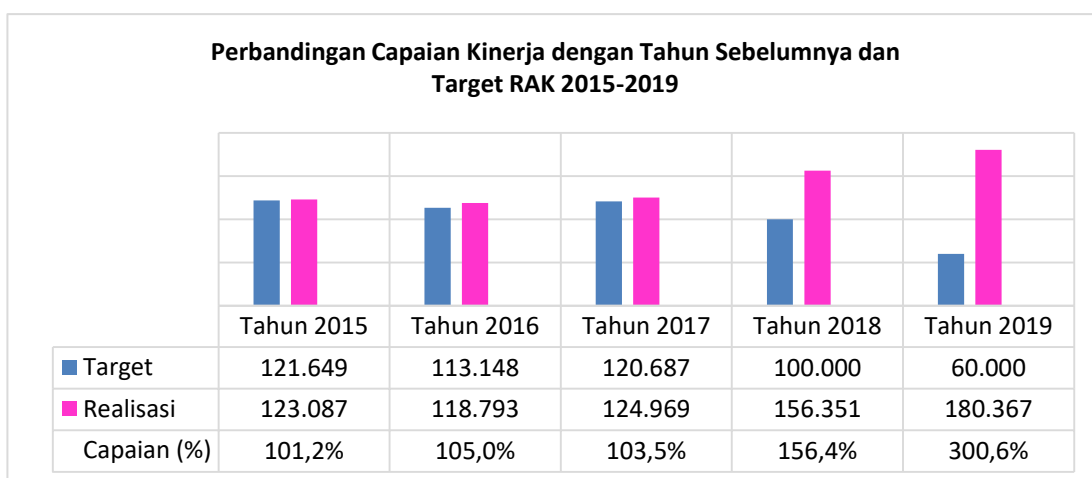
- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{180.367 \text{ sertifikat}}{60.000 \text{ sertifikat}} \times 100\% = 300,6\%$$

### 3. Capaian Kinerja

Grafik 3.19  
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Sertifikat/Surat Izin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah yang Diterbitkan



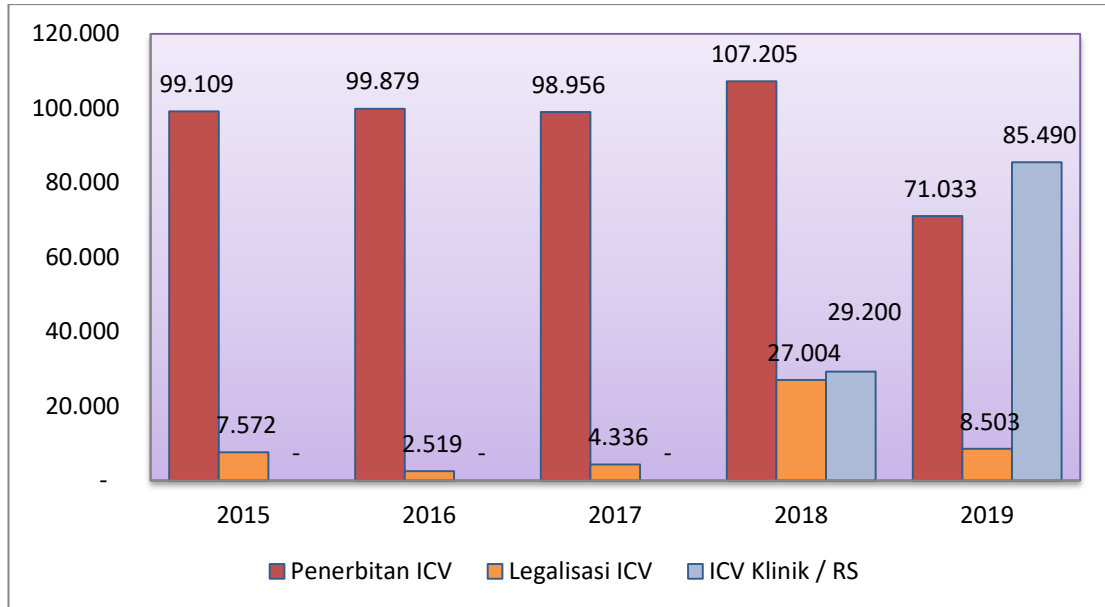
Dari grafik 3.19 diketahui bahwa jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan yang diterbitkan pada tahun 2019 sebanyak 180.367 sertifikat dan sudah mencapai target dengan capaian 300,6%.

Realisasi dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sudah mencapai target dengan jumlah yang cenderung meningkat. Pada tahun 2016 realisasi menurun dari tahun 2015 dan meningkat kembali pada tahun 2017 hingga

tahun 2019. Selain itu realisasi tahun 2019 sudah memenuhi target akhir RAK 2015-2019.

Capaian kinerja indikator ini dari tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung meningkat, hanya menurun pada tahun 2017. Capaian kinerja tertinggi pada tahun 2019 yaitu 300,6%.

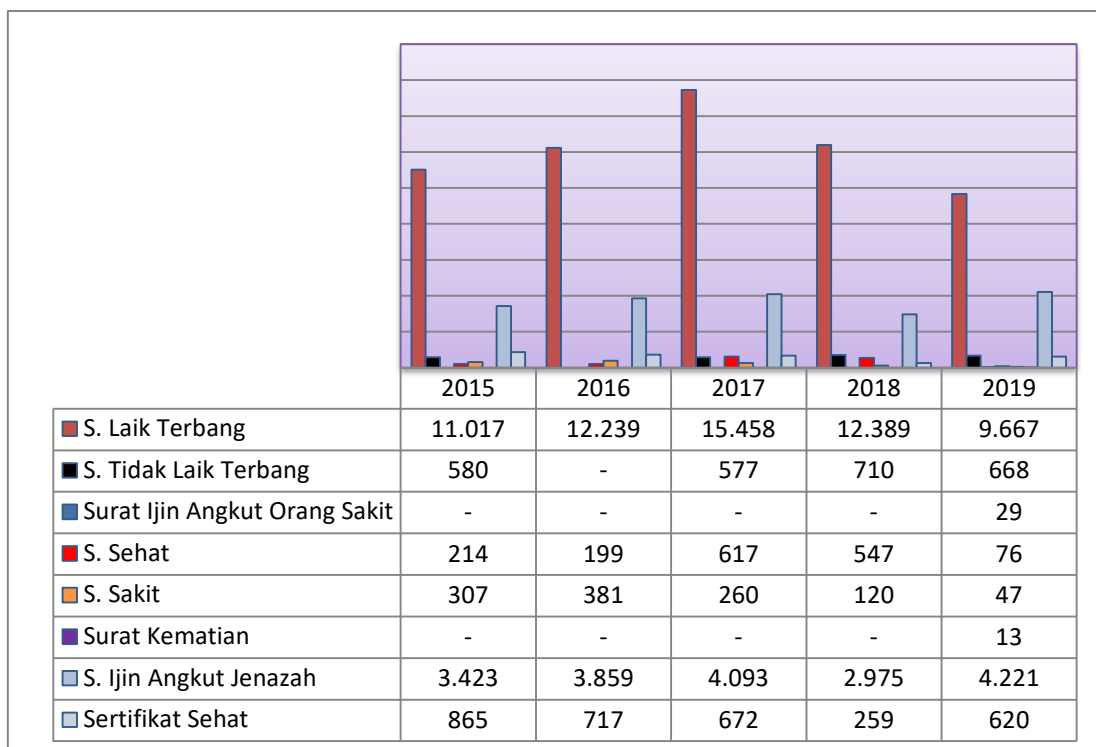
Grafik 3.20  
Perbandingan Jumlah Penerbitan ICV dan Legalisasi ICV Tahun 2015 – 2019



Dari grafik 3.20 dapat diketahui jumlah penerbitan ICV pada tahun 2015 sebanyak 99.109 sertifikat, tahun 2016 sebanyak 99.879 sertifikat, lalu menurun pada tahun 2017 dengan jumlah 98.956 sertifikat, meningkat kembali pada tahun 2018 sebanyak 107.205 sertifikat dan menurun pada tahun 2019 sebanyak 71.033 sertifikat, hal ini disebabkan banyaknya rumah sakit atau klinik yang mendapatkan izin untuk pelayanan vaksinasi serta penerbitan ICV, sehingga pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV terdistribusi tidak hanya dilakukan oleh KKP.

Legalisasi ICV dari tahun 2015 sampai tahun 2019 jumlahnya fluktuatif, pengajuan paling rendah pada tahun 2016 yaitu sebanyak 2.519 sertifikat dan pengajuan paling tinggi pada tahun 2018 sebanyak 27.004 sertifikat.

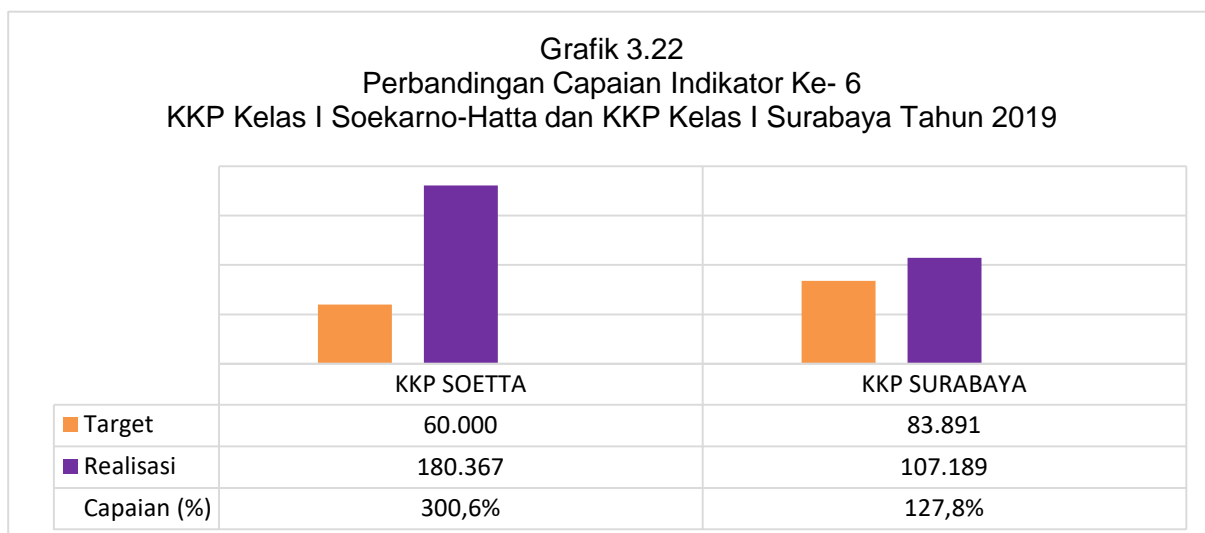
Grafik 3.21  
Perbandingan Jumlah Surat Ijin Layanan Kesehatan Tahun 2015- 2019



Dari grafik 3.21 dapat diketahui jumlah pengajuan sertifikat/surat ijin yang paling banyak dari tahun 2015 sampai 2019 yaitu sertifikat laik terbang dan yang kedua yaitu surat izin angkut jenazah.

Pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 tidak terdapat indikator tersebut, namun indikator jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan yang diterbitkan dapat mendukung pencapaian target indikator persentase sinyal kewaspadaan dini yang tahun 2019 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 90%.

Grafik 3.22  
Perbandingan Capaian Indikator Ke- 6  
KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan KKP Kelas I Surabaya Tahun 2019





Dari grafik 3.22 diketahui bahwa capaian jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan yang diterbitkan KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada tahun 2019 lebih besar dari KKP Kelas I Surabaya, dikarenakan banyaknya pengajuan sertifikat ICV masyarakat umum dan pengajuan buku ICV dari klinik swasta di KKP Soetta. Capaian KKP Kelas I Soekarno Hatta yaitu 300,6% dengan realisasi 180.367 dari target 60.000 dokumen, sedangkan KKP Kelas I Surabaya sebanyak 127,8% dengan realisasi 107.189 dari target 83.891 dokumen.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan**

Target tahun 2019 dapat dicapai karena adanya Permenkes No.23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional dan Perdirjen P2P No. SR.03.04/II/2745/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan kepada Klinik dan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional, sehingga mendorong peningkatan jumlah pelayanan vaksinasi kepada masyarakat oleh klinik/rumah sakit. Dimana klinik/rumah sakit yang mendapatkan izin penerbitan ICV dari KKP Soetta, pengawasannya pun merupakan tanggung jawab KKP Soetta.

#### **5. Upaya yang Telah Dilakukan**

Upaya yang telah dilakukan untuk bisa mencapai target dalam pelayanan penerbitan dokumen kesehatan yaitu perbaikan alur pelayanan terutama dalam penerbitan *Intenational Certificate of Vaccinaton* (ICV), perubahan mekanisme penerbitan dokumen kesehatan dari manual menjadi online melalui aplikasi Simkespel serta melakukan visitasi dan verifikasi terhadap klinik/ rumah sakit yang mengajukan permohonan pelayanan vaksinasi dan menerbitkan sertifikat bagi klinik/ rumah sakit yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan pelayanan vaksinasi.

#### **6. Kendala / Masalah yang Dihadapi**

Kendala administrasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada klinik/RS.



## **7. Pemecahan Masalah**

Menyusun rencana jadwal pembinaan dan pengawasan ke klinik/RS dalam satu tahun Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

## **8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Sistem pelaporan dan penerbitan dokumen melalui Simkespel dengan pagu anggaran Rp. 44.730.000,-
- b. Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan dengan pagu anggaran Rp. 16.957.000,-
- c. Pengadaan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,-

## **9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

- a. Pelayanan penerbitan dokumen kesehatan melibatkan tenaga dokter, perawat dan tenaga administrasi yang terlatih.
- b. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp.259.538.375,- atau 99,2% dari pagu anggaran sebesar Rp. 261.687.000,- dengan capaian kinerja sebesar 300,6%.



## INDIKATOR 7

### Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi

#### 1. Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan. Target pada tahun 2019 yaitu 2 bandara.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya bandara yang memenuhi syarat-syarat sanitasi dimana tidak ditemukannya penyakit berbasis lingkungan di wilayah Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma. Sub indikator ini terdiri dari:

##### a. *Tempat-Tempat Umum (TTU) yang Berkriteria Baik*

Lingkungan Bandara Soekarno Hatta Tempat-Tempat Umum (TTU) yang dinilai sanitasinya berupa sarana dan bangunan umum. Sarana dan bangunan di Bandara Soekarno Hatta meliputi Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Area Perkantoran yang terdiri dari 96 area. Sedangkan di Bandara Halim Perdana Kusuma terdapat 15 area. TTU berkriteria baik jika 100% hasil inspeksi Sanitasi Lingkungan berdasarkan Kepmenkes no. 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum minimal memperoleh nilai  $\geq 75$  dan jika terdapat temuan segera ditindaklanjuti.

##### b. *Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan*

Tempat pengelolaan Makanan (TPM) di Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma meliputi Restoran/Rumah Makan dan Jasa Boga / Catering yang menyediakan makanan di pesawat. Pengawasan TPM dilaksanakan berdasarkan Permenkes No. 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga dan Permenkes No. 1098/MENKES/PER/VI/2003 tentang persyaratan higiene sanitasi rumah makan dan restoran. Dikategorikan memenuhi syarat kesehatan jika 97,5% restoran/rumah makan dan Jasa Boga yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan atau berdasarkan inspeksi sanitasi memperoleh nilai minimal 700.

c. *Tempat Penyediaan Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan*

Penilaian tempat-tempat penyediaan air bersih didasarkan Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Permenkes No. 736/Menkes/PER/VI/2010 tentang Tata laksana pengawasan kualitas air minum. Tempat penyedia air bersih/minum dikatakan memenuhi syarat kesehatan jika 85 % sarana air minum yang berada di wilayah bandara memiliki sertifikat dan atau memenuhi persyaratan kualitas fisika kimia dan mikrobiologi air minum sesuai persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut di atas.

**2. Cara Perhitungan Kriteria Bandara Sehat di Bandara Soekarno Hatta dan Halim PK**

Untuk mengetahui suatu Bandara memenuhi kriteria sesuai definisi operasional diatas, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

- o *Tempat-Tempat Umum (TTU) Berkriteria Baik*

$$\frac{\text{Hasil IKL TTU yang berkriteria baik}}{\text{Target 100\% TTU}} \times 100 \%$$

- o *Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Kesehatan*

$$\frac{\text{TPM bersertifikasi + Hasil IKL TPM yang memenuhi syarat}}{\text{Target 97,5\% TPM}} \times 100 \%$$

- o *Tempat Penyediaan Air Bersih memenuhi Syarat Kesehatan*

$$\frac{\text{Jumlah Sarana Air yang memenuhi syarat}}{\text{Target 85\% Sarana Air Berih}} \times 100 \%$$

Tabel 3.3  
Hasil Inspeksi Sanitasi Tahun 2019

NO	Hasil Inspeksi Sanitasi	Kriteria	SOETTA			HALIM		
			Target	Jml	%	Target	Jml	%
1.	TTU berkriteria baik	100%	96	96	100	15	15	100
2.	TPM Memenuhi Laik Hygiene	97,5%	267	301 (214 TPM bersertifikat & 87 TPM memenuhi syarat)	112	51	51 (37 TPM bersertifikat & 14 TPM memenuhi syarat)	100
3.	Tempat Penyediaan Air Minum memenuhi syarat kesehatan	85%	84	80	95.2	4	4	100

Dari ketiga data diatas menunjukkan bahwa TTU, TPM, dan penyediaan air di bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma memenuhi persyaratan kesehatan sesuai yang ditargetkan. Dengan demikian perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

- **Realisasi**

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan yaitu :

- 1) Bandara Soekarno-Hatta
- 2) Bandara Halim Perdanakusuma

- **Capaian**

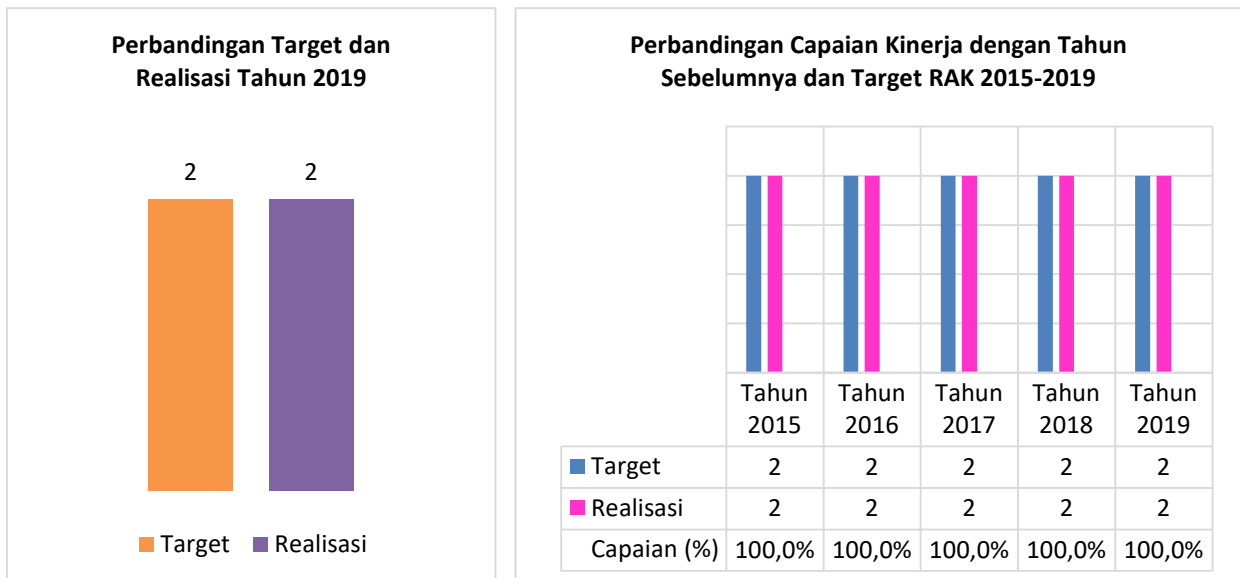
$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{2 \text{ bandara}}{2 \text{ bandara}} \times 100 \% = \mathbf{100\%}$$

### 3. Capaian Kinerja

Pada tahun 2019, dua wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma memenuhi syarat-syarat sanitasi. Sehingga capaian pada tahun 2019 sebesar 100%.

Grafik 3.23  
Perbandingan Capaian Kinerja  
Indikator Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi



Dari grafik diatas diketahui bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlah bandara yang memenuhi syarat sanitasi sebanyak 2 bandara dan sudah mencapai target dengan capaian 100% setiap tahunnya. Selain itu realisasi tahun 2019 sudah memenuhi target akhir RAK 2015-2019.

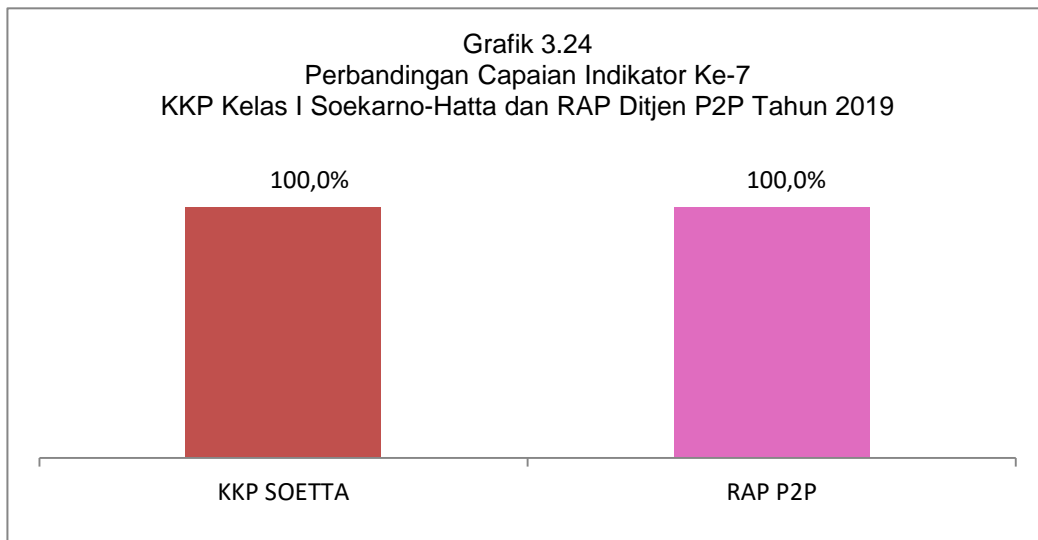
Tabel 3.4  
Perbandingan Jumlah Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), dan Sarana Penyediaan Air Bersih yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 – 2019

Tahun	TPM yang MS	TTU yang MS	Sarana Air Bersih yang MS
2015	85	214	32
2016	96	257	44
2017	105	246	60
2018	125	319	90
2019	96	301	80

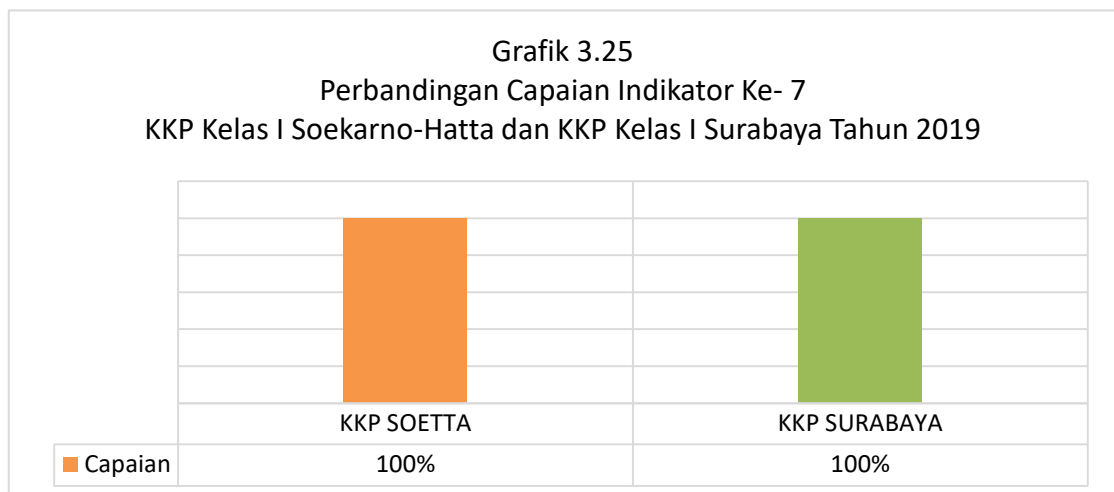
Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan meningkat setiap tahun. Akan tetapi justru menurun di tahun 2019. Hal tersebut karena jumlah lokasi yang diawasi juga menurun. Hal tersebut dikarenakan sedang dilakukan revitalisasi beberapa bangunan seperti keseluruhan terminal 1C dan Boarding Lounge terminal 2F Gate 6 – 7, sehingga bangunan/gedung di area tersebut tidak dioperasikan.
- Pada tahun 2018 jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun 2018 dilakukan pekan sertifikasi laik higiene sanitasi rumah makan/restoran di bandara, serta operasional bandara maksimal sehingga jumlah rumah makan/restoran juga banyak seiring beroperasinya terminal 3 Internasional. Tahun 2019 tidak sebanyak tahun 2018 karena dampak revitalisasi terminal 1C dan 2F Gate 6-7, sehingga rumah makan/restoran di area tersebut juga ditutup.
- Pada tahun 2015 jumlah sarana yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 32 sarana, hal ini berdasarkan hasil uji petik terhadap sarana air yang tidak mengajukan penerbitan sertifikat. Pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 jumlah sarana air bersih yang memenuhi syarat meningkat setiap tahunnya karena adanya penambahan sarana air

berupa penambahan *drinking water*, *Ground Support System (GSS)* *Portable Water*, dan sarana air lainnya.



Target indikator Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi tahun 2019 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 100%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2019 yaitu 2 bandara atau 100%, telah menyumbang pencapaian target RAP Ditjen P2P.



Capaian indikator Pelabuhan/Bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2019 sama dengan KKP Kelas I Surabaya yaitu 100% dengan jumlah wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta sebanyak 2 wilker dan KKP Kelas I Surabaya sebanyak 5 wilker.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2019 dapat dicapai karena selalu dilakukan pembinaan dan upaya perbaikan berupa saran dan rekomendasi untuk memperbaiki kondisi sanitasi sarana TTU, TPM dan tempat penyediaan air minum yang tidak memenuhi syarat. Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan rapat koordinasi lintas sektor, advokasi dengan PT. Angkasa Pura II khususnya bagian komersil dan lingkungan dan upaya kesepakatan bersama demi mewujudkan bandara sehat.

#### 5. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Melaksanakan rapat koordinasi program pengendalian risiko lingkungan baik di Bandara Soekarno Hatta maupun di Bandara Halim Perdanakusuma.
- b. Bersurat kepada PT. Angkasa Pura II (Persero) KC Bandara Halim Perdanakusuma dengan nomor surat KL.02.06/6.1/2906/2019 tanggal 1 Juli 2019. Ditindaklanjuti oleh EGM Commercial Service Division dengan memberikan surat edaran ke para mitra usaha konsesional di Bandara Halim Perdanakusuma nomor 15.02/00/07/2019/7827 yang isinya mewajibkan rumah makan/restoran memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi.
- c. Rapat Evaluasi Kepemilikan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi rumah makan / restoran di Bandara Halim PK pada Kamis, 15 Agustus 2019 (Pukul 14.00 s.d 19.00 Wib) di Ruang Rapat Gatot Kaca, Gedung Terminal Lantai 2 Bandara Halim Perdanakusuma dengan hasil Commercial Service Division PT. Angkasa Pura II Bandara Halim Perdanakusuma mendukung program KKP agar rumah makan/restoran di area terminal Bandara Halim Perdanakusuma mengurus sertifikat laik hygiene sanitasi untuk menjamin pengguna jasa bandara yang menggunakan fasilitas rumah makan/restoran. Rapat ini juga dihadiri oleh PT. Angkasa Pura Solusi dan berdasarkan hasil rapat tersebut, dikeluarkan surat himbuan pembuatan sertifikat laik higiene bagi mitra usaha.
- d. Advokasi kepada PT. Angkasa Pura II (Persero) KCU Bandara Soekarno Hatta terkait Rumah makan/Restoran yang belum memiliki Sertifikat Laik





Higiene Sanitasi. Hasil advokasi ini, PT. Angkasa Pura II (Persero) mengeluarkan surat pemberitahuan nomor 15.02/00/12/2019/14453 kepada seluruh mitra usaha rumah makan/restoran.

- e. Pemasangan plakat tingkat mutu laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan pada bulan Mei 2019. Pemasangan plakat berupa simbol simbol tersenyum lebar berwarna hijau bagi yang memiliki sertifikat, tersenyum datar berwarna kuning bagi yang tidak memiliki sertifikat tetapi hasil IKL memenuhi syarat dan simbol sedih berwarna merah bagi yang tidak memiliki sertifikat dan hasil IKL tidak memenuhi syarat.
- f. Kursus higiene sanitasi penjamah online agar mempermudah penjamah maupun penanggung jawab mendapatkan peningkatan pengetahuan terkait higiene sanitasi makanan dan minuman.
- g. Untuk meningkatkan cakupan sarana air minum yang memenuhi syarat melalui pemberian saran perbaikan kualitas berupa surat rekomendasi dan laporan hasil pengujian sampel air kepada para penyelenggara air.

## **6. Kendala / Masalah yang Dihadapi**

- a. Masih terdapat sarana air minum yang belum melakukan pengujian kualitas sampel air secara periodik karena tidak ada keharusan memiliki sertifikat.
- b. Jumlah TPM di Bandara Soekarno Hatta yang selalu berubah setiap tahunnya, dimana Tenan /TPM terlalu cepat berganti (tutup dan atau buka baru) menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal.

## **7. Pemecahan Masalah**

- a. Perlunya aturan yang lebih mengikat tentang keharusan dan sanksi terkait kewajiban penyelenggaraan pengelolaan makanan dan air minum yang memenuhi syarat kesehatan, terutama di bandara sebagai pintu masuk negara dan perlunya penambahan pasal dalam peraturan menteri terkait pengawasan air minum tentang pentingnya kepemilikan sertifikat air minum untuk kebutuhan pesawat.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan PT. Angkasa Pura II Bandara Soetta terkait update data jumlah TPM di Bandara Soetta.



## 8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dengan alokasi anggaran Rp. 125.355.000,- .

## 9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Dalam rangka efisiensi SDM, dilakukan upaya perbantuan (*sharing*) tenaga teknis dalam hal ini tenaga entomolog yang ada di bidang PRL dapat membantu melakukan pekerjaan di Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan;
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran, dilakukan upaya diseminasi informasi terkait temuan di lapangan berkaitan dengan kondisi yang tidak memenuhi syarat sanitasi. Diseminasi ini disampaikan pada pertemuan lintas sektor yang anggaran pelaksanaannya dibebankan dari kegiatan Direktorat P2PTVZ. Hal ini dapat dilakukan karena kondisi sanitasi lingkungan sangat erat kaitannya dengan timbulnya keberadaan vektor di lingkungan bandara.
- c. Target sub indikator tempat penyediaan air bersih selalu mencapai target. Hal ini didukung karena keberhasilan KKP Soekarno Hatta dalam mensosialisasikan pentingnya pengawasan internal setiap bulan dengan pembiayaan dari penyelenggara air. Walaupun dalam pelaksanaan pengawasan masih dibantu oleh KKP Soekarno Hatta dalam pengambilan sampel, pengiriman ke laboratorium, analisa hasil uji dan pemberian saran rekomendasi.
- d. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 123.355.000,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 123.555.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100%.



## INDIKATOR 8

### Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter Dan Buffer Area

#### 1. Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal  $\leq 1$ , HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6. Target pada tahun 2019 yaitu 2 bandara. Nilai standar nasional yang dipakai yaitu SOP Nasional Kegiatan KKP di pintu masuk Negara.

Outcome dari indikator ini yaitu terjaganya bandara di wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno Hatta yang bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area. Baik pada tahun 2018 maupun 2019 Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma telah bebas vektor sesuai dengan standar nasional, dimana berdasarkan data laporan surveilans tidak ditemukan penyakit tular vektor di wilayah Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma.

#### 2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area

- 1) Bandara Soekarno-Hatta
- 2) Bandara Halim Perdanakusuma

- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{2 \text{ bandara}}{2 \text{ bandara}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

#### 3. Capaian Kinerja

Pada tahun 2019, dua wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area dengan hasil sebagai berikut:

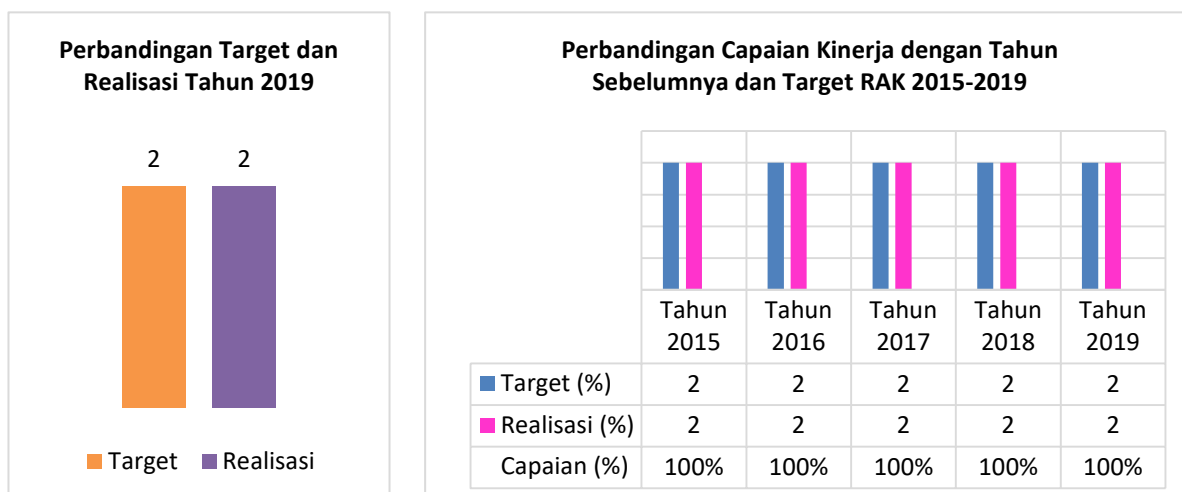
Tabel 3.5  
Hasil Pengamatan Vektor Tahun 2019

No.	Hasil Pemantauan Vektor	Standar Nasional	Wilayah Kerja		Ket.
			Bandara Soetta	Bandara Halim Pk	
1.	Indeks Pinjal	<1	0,47	0,8	Memenuhi standar
2.	HI Perimeter	0	0	0	Memenuhi standar
3.	HI buffer	<1	0	0	Memenuhi standar
4.	Larva Anopheles	<1	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Memenuhi standar
5.	Kepadatan Kecoa	Rendah	Rendah	Rendah	Memenuhi standar
6.	Kepadatan Lalat	<6	1	1,33	Memenuhi standar

Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil pengamatan vektor pada tahun 2019, baik di Bandara Soekarno-Hatta maupun di Bandara Halim Perdanakusuma sudah dibawah Standar Nasional yang ditetapkan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 431/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan.

Dimana nilai indeks pinjal <1, HI (House Index) perimeter 0, HI (House Index) buffer <1, tidak ditemukan larva *Anopheles*, kepadatan kecoa rendah, dan kepadatan lalat <6. Sehingga dua wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta telah bebas vektor.

Grafik 3.26  
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area



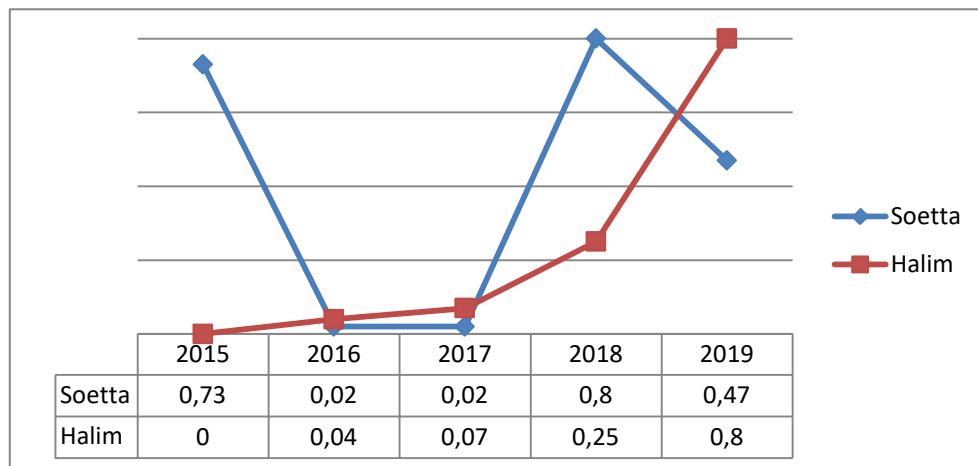
Dari grafik 2.6 diketahui bahwa realisasi tahun 2019 sebanyak 2 bandara sudah mencapai target tahunan dan target akhir RAK 2015-2019 dengan capaian 100%. Dari tahun 2015 hingga 2019, jumlah bandara yang

bebas vektor sebanyak 2 bandara dan sudah mencapai target dengan capaian 100% setiap tahunnya. Capaian tersebut adalah capaian maksimal yang dapat diperoleh karena dengan target dua bandara yang bebas vektor pada area wilayah perimeter dan buffer area sudah mencakup seluruh wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno Hatta yakni Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

Berikut data masing-masing indikator selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

**a. Indeks Pinjal**

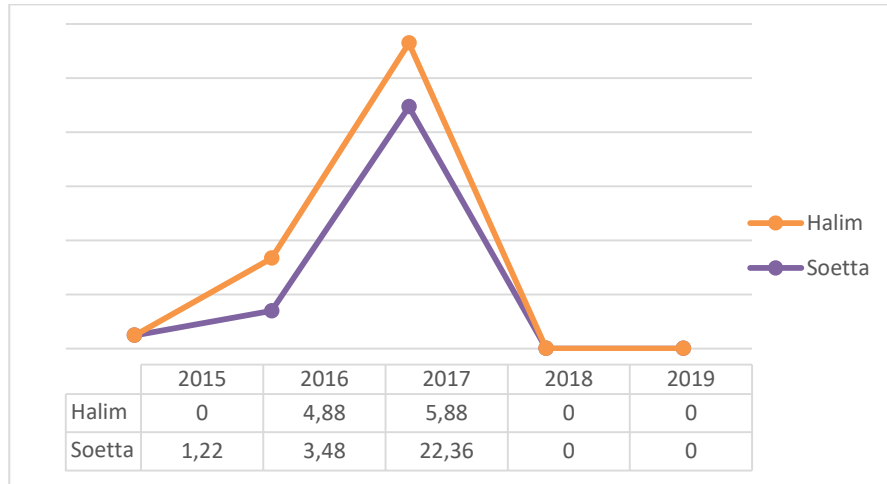
Grafik 3.27  
Data Indeks Pinjal Di Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2015 - 2019



Nilai indeks pinjal di Bandara Soekarno Hatta maupun Halim Perdanakusuma dari kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 sangat variatif. Indeks pinjal tertinggi di Bandara Soekarno Hatta terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 0,8 sedangkan di Bandara Halim Perdanakusuma terjadi pada tahun 2019. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kebersihan fisik lingkungan.

## b. House Index Perimeter

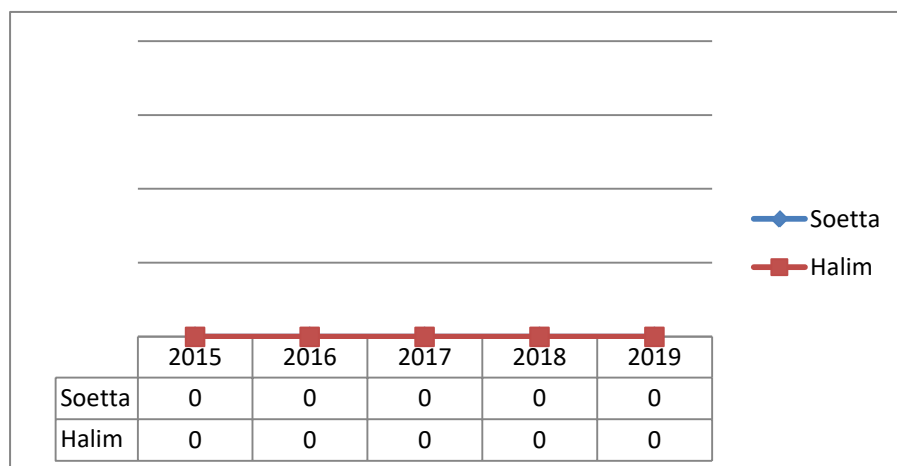
Grafik 3.28  
Data HI Perimeter di Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma  
Tahun 2015 - 2019



Tren House Index selama tahun 2015 – 2019 baik di Bandara Soekarno Hatta maupun Bandara Halim Perdanakusuma tertinggi pada tahun 2017. Namun berhasil ditekan di tahun 2018 dan 2019 karena beberapa program pemberdayaan kader yang dilakukan oleh KKP Kelas I Soekarno Hatta.

## c. House Index Buffer

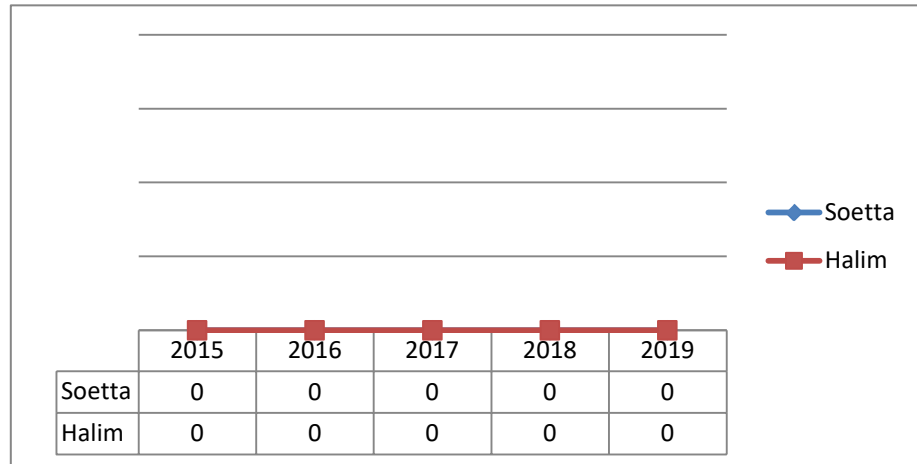
Grafik 3.29  
Data HI Buffer di Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma  
Tahun 2015 - 2019



Dari grafik 3.29 terlihat bahwa selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, House Index Buffer di Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma selalu 0 (nol).

#### d. Larva Anopheles

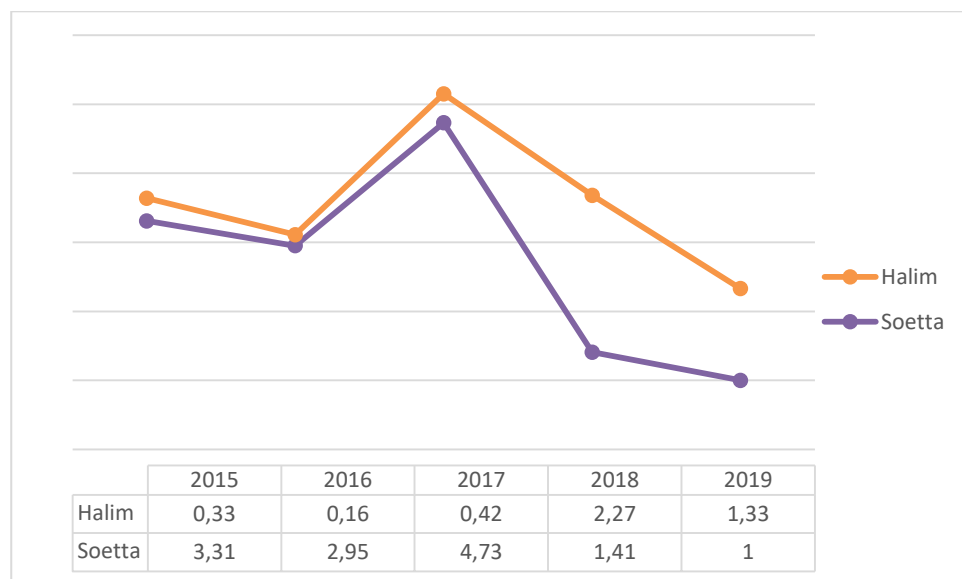
Grafik 3.30  
Data Survei Larva Anopheles di Bandara Soekarno Hatta  
dan Halim Perdanakusuma Tahun 2015 – 2019



Seperti yang tergambar dalam grafik 3.30, dapat dilihat bahwa selama tahun 2015 – 2019 baik di Bandara Soekarno Hatta maupun Halim Perdanakusuma HI buffer = 0 dan tidak ditemukan larva *Anopheles*.

#### e. Kepadatan Lalat

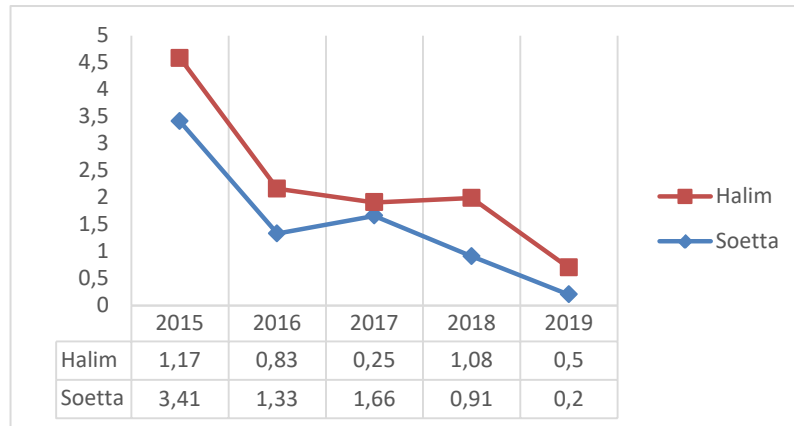
Grafik 3.31  
Kepadatan Lalat di Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma  
Tahun 2015 – 2019



Berdasarkan grafik 3.31 dapat dilihat bahwa tren kepadatan lalat di dua bandara mengalami penurunan di dua tahun terakhir. Hal tersebut menjadi keberhasilan pengendalian vektor lalat di bandara.

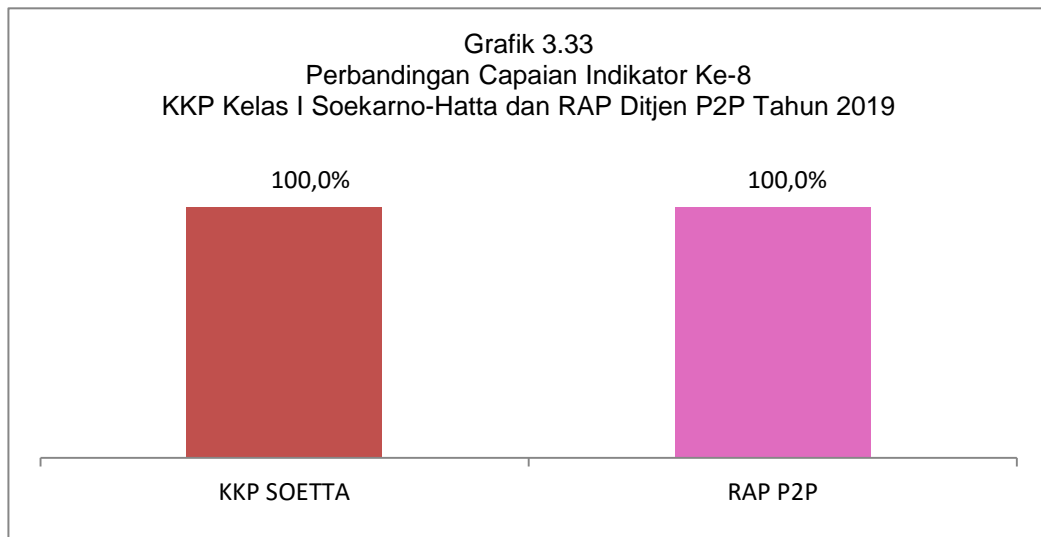
**f. Kepadatan kecoa**

Grafik 3.32  
Kepadatan Lalat di Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma  
Tahun 2015 – 2019



Dari grafik 3.32 dapat dilihat bahwa tren kepadatan kecoa baik di Bandara Halim Perdanakusuma maupun Bandara Soekarno Hatta cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan perbaikan sanitasi lingkungan dan kesadaran pengelola tempat terkait pengetahuan higiene sanitasi dan pengendalian vektor yang meningkat.

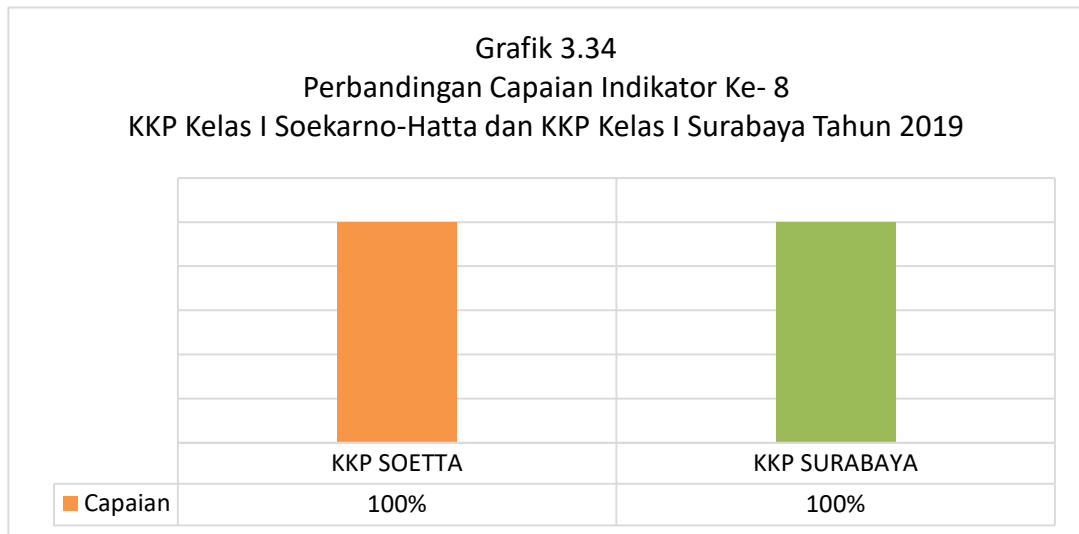
Grafik 3.33  
Perbandingan Capaian Indikator Ke-8  
KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan RAP Ditjen P2P Tahun 2019



Target indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area tahun 2019 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 100%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun



2019 yaitu 2 bandara atau 100%, telah menyumbang pencapaian target RAP Ditjen P2P.



Capaian indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2019 sama dengan KKP Kelas I Surabaya yaitu 100%. Jumlah wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta sebanyak 2 wilker dan KKP Kelas I Surabaya sebanyak 3 wilker yang ditargetkan bebas vektor.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2019 dapat dicapai karena koordinasi dan kerja sama yang baik dengan lintas sektor dan lintas program baik pemerintah, BUMN maupun swasta di lingkungan Bandara Soekarno Hatta maupun Bandara Halim Perdanakusuma. Koordinasi dan kerja sama ini seperti dengan memberdayakan kader dan penguatan program dengan dukungan pembiayaan dari berbagai lintas sektor tersebut.

Selain itu dengan adanya alokasi dana terkait pencegahan dan pengendalian vektor, maka bahan dan peralatan untuk kegiatan tersedia dengan cukup. Sumber daya manusia di lingkungan KKP Kelas I Soekarno Hatta juga telah mengikuti beberapa pelatihan guna meningkatkan kapasitasnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian vektor. KKP Kelas I Soekarno Hatta juga memfasilitasi dua kali pertemuan penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas program di bandara. Dalam pertemuan tersebut dapat dilihat bahwa program pencegahan dan pengendalian vektor dan BPP juga didukung oleh pimpinan-pimpinan di lintas sektor baik

pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta di lingkungan seperti perusahaan penerbangan, katering, *ground handling* dan sebagainya.

## 5. Upaya yang Telah Dilakukan

Adapun upaya yang telah dilakukan selama tahun 2019 untuk mencapai target indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan alokasi anggaran dalam DIPA KKP Kelas I Soekarno Hatta.
- b. Penyediaan bahan dan peralatan yang memadai.
- c. Uji resistensi nyamuk *Aedes* dan uji kerentanan larva sebagai upaya monitoring dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian vektor terkait sub indikator nilai *House Index*.
- d. Diseminasi hasil pengamatan kepada lintas sektor dan program terkait.
- e. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas program di bandara, termasuk dalam pemberdayaan kader.
- f. Konsultasi teknis dan koordinasi dengan pusat dan lintas sektor.
- g. Bimbingan teknis ke wilayah kerja.
- h. Peningkatan kapasitas SDM dalam teknik pencegahan dan pengendalian vektor dan BPP.
- i. Mengawal deklarasi bersama pengendalian vektor terpadu dengan lintas program/lintas sektor di bandara.

## 6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Berikut adalah beberapa kendala/masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator bandara yang bebas vektor di wilayah perimeter dan buffer area, meliputi :

- a. Terdapat beberapa kader yang kurang proaktif dan disiplin, khususnya dalam hal pelaporan.
- b. Tingkat kepadatan vektor tertentu di beberapa titik sempit tinggi.
- c. Terdapat kondisi lingkungan yang menjadi tempat perkembangbiakan vektor.
- d. Berdasarkan hasil pengamatan nyamuk *Anopheles* pada bulan Oktober dan Nopember ditemukan hasil positif dengan nilai MBR 0,44 dan 1,11 di area buffer bandara yaitu Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang. Hal tersebut sebelumnya belum pernah ditemukan dan baru ditemukan pada



tahun 2019 akhir sebagai dampak perluasan Bandara Soekarno Hatta khususnya pengoperasian runway 3 sehingga buffer area menjadi lebih jauh dari sebelumnya.

## **7. Pemecahan Masalah**

Beberapa kendala/permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan upaya sebagai berikut :

- a. Tetap berkomunikasi dan koordinasi dengan kader agar meningkatkan keaktifan, kinerja dan disiplinnya
- b. Melakukan upaya pengendalian di titik-titik dimana kepadatan vektornya tinggi hingga tingkat kepadatannya menjadi rendah sehingga tidak berpotensi menimbulkan penularan penyakit akibat vektor
- c. Berkoordinasi dengan pihak pengelola lingkungan dimaksud serta memberikan rekomendasi intervensi lingkungan yang diperlukan agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor.
- d. Terkait penemuan nyamuk Anopheles, KKP Kelas I Soekarno Hatta telah melakukan koordinasi dengan Puskesmas Salemban Jaya Kabupaten Tangerang sebagai upaya kewaspadaan dini.

Seluruh kendala/masalah yang ditemukan di lapangan juga dibahas saat pertemuan penguatan jejaring dan koordinasi dengan lintas sektor / lintas program di bandara.

## **8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik dengan alokasi anggaran Rp. 1.012.030.000,- terdiri dari :

- a. Surveilans Migrasi Malaria di Pelabuhan dan Bandara termasuk Malaria Cross Border
- b. Monitoring Resistensi / Efikasi 2 Jenis Bahan Insektisida
- c. Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, *Spraycan*, Insektisida Perangkap Tikus, Entomologi Kit dll)



- d. Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi Program Pengendalian Vektor & BPP di KKP. Kegiatan ini untuk memfasilitasi kegiatan konsultasi teknis dan koordinasi serta bimbingan teknis ke wilayah kerja.
- e. Diklat Pengendalian Vektor dan BPP di Bandara/Pelabuhan Laut. KKP Kelas I Soekarno Hatta dalam hal ini sebagai penyelenggara dan diklat tersebut diikuti oleh 60 peserta dari KKP se-Indonesia yang mempunyai wilayah kerja berupa bandara.
- f. Layanan Survei Vektor Pes. Kegiatan ini mencakup surveilans vektor pes mulai dari pemetaan, pemasangan perangkap tikus hingga identifikasi tikus tertangkap beserta pinjalnya. Hasil kegiatan ini yakni Indeks Pinjal dimana kriteria pencapaian indikator harus  $\leq 1$ .
- g. Layanan Survei Vektor Diare. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengamatan vektor lalat dan kecoa sebagai vektor penyakit diare.
- h. Layanan Pengendalian Vektor Diare. Kegiatan ini meliputi kegiatan pengendalian vektor lalat dan kecoa. Apabila hasil survei ditemukan kepadatan lalat maupun kecoa yang tinggi, maka dilakukan intervensi baik pengendalian secara kimia melalui baiting/spraying maupun perbaikan kondisi lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menekan kepadatan lalat/kecoa serendah mungkin sehingga tidak berpotensi menimbulkan penyebaran penyakit akibat vektor. Kegiatan ini mendukung capaian indikator dengan kriteria angka kepadatan lalat  $< 6$  dan kepadatan kecoa rendah.
- i. Layanan Survei Vektor DBD. Kegiatan ini meliputi pengamatan larva oleh petugas pemantau jentik bandara.
- j. Layanan Pengendalian Vektor DBD. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang indikator pada output ini adalah mulai dari survei vektor *Aedes* hingga pengendaliannya.
- k. Layanan Survei Vektor Malaria. Kejadiannya meliputi kegiatan survei jentik dan survei nyamuk *Anopheles* dewasa. Kegiatan ini mendukung capaian indikator tidak ditemukannya larva *Anopheles*.

## 9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai target indikator ini, KKP Kelas I Soekarno Hatta telah berupaya menggunakan sumber daya seefisien mungkin diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan teknis dan dukungan teknis dalam rangka pencegahan dan pengendalian vektor dan BPP di bandara.
- b. Besaran yang ada dalam anggaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan TA 2019.
- c. Melibatkan SDM terampil di bidang pencegahan dan pengendalian vektor yakni entomolog kesehatan dan sanitarian.
- d. Memberdayakan kader dalam kegiatan di lapangan.
- e. Membangun sinergi dengan lintas sektor di bandara untuk saling memperkuat program dengan menggunakan masing-masing sumber daya yang ada di instansinya. Termasuk memonitor kegiatan Badan Usaha Swasta *Pest Control* yang beroperasi di bandara.
- f. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 1.007.086.540,- atau 99,5% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.012.030.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100%.



## INDIKATOR 9

### Jumlah Orang yang Melakukan Skrining Penyakit Menular Langsung

#### 1. Definisi Operasional

Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya. Skrining untuk pengendalian penyakit adalah pemeriksaan orang-orang asimtomatik untuk mengklasifikasikan mereka ke dalam kategori yang diperkirakan mengidap atau tidak mengidap penyakit (*as likely or unlikely to have disease*). Target pada tahun 2019 yaitu 1.100 orang.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya masyarakat yang melakukan skrining penyakit menular langsung yaitu HIV AIDS dan TB, dimana pada tahun 2018 terdapat 1.296 orang yang melakukan Skrining dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 1.802 orang sehingga deteksi dini dapat segera dilakukan untuk selanjutnya dilakukan pengobatan dan dapat menurunkan faktor risiko penyakit menular.

#### 2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Akumulasi jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya dalam satu tahun

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pemeriksaan TB       | = 1.036 orang        |
| 2. Pemeriksaan HIV/AIDS | = 766 orang          |
| <b>JUMLAH</b>           | <b>= 1.802 orang</b> |

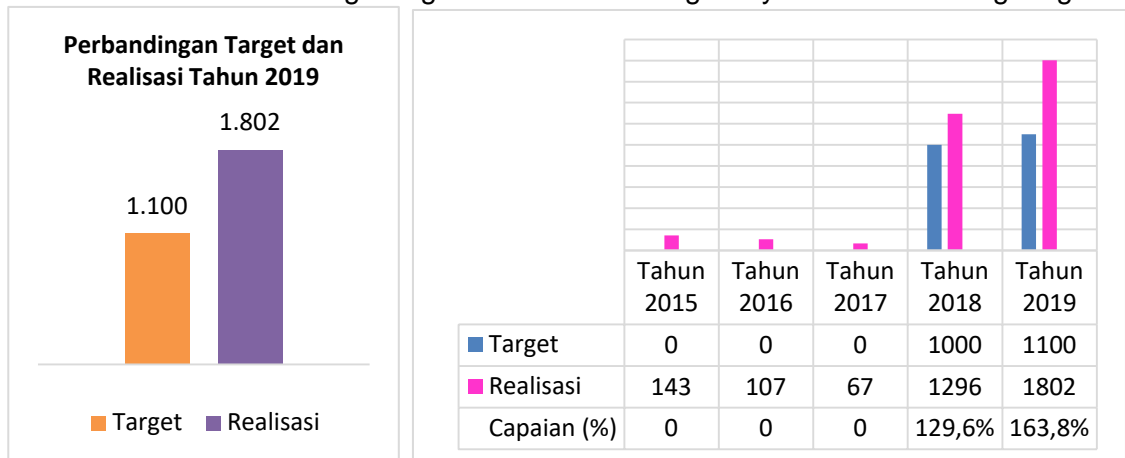
- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{1.802 \text{ orang}}{1.100 \text{ orang}} \times 100\% = \mathbf{163,8\%}$$

### 3. Capaian Kinerja

Grafik 3.35  
Perbandingan Capaian Kinerja  
Indikator Jumlah Orang Yang Melakukan Skrining Penyakit Menular Langsung



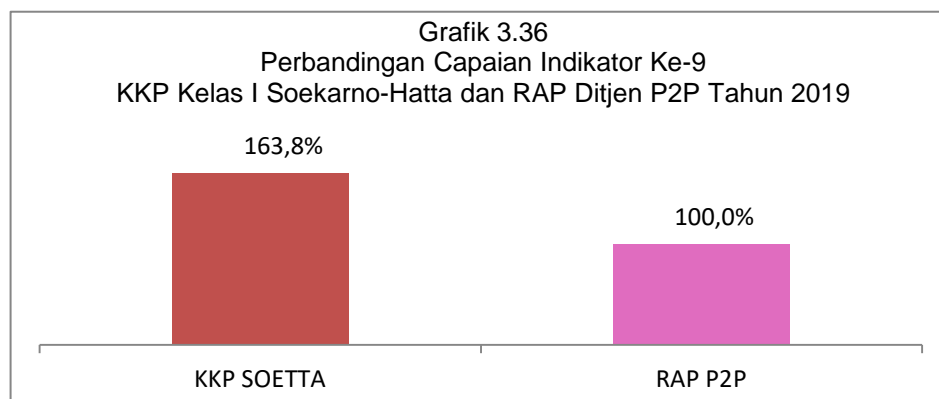
Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung pada tahun 2019 sebanyak 1.802 orang dan sudah mencapai target dengan capaian sebesar 163,8%. Realisasi pada tahun 2019 lebih besar daripada tahun 2015 hingga tahun 2018, dimana tahun 2015 hingga tahun 2017 hanya dilakukan pemeriksaan TB dan tidak ditetapkan target pemeriksaannya. Selain itu realisasi tahun 2019 sudah memenuhi target akhir RAK 2015-2019. Capaian kinerja pada tahun 2019 lebih besar dari tahun 2018.

Data screening penyakit menular pada tahun 2019 sebagai berikut:

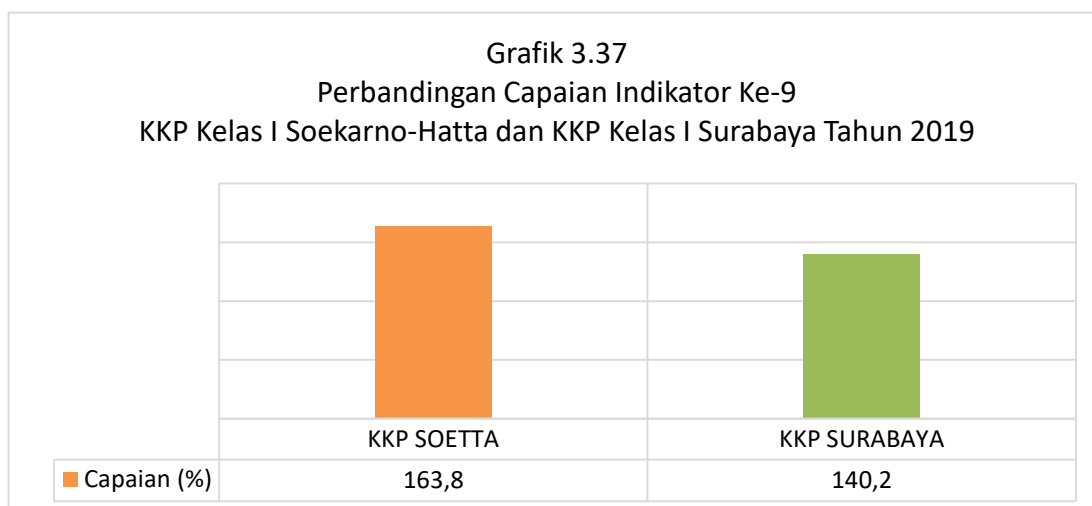
Tabel 3.6  
Hasil Skrining Penyakit Menular Langsung Tahun 2019

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	
		Positif (+)	Negatif (-)
1.	TB	0	766
2.	HIV AIDS	6	1.030
Total		6	1.796

Grafik 3.36  
Perbandingan Capaian Indikator Ke-9  
KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan RAP Ditjen P2P Tahun 2019



Target indikator persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung tahun 2019 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 100%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2019 yaitu 1.796 orang atau 163,8% hal ini telah menyumbang pencapaian target RAP Ditjen P2P.



Capaian indikator persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung KKP Kelas I Soekarno Hatta pada tahun 2019 sebesar 163,8% dengan realisasi 1.802 dari target 1.100 orang, lebih besar dibandingkan KKP Kelas I Surabaya yaitu 140,2% dengan realisasi 2.803 dari target 2.000 orang.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2019 dapat dicapai karena adanya pembentukan Pokja HIV dan pelayanan mobile VCT dan TB ke instansi/ BUMN/ Perusahaan swasta yang ada di wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta. Capaian indikator meningkat dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2019 KKP Soekarno-Hatta melakukan screening Penyakit Menular Langsung secara serentak di 3 lokasi bersamaan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional.

#### 5. Upaya yang Telah Dilakukan

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap penyakit menular langsung (HIV dan TB) KKP Kelas I Soekarno-Hatta telah melakukan



sosialisasi program Pokja HIV, pembentukan Pokja HIV dan sosialisasi tentang penyakit HIV dan TB serta screening penyakit tersebut.

## **6. Kendala / Masalah yang Dihadapi**

Masalah yang dihadapi dalam pencapaian target indikator skrining penyakit menular (HIV dan TB) adalah masih adanya stigma terhadap penderita HIV/ AIDS sehingga masih ada instansi yang belum berkenan untuk dilakukan screening pemeriksaan HIV dan TB di unit kerjanya.

## **7. Pemecahan Masalah**

Melakukan sosialisasi atau kampanye guna mencapai tiga indikator kebijakan *global getting to zeroes* yaitu: Tidak ada penambahan kasus HIV/AIDS, tidak ada angka kematian karena HIV/ AIDS dan tidak ada diskriminasi bagi penderita HIV/ AIDS

## **8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 134.382.000,-
- b. Layanan pengendalian penyakit TB dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-

## **9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

- a. Kegiatan Skrining penyakit menular (HIV dan TB) melibatkan tenaga baik staf bidang UKLW maupun staf dari instansi lain terutama dalam pembentukan Pokja HIV. Hal sangat menunjang dalam pencapaian target pemeriksaan screening HIV dan TB.
- b. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 219.056.000,- atau 97,6% dari pagu anggaran sebesar Rp. 224.382.000,- dengan capaian kinerja sebesar 163,8%.



## INDIKATOR 10

### Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

#### 1. Definisi Operasional

Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 11 jenis Dokumen antara lain RKAKL/DIPA, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Lakip, Profil, Proposal PNBP, Dokumen Kepegawaian, e monev DJA, e monev Bappenas, LEB dalam periode satu tahun. Target tahun 2019 yaitu 40 dokumen.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah (SAKIP) dimana dokumen dukungan manajemen yang disusun merupakan bagian dari penilaian tersebut. Nilai SAKIP KKP Kelas I Soekarno Hatta pada tahun 2017 yaitu 95,17 dan meningkat pada tahun 2018 yaitu 96,25.

#### 2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Akumulasi jumlah dokumen dukungan manajemen yang disusun dalam waktu satu tahun

No	Dokumen	Jumlah Dokumen	Keterangan
1	Dokumen RKAKL/DIPA	2	Awal dan revisi
2	Laporan Tahunan	1	
3	Laporan Keuangan	2	Semester I & II
4	Laporan BMN	2	Semester I & II
5	Laporan Kinerja	1	
6	Profil	1	
7	Proposal PNBP	1	
8	Dokumen kepegawaian	2	Kontrak & Penilaian
9	Laporan e monev DJA	12	Setiap Bulan
10	Laporan e monev Bappenas	4	Setiap Triwulan
11	Laporan Eksekutif Bulanan (LEB)	12	Setiap Bulan
<b>Total</b>		<b>40</b>	

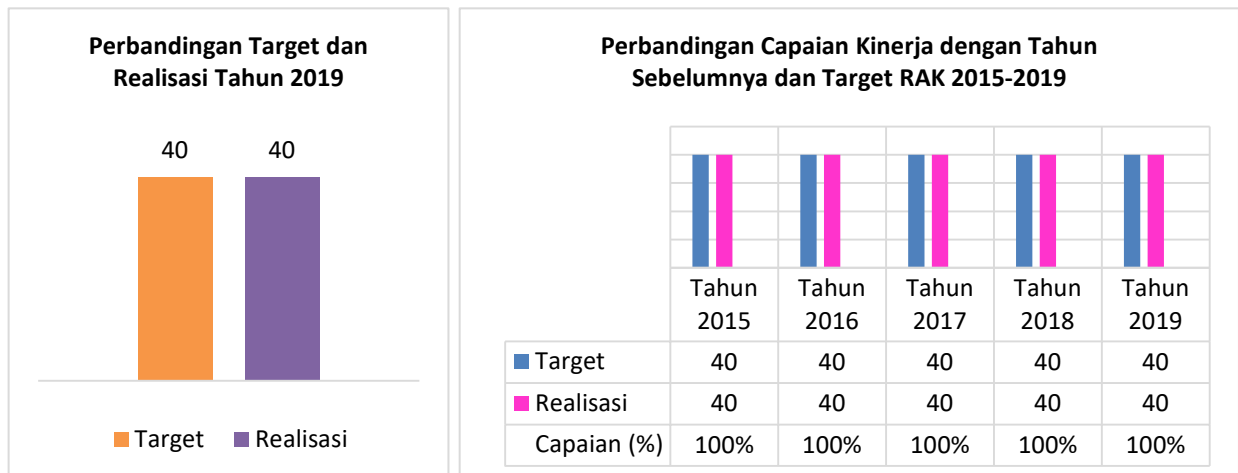
- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

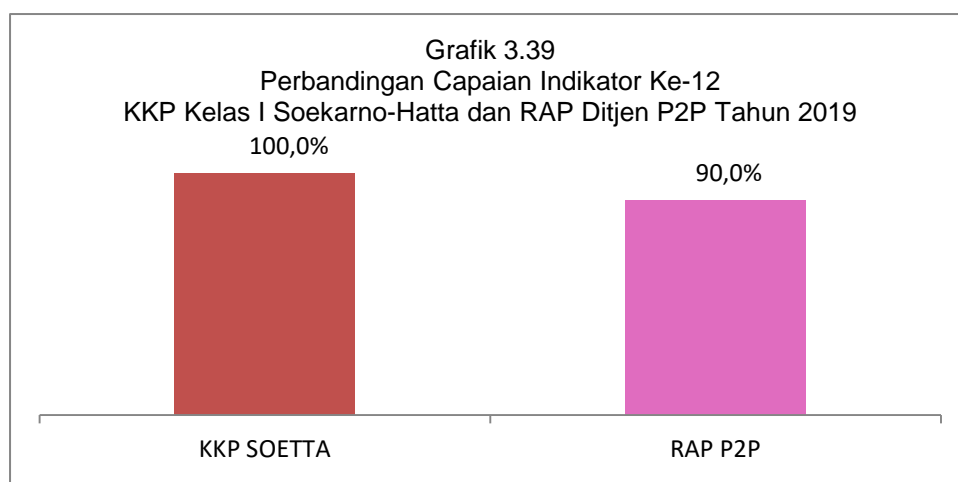
$$\frac{40 \text{ dokumen}}{40 \text{ dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

### 3. Capaian Kinerja

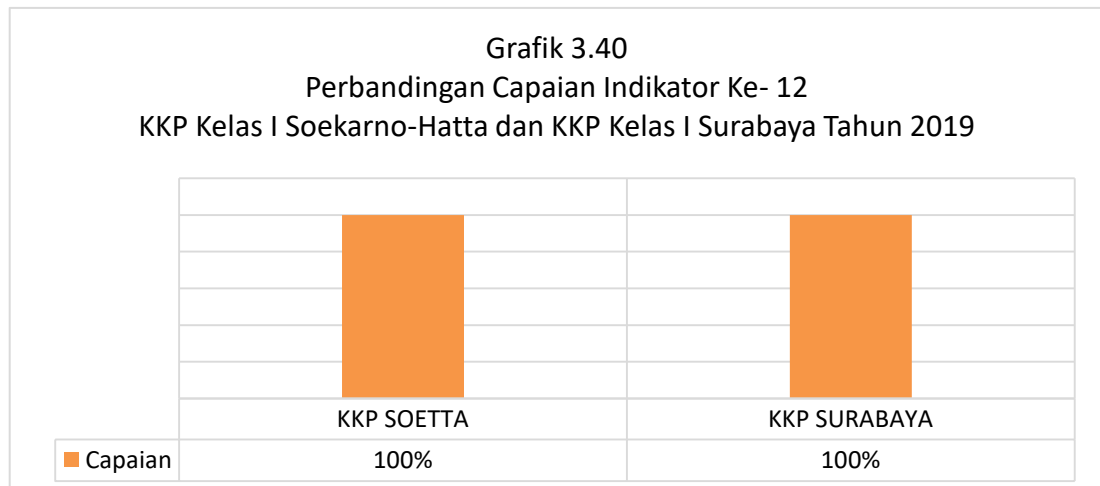
Grafik 3.38  
Perbandingan Capaian Kinerja  
Indikator Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya



Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah dokumen dukungan manajemen yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak 40 dokumen dan sudah sesuai target dengan capaian sebesar 100%. Realisasi tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu mencapai target dan dengan capaian yang tetap setiap tahun yaitu 100%. Selain itu realisasi tahun 2019 sudah memenuhi target akhir RAK 2015-2019.



Target indikator persentase laporan program ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu tahun 2019 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 90%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2019 yaitu 40 dokumen atau 100%, hal ini menyumbang pencapaian target RAP Ditjen P2P.



Capaian indikator jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2019 sama dengan KKP Kelas I Surabaya yaitu 100% dengan jumlah dokumen dukungan manajemen yang dihasilkan sebanyak 40 dokumen.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2019 dapat dicapai karena telah ditunjuknya penanggung jawab masing-masing laporan, terdapat sarana yang memadai untuk menyusun laporan seperti komputer, printer, dan terdapat pagu anggaran untuk pertemuan penyusunan laporan. Selain itu setiap bulan rutin dilakukan penyusunan laporan dan adanya dukungan dari masing-masing bidang untuk menyampaikan data laporan.

#### 5. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Membuat kesepakatan dan nota dinas tenggang waktu pengumpulan laporan.
- b. Membuat SOP pengumpulan data.
- c. Koordinasi dan rekonsiliasi data dengan bidang-bidang sebagai sumber data primer.

- d. Rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN setiap bulan.
- e. Review Laporan Keuangan dan BMN setiap semester.
- f. Koordinasi pelaporan dengan unit utama eselon I.

## **6. Kendala / Masalah yang Dihadapi**

Keterlambatan pengumpulan data dan laporan dari masing-masing bidang yang dapat menghambat penyusunan dan finalisasi laporan. Salah satu penyebabnya yaitu ada beberapa data laporan yang bersumber dari poliklinik non KKP dan seringkali terlambat mengumpulkan data.

## **7. Pemecahan Masalah**

- a. Membuat Surat Keputusan Kepala Kantor perihal penanggung jawab setiap jenis laporan pada masing-masing bidang beserta uraian tugas.
- b. Pemberian reward dan punishment kepada bidang.
- c. Membuat mekanisme pengumpulan data dari poliklinik non KKP yang mudah, cepat, dan tepat.

## **8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu :

- a. Layanan dukungan manajemen satker dengan pagu anggaran Rp. 1.419.218.000,-
- b. Layanan perkantoran dengan pagu anggaran Rp. 27.647.951.000,-

## **9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- b. Memilah undangan perjalanan dinas sesuai kepentingan.
- c. Belanja barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- d. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 28.388.708.670,- atau 97,7% dari pagu anggaran sebesar Rp. 29.067.169.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100%.



## INDIKATOR 11

### Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P

#### 1. Definisi Operasional

Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM KKP dalam kurun waktu satu tahun. Target tahun 2019 yaitu 9 kali. Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya kapasitas SDM di KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

#### 2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM KKP dalam kurun waktu satu tahun yaitu:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Diklat pengendalian vektor dan BPP	Maret 2019	6 orang
2.	Refreshing petugas TGC	Juni 2019	47 orang
3.	Pelatihan BHD	Juni 2019	10 orang
4.	Peningkatan SDM pengadaan barang dan jasa	Juni 2019	3 orang
5.	Peningkatan kompetensi pegawai prajabatan CPNS	Juli 2019	6 orang
6.	Pelatihan BTCLS	Oktober 2019	2 orang
7.	Simulasi KKM MD	Oktober 2019	14 orang
8.	Pelatihan ATLS	November 2019	2 orang
9.	Simulasi PKD (Penanggulangan Keadaan Darurat)	November 2019	9 orang
<b>Total Peserta</b>			<b>99 orang</b>

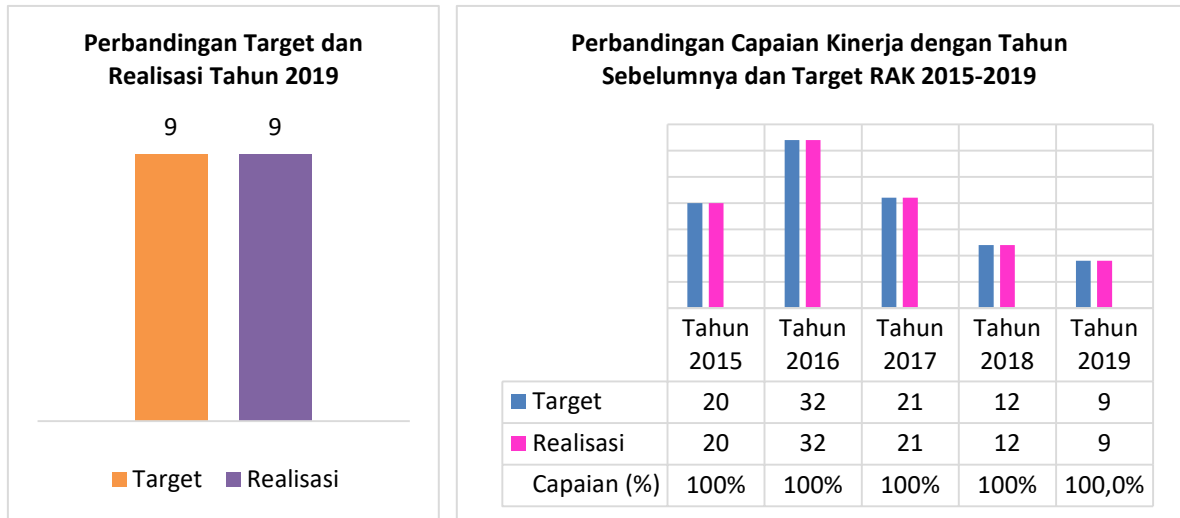
- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{9 \text{ pelatihan}}{9 \text{ pelatihan}} \times 100\% = 100\%$$

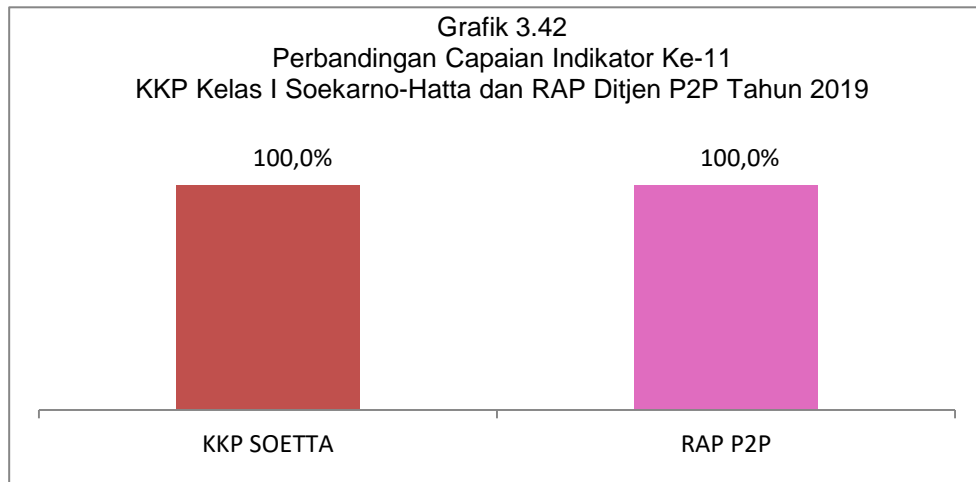
### 3. Capaian Kinerja

Grafik 3.41  
Perbandingan Capaian Kinerja  
Indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P



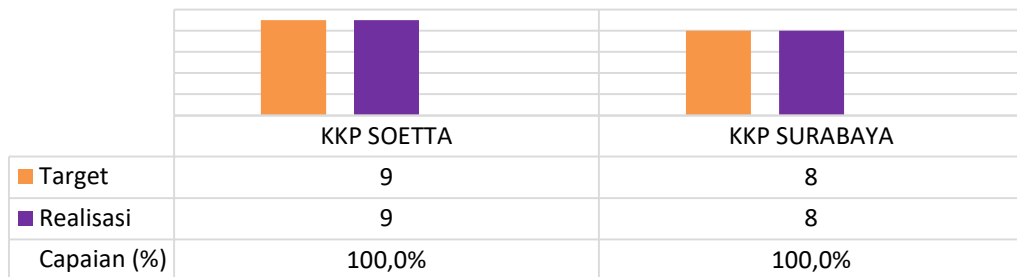
Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah peningkatan kapasitas SDM pada tahun 2019 sebanyak 9 kali dan melebihi target sehingga capaiannya 100% dan realisasi tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu mencapai target.

Grafik 3.42  
Perbandingan Capaian Indikator Ke-11  
KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan RAP Ditjen P2P Tahun 2019



Target indikator persentase layanan administrasi kepegawaian tahun 2019 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 100%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2019 yaitu terlaksana 11 kali kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang P2P atau 100%, hal ini menyumbang pencapaian target RAP Ditjen P2P.

**Grafik 3.43**  
**Perbandingan Capaian Indikator Ke- 11**  
**KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan KKP Kelas I Surabaya Tahun 2019**



Capaian indikator jumlah peningkatan kapasitas SDM Bidang P2P KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2019 sama dengan KKP Kelas I Surabaya yaitu 100%. Jumlah pelatihan di KKP Kelas I Soekarno Hatta sebanyak 9 jenis pelatihan dan KKP Kelas I Surabaya sebanyak 8 jenis pelatihan.

#### 4. Analisis Keberhasilan

Target tahun 2019 dapat dicapai karena tersedianya pagu anggaran dan dukungan pimpinan hingga staff untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM bidang P2P

#### 5. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan TOR dan RAB.
- b. Melakukan koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan.
- c. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor perihal pelaksanaan kegiatan yang melibatkan instansi lain.

#### 6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Terbatasnya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM teknis yang bersifat pelatihan atau diklat di luar kantor (tempat penyelenggara diklat) terkait pembatasan anggaran perjalanan dinas.



## **7. Pemecahan Masalah**

Membuat usulan pelatihan/diklat baik teknis maupun non teknis yang diadakan oleh lembaga penyelenggara diklat resmi dan bersertifikat.

## **8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Refreshing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menular berbahaya di pintu masuk Negara dengan anggaran Rp. 31.712.000,-
- b. Pelatihan petugas KKP ( ATLS, BTCLS, BHD) dengan anggaran Rp. 55.310.000,-
- c. Simulasi PKD (Penanggulangan Keadaan Darurat) dengan anggaran Rp. 4.962.000,-
- d. Diklat pengendalian vektor dan BPP dengan anggaran Rp. 721.570.000,-
- e. Peningkatan SDM pengadaan barang dan jasa dengan pagu anggaran Rp. 14.372.000,-
- f. Peningkatan kompetensi pegawai prajabatan CPNS dengan pagu anggaran Rp. 8.000.000,-
- g. Simulasi KKMMMD dengan pagu anggaran Rp. 11.150.000,-

## **9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

- a. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan 9 jenis pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 99 orang telah mengikuti kegiatan peningkatan kualitas SDM sehingga diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas.
- b. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 841.343.701 atau 99,3% dari pagu anggaran sebesar Rp. 847.076.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100%.



## INDIKATOR 12

### Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana

#### 1. Definisi Operasional

Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahun. Target tahun 2019 yaitu 150 unit. Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya sarana prasarana di KKP Kelas I Soekarno-Hatta untuk menunjang terlaksananya kegiatan operasional sesuai tugas pokok dan fungsi. Pada tahun 2019 jumlah sarana yang bertambah dari tahun sebelumnya sebanyak 269 unit.

#### 2. Cara Perhitungan

$$\frac{\text{Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahun}}{\text{Jumlah target pengadaan}} \times 100 \%$$

$$\frac{269 \text{ unit}}{150 \text{ unit}} \times 100 \% = \mathbf{179,3 \%}$$

##### • Realisasi

Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahun yaitu:

- Alat kesehatan	=	173 unit
- Peralatan pengolah data	=	19 unit
- Ambulans Golf Car	=	1 unit
- Fasilitas penunjang perkantoran	=	76 unit
Total	=	<b>269 unit</b>

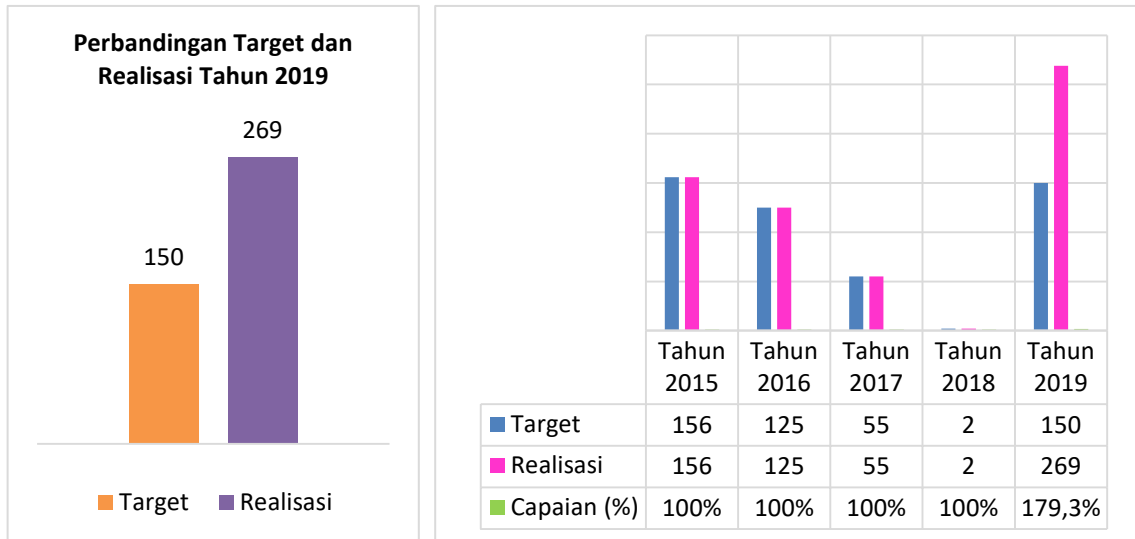
##### • Capaian

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{269 \text{ unit}}{150 \text{ unit}} \times 100 \% = \mathbf{179,3 \%}$$

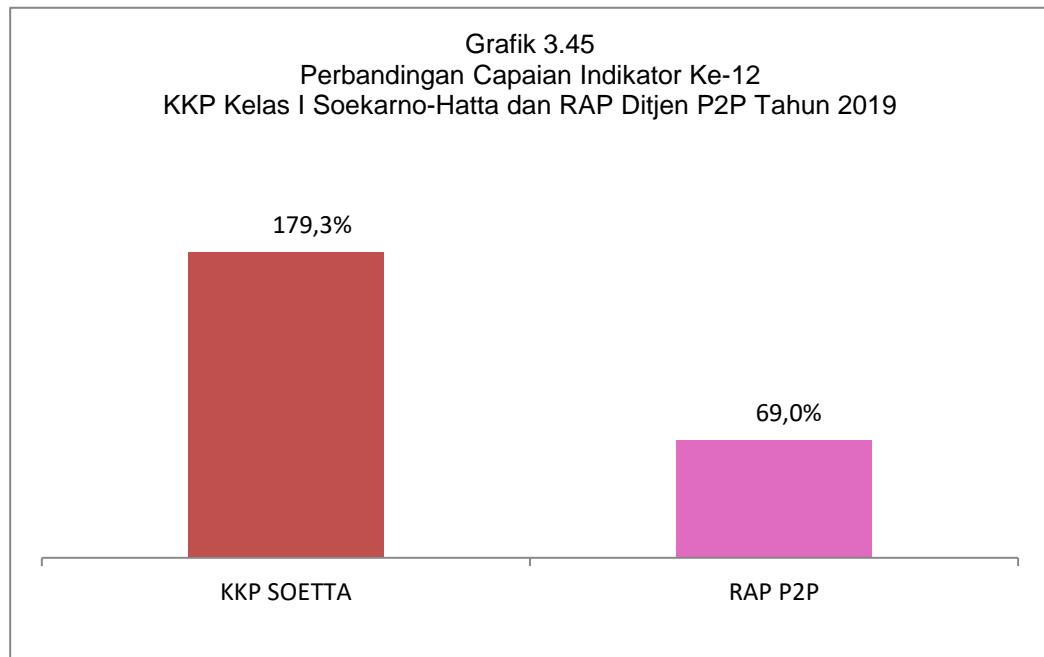
### 3. Capaian Kinerja

Grafik 3.44  
Perbandingan Capaian Kinerja  
Indikator Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana

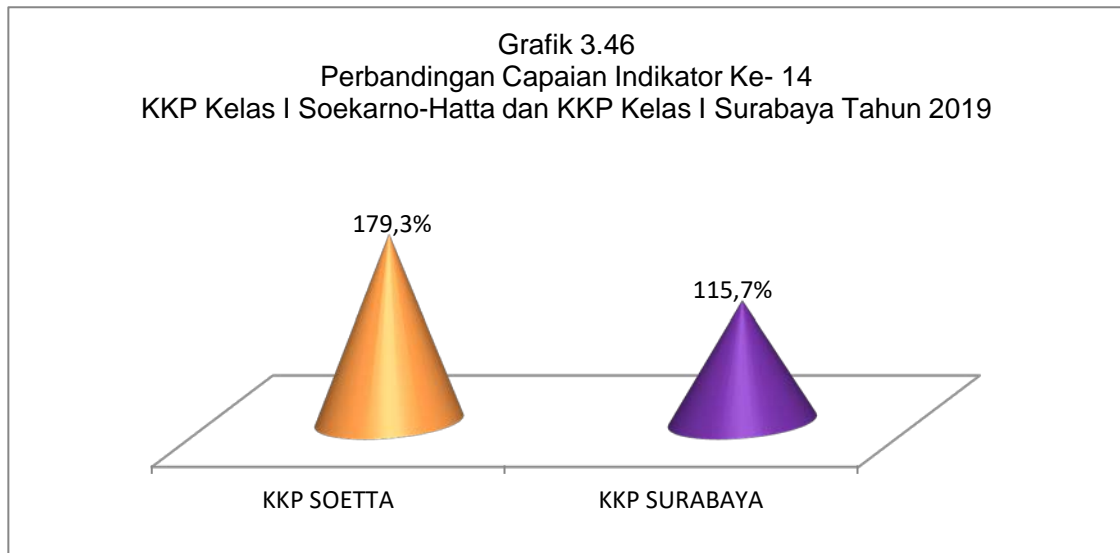


Dari grafik 3.44 diketahui bahwa jumlah pengadaan sarana prasarana pada tahun 2019 sebanyak 296 unit dan sudah mencapai target, sehingga capaiannya 179,3%. Realisasi tahun 2015 sampai tahun 2019 selalu mencapai target.

Capaian tahun 2019 lebih besar dari tahun sebelumnya karena terdapat tambahan belanja modal dari pergeseran belanja perjalanan dinas menjadi belanja modal pada RKAKL KKP Kelas I Soekarno Hatta TA 2019.



Berdasarkan grafik 3.45 target indikator persentase satker pusat dan daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar tahun 2019 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 69%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2019 yaitu 2 paket pengadaan atau 100%, hal ini menyumbang pencapaian target RAP Ditjen P2P.



Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian indikator jumlah pengadaan sarana prasarana KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2019 sebesar 179,3% dengan jumlah pengadaan 269 unit dan capaian KKP Kelas I Surabaya yaitu 115,7% dengan jumlah pengadaan 59 unit.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2019 dapat dicapai karena tersedianya pagu anggaran untuk pengadaan sarana prasarana tersebut, terdapat SDM yang bertugas sebagai pejabat pengadaan dan Unit Layanan Pengadaan, tim teknis, serta adanya dukungan dan monitoring dari pimpinan selama proses pengadaan hingga penerimaan barang/jasa.

#### 5. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Membuat SK Unit Layanan Pengadaan dan Pejabat Pengadaan KKP kelas I Soekarno Hatta Tahun 2019
- b. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mempublikasikannya di aplikasi SIRUP.

- c. Memilih penyedia barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Menggunakan aplikasi teknologi dalam memilih penyedia barang/jasa yaitu aplikasi LPSE.
- e. Konsultasi teknis dengan Subbagian Layanan Pengadaan Ditjen P2P terkait permasalahan pengadaan.

## **6. Kendala/Masalah yang Dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi pada pengadaan tahun 2019 yaitu terdapat belanja jasa yang pada tahun sebelumnya terdapat di e catalog namun pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi yaitu jasa cleaning service. Sehingga perlu penyesuaian metode pengadaan yang semula e catalog menjadi lelang sederhana.

## **7. Pemecahan Masalah**

Konsultasi teknis dengan pusat untuk merubah metode pengadaan dan jumlah pagu yang diumumkan pada SIRUP dan melanjutkan proses pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Pengadaan media display informasi kesehatan dengan pagu anggaran Rp. 208.998.000,-
- b. Pengadaan media pengawasan sertifikat internasional dengan pagu anggaran Rp. 58.420.000,-
- c. Pengadaan Water Test Kit dengan pagu anggaran Rp. 77.000.000,-
- d. Pengadaan ambulans golf car dengan pagu anggaran Rp. 366.085.000,-
- e. Pengadaan peralatan pengolah data dengan pagu anggaran Rp. 144.880.000,-
- f. Pengadaan fasilitas perkantoran dengan pagu anggaran Rp. 2.121.525.000,-

## 9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Proses pengadaan dilaksanakan oleh SDM yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat pengadaan Barang/Jasa.
- b. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 2.952.200.447 atau 99,2% dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.976.908.000,- dengan capaian kinerja sebesar 179,3%.
- c. Efisiensi belanja modal dengan harga terendah namun tetap dengan kualitas yang sama sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7  
Efisiensi Pengadaan Tahun 2019

No	Pengadaan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)
1	Media display informasi kesehatan	208.998.000	204.416.998	2,2
2	Media pengawasan sertifikat internasional	58.420.000	56.275.273	3,7
3.	Water test kit	77.000.000	76.945.500	0,1
4.	Ambulans golf car	366.085.000	362.485.000	1,0
5.	Peralatan pengolah data	144.880.000	142.441.200	1,7
6.	Fasilitas perkantoran	2.121.525.000	2.109.636.476	0,6
<b>Jumlah</b>		<b>2.976.908.000</b>	<b>2.952.200.447</b>	<b>0,8</b>

Pada tahun 2019 beberapa penghargaan berhasil diperoleh KKP Kelas I Soekarno Hatta diantaranya :

Gambar 3.1  
Penghargaan KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019



Penghargaan Unit Kerja yang Menerapkan Indikator Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019



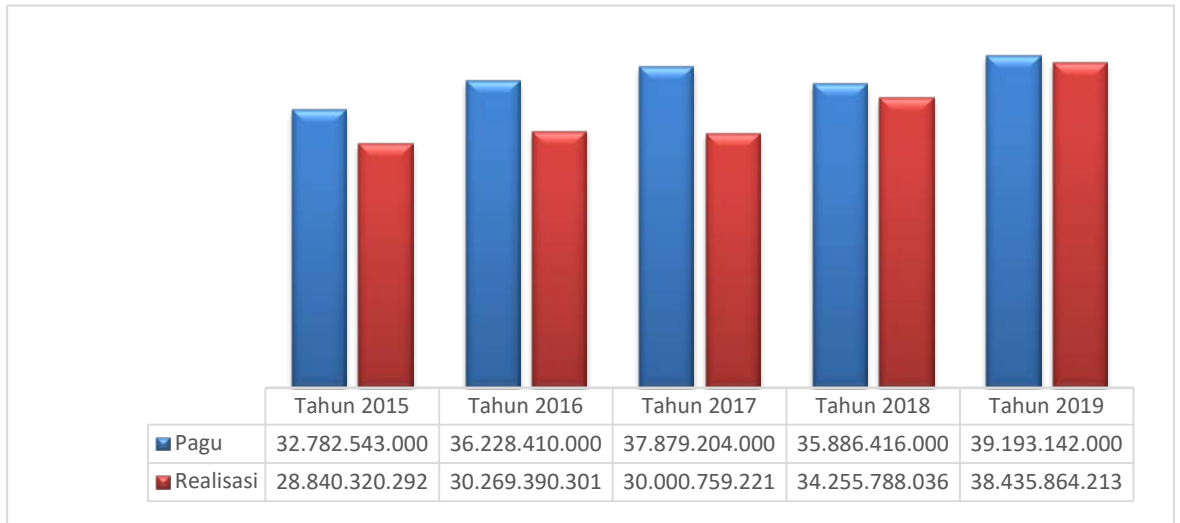
Penghargaan Unit Pengelola LHKASN Terbaik di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019

## C. SUMBER DAYA

### 1. Anggaran Pengeluaran

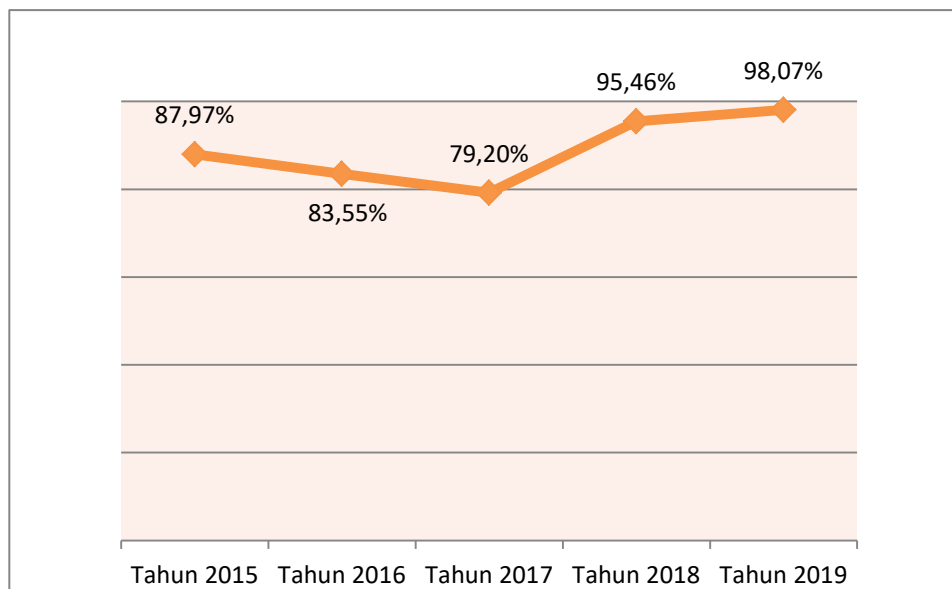
Sumber anggaran pengeluaran KKP Kelas I Soekarno Hatta adalah DIPA Tahun 2019 dengan pagu sebesar Rp. 39.193.142.000,-.

Grafik 3.47  
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 -2019  
KKP Kelas I Soekarno Hatta



Dari grafik 3.49 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 – 2016 pagu anggaran meningkat setiap tahun dan menurun pada tahun 2018, serta meningkat kembali pada tahun 2019.

Grafik 3.48  
Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2015 -2019  
KKP Kelas I Soekarno Hatta





Tabel 3.8  
Pagu dan Realisasi Anggaran Pengeluaran Menurut Jenis Belanja  
KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	19.500.209.000	18.903.368.104	96,94
2	Belanja Barang	16.716.025.000	16.580.295.662	99,19
3	Belanja Modal	2.976.908.000	2.952.200.447	99,17
<b>Total</b>		<b>39.193.142.000</b>	<b>38.435.864.213</b>	<b>98,07</b>

Tabel 3.9  
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sumber Pembiayaan  
KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019

No	Sumber Pembiayaan	Pagu ( Rp )	Realisasi ( Rp )	%
1	Rupiah Murni (RM)	30.760.378.000	30.081.210.200	97,79
2	PNBP	8.432.764.000	8.354.654.013	99,07
<b>Total</b>		<b>39.193.142.000</b>	<b>38.435.864.213</b>	<b>98,07</b>

Pagu anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta berasal dari 2 sumber pembiayaan yaitu Rupiah Murni (RM) dan PNBP. Sumber RM sebesar Rp. 30.760.378.000,- atau 78,5% dari pagu total dengan realisasi anggaran sebesar 97,79% sedangkan yang berasal dari PNBP yaitu Rp. 8.432.764.000,- atau 21,5% dari pagu dengan realisasi sebesar 99,07%.

Tabel 3.10  
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Output KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019

KODE	KEGIATAN / OUTPUT	PAGU	VOL	REALISASI			
				ANGGARAN	%	VOL	%
<b>2058</b>	<b>Surveilans dan Karantina Kesehatan</b>	<b>5.313.129.000</b>		<b>5.267.825.651</b>	<b>99,15</b>		
2058.004	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB	289.132.000	115 layanan	289.132.000	100	115 layanan	100
2058.007	Layanan Kekarantinaan Kesehatan	5.023.997.000	1.583 layanan	4.978.693.651	99,1	1.583 layanan	100
<b>2059</b>	<b>Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor &amp; Zoonotik</b>	<b>1.733.600.000</b>		<b>1.725.384.241</b>	<b>99,53</b>		

2059.005	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	400.000.000	2 layanan	398.018.500	99,50	2 layanan	100
2059.009	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	1.333.600.000	505 layanan	1.327.365.741	99,53	505 layanan	100
<b>2060</b>	<b>Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung</b>	<b>224.382.000</b>		<b>219.056.000</b>	<b>97,63</b>		
2060.500	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	134.382.000	6 layanan	133.316.000	99,21	6 layanan	100
2060.502	Layanan Pengendalian Penyakit TB	90.000.000	13 layanan	85.740.000	95,27	13 layanan	100
<b>2063</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>	<b>31.922.031.000</b>		<b>31.223.598.321</b>	<b>97,81</b>		
2063.053	Layanan sarana prasarana internal	2.632.490.000	1 layanan	2.614.563.176	99,32	1 layanan	100
2063.994	Layanan dukungan manajemen satker	1.441.590.00	1 layanan	1.403.558.885	97,36	1 layanan	100
	Layanan Perkantoran	27.847.951.000	1 layanan	27.205.476.260	97,69	1 layanan	100
<b>TOTAL</b>		<b>39.193.142.000</b>	<b>2.227 layanan</b>	<b>38.435.864.213</b>		<b>2.227 layanan</b>	

Sebagian besar anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2019 dipergunakan untuk dukungan manajemen dan kegiatan surveilans dan karantina kesehatan. Realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar 98,07% dengan capaian indikator kinerja sebesar 134,0%.

Tabel 3.11  
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Indikator  
KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	
				Anggaran	%
1	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan		48.400.000	41.124.400	85,0%
		Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut	36.400.000	29.124.400	
		Penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan (sertifikat sanitasi pesawat)	12.000.000	12.000.000	
2	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP		150.702.000	150.273.900	99,7%
		Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya	29.500.000	29.500.000	
		Pengadaan bahan kekarantinaan	121.202.000	120.773.900	
3	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit		2.146.800.000	2.140.981.200	99,7%
		Koordinasi program karantina kesehatan	116.520.000	111.221.200	
		Bimtek kekarantinaan ke wilker	7.020.000	7.020.000	
		Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA	1.350.000	1.350.000	
		Layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan COP	132.000.000	132.000.000	
		Layanan kekarantinaan kesehatan di Bandar Udara	1.842.885.000	1.842.885.000	
		Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan	47.025.000	46.505.000	
4	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus		2.305.868.000	2.283.430.980	99,0%
		Pengawasan arus mudik pada situasi khusus	227.920.000	227.920.000	
		Pelayanan kesehatan	1.911.980.000	1.895.249.480	
		Layanan kesehatan rujukan	31.500.000	31.418.500	
		Koordinasi pelayanan kesehatan arus mudik	15.900.000	15.900.000	
		Koordinasi dan konsultasi teknis pelayanan kesehatan	32.748.000	32.573.000	
		Rapat persiapan dan evaluasi embarkasi debarkasi haji	78.800.000	73.470.000	
		Bimtek pelayanan kesehatan	7.020.000	6.900.000	
5	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah		26.765.000	26.765.000	100,0%
		Review dokumen rencana kontijensi di bandara Soetta	18.115.000	18.115.000	
		Table Top	8.650.000	8.650.000	

6	Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan		261.687.000	259.538.375	99,2%
		Sistem pelaporan dan penerbitan dokumen melalui Simkespel	44.730.000	44.730.000	
		Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan	16.957.000	16.613.900	
		Pengadaan obat dan bahan habis pakai	200.000.000	198.194.475	
7	Jumlah pelabuhan/bandara/PPLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi		125.355.000	125.355.000	100,0%
		Bahan kegiatan sanitasi	9.575.000	9.575.000	
		Rapat koordinasi program PRL	66.420.000	66.420.000	
		Konsultasi teknis program PRL	8.400.000	8.400.000	
		Pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan	33.940.000	33.940.000	
		Bimtek kegiatan PRL	7.020.000	7.020.000	
8	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area		1.012.030.000	1.007.086.540	99,5%
		Layanan capaian eliminasi malaria	400.000.000	398.018.500	
		Layanan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit	612.030.000	609.068.040	
9	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung		224.382.000	219.056.000	97,6%
		Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS	134.382.000	133.316.000	
		Layanan pengendalian penyakit TBC	90.000.000	85.740.000	
10	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		29.067.169.000	28.388.708.670	97,7%
		Layanan internal diluar modal dan pelatihan	1.419.218.000	1.381.426.885	
		layanan perkantoran	27.647.951.000	27.007.281.785	
11	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P		847.076.000	841.343.701	99,3%
		Refreshing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menular berbahaya	31.712.000	31.712.000	
		Pelatihan petugas KKP	55.310.000	53.090.000	
		Simulasi PKD	4.962.000	4.962.000	
		Diklat vektor	721.570.000	718.297.701	
		Peningkatan SDM Barjas	14.372.000	14.372.000	
		Peningkatan kompetensi pegawai prajabatan CPNS	8.000.000	7.760.000	



		Simulasi KKM	11.150.000	11.150.000	
12	Jumlah pengadaan sarana prasarana		2.976.908.000	2.952.200.447	99,2%
		Media display informasi kesehatan	208.998.000	204.416.998	
		Media pengawasan sertifikat internasional	58.420.000	56.275.273	
		Water test kit	77.000.000	76.945.000	
		Ambulans golf car	366.085.000	362.485.500	
		Pengolah data	144.880.000	142.441.200	
		Fasilitas perkantoran	2.121.525.000	2.109.636.476	
	<b>TOTAL</b>		<b>39.193.142.000</b>	<b>38.435.864.213</b>	<b>98,07</b>

Sebagian besar anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2019 dipergunakan untuk dukungan manajemen dan kegiatan surveilans dan karantina kesehatan. Realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar 98,07% dengan capaian indikator kinerja sebesar 134,0%.

## 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sumber anggaran penerimaan KKP Kelas I Soekarno-Hatta antara lain berasal dari: buku ICV, vaksinasi, penerbitan dokumen, pemeriksaan pasien, pelayanan ambulans dan penerbitan sertifikat. Pada tahun 2019, KKP Kelas I Soekarno-Hatta menargetkan penerimaan PNBP sebesar Rp. 28.109.215.000,-.

Tabel 3.12  
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019

Jenis PNBP	Tarif	Realisasi PNBP Tahun 2019	
		Volume	Jumlah
Penerimaan Sensor/Karantina Pengawasan /Pemeriksaan			
Buku ICV	25000	165027	4.125.675.000
Vaksin yellow Fever	300000	1130	339.000.000
Vaksin Meningitis	260000	70680	18.376.800.000
Surat Keterangan Sehat	5000	116	580.000
Surat Keterangan Sehat untuk Terbang	5000	6992	34.960.000



Surat Jenazah	10000	3185	31.850.000
Pendaftaran	5000	71577	357.885.000
Pemeriksaan Dokter (Peraturan lama)	15000	71471	1.072.065.000
Pemeriksaan Dokter (Aturan baru)	20000	19589	391.780.000
Jasa Pemberian Surat Keterangan Medical Contraindication of Vaccination	5000	37	185.000
Ambulance ke DKI (dlm kota)	50000	459	22.950.000
Ambulance luar DKI (Jakarta, Bekasi, Bogor)	100000	169	16.900.000
Ambulance Jarak tempuh 10 km	50000	39	1.950.000
Tambahan per km (setelah 10 km)	5000	1779	8.895.000
Sertifikat Knock Down	100000	120	12.000.000
Sertifikat OMKA	100000	36	3.600.000
Sertifikat Air Bersih	50000	508	25.400.000
Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Restoran	50000	99	4.950.000
Sertifikat laik hygiene sanitasi restoran (HB)	100000	13	1.300.000
Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga Gol C	100000	1	100.000
Emergency	50000	131	6.550.000
Surat Sertifikat Sehat	10000	579	5.790.000
Sertifikat Sanitasi Pesawat	25000	117	2.925.000
Pemeriksaan Laboratorium :		0	-
Darah Rutin	25000	2	50.000
Gula darah	18000	17	306.000
Test Kehamilan	25000	1517	37.925.000
Asam Urat	18000	0	-
SGOT	18000	0	-
SGPT	18000	0	-
Cocain	18000	227	4.086.000
Amphetamine	18000	227	4.086.000
Methamphetamine	18000	227	4.086.000
Benzodiasephine	18000	227	4.086.000
Cannabinoid (THC)	18000	227	4.086.000
Cholesterol total	18000	0	-
Morphin	18000	227	4.086.000
Ureum	18000	0	-
Urin Rutin	10000	0	-
HBsAg	25000	0	-
Widal	25000	0	-
Darah Lengkap	30000	0	-
Anti HBsAg	25000	0	-
Sub Total			24.906.887.000
Surat Ijin Penyelenggara Tindakan Penyehatan dan Alat angkut			2.000.000
Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan			71.633.000
Kesalahan Emergency (5.000)			5.000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah			54.901.585



Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin			58.901.800
Penerimaan kembali Belanja Barang			73.483.739
<b>Jumlah</b>			<b>25.167.812.124</b>

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak fungsional tahun 2019 sebesar Rp. 24.906.887.000,- ditambahkan dengan penerimaan negara bukan pajak umum sebesar Rp. 260.925.124,- sehingga penerimaan negara bukan pajak keseluruhan sebesar Rp 25.167.812.124,- atau 89,5% dari target. Penerimaan PNBPN terbesar berasal dari Vaksinasi Meningitis. Terdapat selisih lebih Rp 330.000,- yang disebabkan adanya kesalahan setoran PNBPN oleh pihak lain (travel) ke akun PNBPN KKP Kelas I Soekarno-Hatta.

### 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Nilai Barang Milik Negara di KKP Kelas I Soekarno-Hatta sampai dengan triwulan IV tahun 2019 sebesar Rp. 110.696.808.660,- namun terjadi penyusutan sebesar Rp. 61.196.728.492,- sehingga nilai netto menjadi Rp. 49.500.080.168,-.

Tabel 3.13  
Posisi Barang Milik Negara di KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019

Kode	Uraian	Nilai BMN (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Netto (Rp)
117111	Barang Konsumsi	472.529.200	0	472.529.200
117113	Barang untuk pemeliharaan	0	0	0
117114	Suku cadang	40.833.000	0	40.833.000
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke	0	0	0
117131	Bahan baku	204.839.600	0	204.839.600
117199	Persediaan lainnya	5.778.172.733	0	5.778.172.733
131111	Tanah	16.626.425.000	0	16.626.425.000
132111	Peralatan dan Mesin	71.895.755.247	59.323.823.021	12.571.932.226
133111	Gedung & bangunan	14.860.230.000	1.580.448.651	13.279.781.349
134113	Jaringan	11.490.260	6.032.320	5.457.940
135121	Aset tetap lainnya	502.616.620	0	502.616.620
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
162151	Software	197.702.000	180.209.500	17.492.500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	106.215.000	106.215.000	0
<b>Jumlah</b>		<b>110.696.808.660</b>	<b>61.196.728.492</b>	<b>49.500.080.168</b>

Barang Milik Negara yang mengalami penyusutan diantaranya peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan dan software.

Tabel 3.14  
Posisi Barang Persediaan KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019

Kode	Uraian	Nilai Persediaan
117111	Barang Konsumsi	472.529.200
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117114	Suku Cadang	40.833.000
117131	Bahan Baku	204.839.600
117199	Persediaan Lainnya	5.778.172.733
	Jumlah	6.496.374.533

Posisi barang persediaan di KKP Kelas I Soekarno-Hatta sampai dengan Desember 2019 Rp. 6.496.374.533,- yang terdiri dari barang konsumsi yaitu ATK. Suku cadang dan persediaan lainnya berupa obat-obatan.

Tabel 3.15  
Rincian Aset Sarana dan Prasarana  
KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2019

No	Uraian	Satuan	Soetta	Halim	Jumlah
1	Luas Tanah	m <sup>2</sup>	1.000	600	1.600
2	Luas Bangunan	m <sup>2</sup>	2.444	1.200	3.644
3	Kendaraan roda 4	unit	15	2	17
4	Kendaraan roda 2	unit	9	3	12
5	Kendaraan khusus (Segway)	unit	10	-	10
	Alat Kesehatan	unit	92	27	119
6	Perlengkapan Kantor	unit	280	107	387



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Kegiatan yang dilakukan KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2019 berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya telah berupaya meningkatkan kinerja dalam cegah tangkal keluar masuknya penyakit menular berpotensi wabah baik di Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Halim Perdanakusuma.

Pada tahun 2019 KKP Kelas I Soekarno-Hatta telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019, seluruh kegiatan dapat terlaksana baik dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 134,0% dan realisasi anggaran sebesar 98,07%. Capaian kinerja pada tahun 2019 lebih besar dari tahun 2018 dimana capaian tahun 2018 sebesar 132,3% dengan realisasi anggaran sebesar 95,46%.

Dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan dapat dipaparkan bahwa :

- a. Terdapat 6 indikator yang berhasil mencapai target dengan capaian lebih dari 100%, yaitu:
  - 1) Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan dengan realisasi 611 sertifikat dari target 600 sertifikat dengan capaian kinerja 101,8%.
  - 2) Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dengan realisasi 46.011 sertifikat dari target 39.024 sertifikat dengan capaian kinerja 117,9%.
  - 3) Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus dengan realisasi 29 layanan dari target 20 layanan dengan capaian kinerja 145%.
  - 4) Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan dengan realisasi 180.367 sertifikat dari target 60.000 sertifikat dengan capaian kinerja 300,6%.
  - 5) Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung dengan realisasi 1.802 orang dari target 1.100 orang dengan capaian kinerja 163,8%.
  - 6) Jumlah pengadaan sarana prasarana dengan realisasi 269 unit dari target 150 unit dengan capaian kinerja 179,3%



b. Terdapat 6 indikator yang yang berhasil mencapai target dengan capaian 100%, yaitu:

- 1) Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP dengan realisasi 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%.
- 2) Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah dengan realisasi 1 bandara dari target 1 bandara dengan capaian kinerja 100%.
- 3) Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi dengan realisasi 2 bandara dari target 2 bandara dengan capaian kinerja 100%
- 4) Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area dengan realisasi 2 bandara dari target 2 bandara dengan capaian kinerja 100%
- 5) Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan realisasi 40 dokumen dari target 40 dokumen dengan dan capaian kinerja 100%
- 6) Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P dengan realisasi 9 kali pelatihan dari target 9 kali pelatihan dengan capaian kinerja 100%

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja di tahun 2019 yaitu tersedianya pagu anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana lainnya, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD), serta peningkatan kerjasama tim dan koordinasi dengan lintas sektor.

Kendala yang ditemukan dalam pencapaian kinerja selama tahun 2019 yaitu jumlah SDM yang belum sebanding dengan beban kerja jumlah orang, alat angkut, barang, dan tempat yang harus dilakukan pengawasan, kontribusi lintas sektor/ lintas program yang berhubungan dengan kegiatan KKP Kelas I Soekarno-Hatta masih ada yang belum baik.



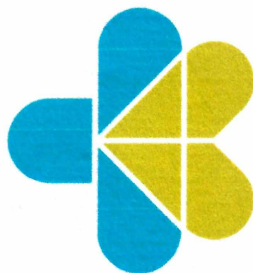
## **B. RENCANA TINDAK LANJUT**

Rencana tindak lanjut perbaikan pada tahun yang akan datang diantaranya usulan penambahan SDM terampil di bidangnya, monitoring dan evaluasi rutin pencapaian kegiatan, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait lainnya baik melalui advokasi, sosialisasi kegiatan dan membangun komitmen secara bersama-sama untuk mencegah keluar masuknya penyakit melalui pintu gerbang Negara.



# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Anas Ma'ruf, MKM

Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anung Sugihantono, M.Kes

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp 35.693.142.000, berjanji akan mewujudkan realisasi anggaran minimal 95% dan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Desember 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

**dr. Anung Sugihantono, M.Kes**  
NIP 196003201985021002

**dr. Anas Ma'ruf, MKM**  
NIP 197005202002121003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO-HATTA**  
**TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan 2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP 3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit 4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus 5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan 7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	600 sertifikat  100 %  39.024 sertifikat  20 layanan  1 bandara  60.000 sertifikat  2 bandara
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	2 bandara
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	1.100 orang
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P 12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	40 dokumen  9 jenis  150 unit

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO-HATTA**  
**TAHUN 2019**

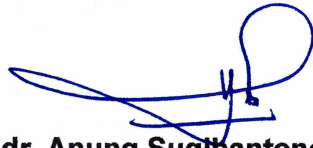
NO	OUTPUT RKAKL	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB	115 Layanan	Rp. 465.198.000
	a. Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di KKP	3 Layanan	Rp. 237.278.000
	b. Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	112 Layanan	Rp. 227.920.000
2	Layanan Kekearifanaan Kesehatan	1.583 Layanan	Rp. 4.847.931.000
	a. Layanan Pelaksanaan Kekearifanaan Kesehatan di KKP	12 Layanan	Rp. 2.805.146.000
	b. Layanan Kekearifanaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)	240 Layanan	Rp. 132.000.000
	c. Layanan kekearifanaan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut	200 Layanan	Rp. 36.400.000
	d. Layanan kegawat daruratan dan rujukan	36 Layanan	Rp. 31.500.000
	e. Layanan kekearifanaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional	1.095 Layanan	Rp. 1.842.885.000
3	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	2 Layanan	Rp. 400.000.000
	a. Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria di Pelabuhan/Bandara/PLBD	2 Layanan	Rp. 400.000.000
4	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	505 Layanan	Rp. 1.333.600.000
	a. Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBD	4 Layanan	Rp. 1.085.353.000
	b. Layanan Pengendalian Vektor DBD	50 Layanan	Rp. 42.750.000
	c. Layanan survey vektor Pes	36 Layanan	Rp. 74.592.000
	d. Layanan Pengendalian Vektor Diare	30 Layanan	Rp. 12.810.000
	e. Layanan Pengendalian Vektor malaria	5 Layanan	Rp. 6.135.000
	f. Layanan Survei Vektor DBD	300 Layanan	Rp. 49.500.000
	g. Layanan Survei Vektor Diare	50 Layanan	Rp. 15.750.000
	h. Layanan Survei Vektor Malaria	30 Layanan	Rp. 46.710.000
5	Layanan Pencegahan dan Penedgalian Penyakit HIV AIDS	6 Layanan	Rp. 134.382.000
	Deteksi Dini HIV AIDS	1 Layanan	Rp. 120.757.000
	Layanan tes HIV dan IMS di KKP	5 Layanan	Rp. 13.625.000
6	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	13 Layanan	Rp. 90.000.000
	a. Layanan Deteksi Dini Terduga TBC (UPT/KKP)	1 Layanan	Rp. 35.340.000
	b. Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP	12 Layanan	Rp. 54.660.000
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Rp. 2.632.490.000
8	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	Rp. 1.441.590.000
9	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 24.347.951.000
	<b>Total</b>		<b>Rp. 35.693.142.000</b>

<b>No Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1. Surveilans dan Karantina Kesehatan	Rp 5.313.129.000,-
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Rp 1.733.600.000,-
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Rp 224.382.000,-
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp 28.422.031.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp 35.693.142.000,-</b>

Jakarta, Desember 2018

Direktur Jenderal P2P

Kepala KKP Kelas I Soekarno-Hatta



**dr. Anung Sugihantono, M.Kes**  
NIP 196003201985021002



**dr. Anas Ma'ruf, MKM**  
NIP 197005202002121003





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Anas Ma'ruf, MKM

Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anung Sugihantono, M.Kes

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 39.193.142.000,- berjanji akan mewujudkan realisasi anggaran minimal 95% dan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2019

Pihak Kedua

**dr. Anung Sugihantono, M.Kes**  
NIP 196003201985021002

Pihak Pertama,

**dr. Anas Ma'ruf, MKM**  
NIP 197005202002121003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO-HATTA**  
**TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	600 sertifikat
		2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%
		3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	39.024 sertifikat
		4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	20 layanan
		5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	1 bandara
		6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	60.000 sertifikat
		7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	2 bandara
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	2 bandara
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	1.100 orang
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 dokumen
		11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	9 jenis
		12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	150 unit

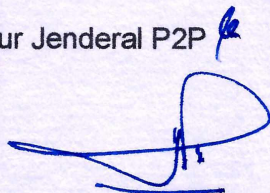
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO-HATTA**  
**TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>OUTPUT RKAKL</b>	<b>TARGET</b>	<b>ANGGARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB	115 Layanan	Rp. 289.132.000
	a. Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di KKP	3 Layanan	Rp. 61.212.000
	b. Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	112 Layanan	Rp. 227.920.000
2	Layanan Kekejarantinaan Kesehatan	1.583 Layanan	Rp. 5.023.997.000
	a. Layanan Pelaksanaan Kekejarantinaan Kesehatan di KKP	12 Layanan	Rp. 2.981.212.000
	b. Layanan Kekejarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)	240 Layanan	Rp. 132.000.000
	c. Layanan kekejarantinaan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut	200 Layanan	Rp. 36.400.000
	d. Layanan kegawat darurat dan rujukan	36 Layanan	Rp. 31.500.000
	e. Layanan kekejarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional	1.095 Layanan	Rp. 1.842.885.000
3	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	2 Layanan	Rp. 400.000.000
	a. Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria di Pelabuhan/Bandara/PLBD	2 Layanan	Rp. 400.000.000
4	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	505 Layanan	Rp. 1.333.600.000
	a. Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBD	4 Layanan	Rp. 1.085.353.000
	b. Layanan Pengendalian Vektor DBD	50 Layanan	Rp. 42.750.000
	c. Layanan survey vektor Pes	36 Layanan	Rp. 74.592.000
	d. Layanan Pengendalian Vektor Diare	30 Layanan	Rp. 12.810.000
	e. Layanan Pengendalian Vektor malaria	5 Layanan	Rp. 6.135.000
	f. Layanan Survei Vektor DBD	300 Layanan	Rp. 49.500.000
	g. Layanan Survei Vektor Diare	50 Layanan	Rp. 15.750.000
	h. Layanan Survei Vektor Malaria	30 Layanan	Rp. 46.710.000
5	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	6 Layanan	Rp. 134.382.000
	Deteksi Dini HIV AIDS	1 Layanan	Rp. 120.757.000
	Layanan tes HIV dan IMS di KKP	5 Layanan	Rp. 13.625.000
6	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	13 Layanan	Rp. 90.000.000
	a. Layanan Deteksi Dini Terduga TBC (UPT/KKP)	1 Layanan	Rp. 35.340.000
	b. Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP	12 Layanan	Rp. 54.660.000
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Rp. 2.632.490.000
8	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	Rp. 1.441.590.000
9	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 27.847.951.000
	<b>Total</b>		<b>Rp. 39.193.142.000</b>

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Rp 5.313.129.000,-
2.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Rp 1.733.600.000,-
3.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Rp 224.382.000,-
4.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp 31.922.031.000,-
Total		<b>Rp 39.193.142.000,-</b>

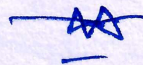
Jakarta, Oktober 2019

Direktur Jenderal P2P



**dr. Anung Sugihantono, M.Kes**  
NIP. 196003201985021002

Kepala KKP Kelas I Soekarno-Hatta



**dr. Anas Ma'ruf, MKM**  
NIP. 197005202002121003

**MONITORING REALISASI INDIKATOR KINERJA PER BULAN  
KKP KELAS I SOEKARNO HATTA  
TAHUN 2019**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SATKER	TARGET	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH	%	
1	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan	Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantina Kesehatan dengan hasil sertifikat PHQC,SSCEC	600	28	24	20	27	21	37	167	46	108	106	20	7	611	101,8%	
		Knock Down (SSCC)	120	18	14	7	16	10	16	9	14	9	3	-	-	116		
		Sertifikat sanitasi pesawat (SSCEC)	480	10	10	13	11	11	21	158	32	99	103	20	7	495		
2	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	100,0%	
		1. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam		2	1	0	3	3	1	1	4	2	4	3	5	29		
		2. Jumlah laporan sinyal yang diterima		2	1	0	3	3	1	1	4	2	4	3	5	29		
3	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan/bandara (COP, Gendec) dan di klinik layanan lainnya (surveilans rutin)	39.024	3723	3394	3640	3914	3506	3892	4099	4023	3744	4054	3873	4149	46.011	117,9%	
		COP	600	56	113	172	150	154	147	162	71	90	172	182	166	1.635		
		Gendec	38.412	3666	3280	3.467	3.763	3.351	3.744	3.936	3.951	3.653	3.881	3.690	3.982	44.364		
		Surveilans rutin	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
4	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	Jumlah pelayanan kesehatan yang di laksanakan pada saat situasi khusus tertentu seperti lebaran, natal, tahun baru dan lain - lain	20	0	0	0	0	13	0	2	2	0	0	0	12	29	145,0%	
5	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100,0%	
6	Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan permintaan/permohonan yang diterima. Jenis sertifikat yang diterbitkan antara lain jumlah sertifikat izin laik terbang, jumlah sertifikat izin angkut orang sakit, jumlah sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV	60.000	21.484	19.792	12.526	18.306	7.249	1.854	3.894	14.839	18.005	21.826	19.638	20.954	180.367	300,6%	
		Sertifikat ijin laik terbang		690	712	697	673	686	702	691	671	715	957	1.194	1.279	9.667		
		Surat tidak laik terbang		48	41	45	49	36	43	51	46	59	86	80	84	668		
		Sertifikat ijin angkut orang sakit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	29		
		Surat sehat		14	28	18	3	0	0	1	2	7	0	3	-	76		
		Surat sakit		2	9	5	5	3	2	11	5	0	2	3	-	47		
		Surat Kematian		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	13	
		Sertifikat ijin angkut jenazah		241	354	260	206	443	289	385	359	469	395	396	424	4.221		
		Sertifikat sehat		0	1	53	23	15	91	246	37	84	28	13	29	620		
		ICV KKP Soetta		13.189	10.047	7.348	5.647	4.166	727	2.109	5.429	8.021	6.858	5.735	10.260	79.536		
ICV Klinik / RS		7.300	8.600	4.100	11.700	1.900	-	400	8.290	8.650	13.500	12.200	8.850	85.490				

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SATKER	TARGET	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH	%	
7	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM dan TTU memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	100,0%	
8	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,0%	
9	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	Jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya	1100	0	86	231	206	93	0	413	19	0	302	0	452	1.802	163,8%	
		HIV	500	0	43	116	103	0	0	127	0	0	151	0	226	766		
		TB	600	0	43	115	103	93	0	286	19	0	151	0	226	1.036		
10	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 11 Dokumen yakni sebagai berikut :	40	7	3	2	3	3	2	5	2	2	3	3	5	40	100,0%	
		1. RKAKL / DIPA	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		2. Laptah	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		3. Laporan Keuangan	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
		4. Laporan BMN	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
		5. Lakip	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		6. Profil	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		7. Proposal PNBPN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		8. Dokumen Kepegawaian	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		9. E-monev Bappenas (PP 39)	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	
		10. Laporan Eksekutif Bulanan (LEB)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		11. Emonev DJA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
11	Jumlah pengadaan sarana prasarana	Jumlah pengadaan :	150	0	0	0	152	0	0	6	6	0	0	68	37	269	179,3%	
		1. Gedung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2. Alkes		0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	23	173		
		3. Pengolah data		0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	4	5	19		
		4. Lain-lain (Ambulans Golf Car)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
		5. Fasilitas perkantoran		0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	64	8	76		
12	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM KKP dalam kurun waktu satu tahun	9	0	0	1	0	0	3	1	0	0	2	2	0	9	100,0%	
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>																<b>134,0%</b>		